



BADAN PUSAT STATISTIK

ST2023
SENSUS PERTANIAN

SURVEI PENYUSUNAN DISAGREGASI PMTB 2022 (KUESIONER DINAS)

Pelatihan Petugas
Survei Khusus Neraca Pengeluaran 2022

DIREKTORAT NERACA PENGELOUARAN



KERANGKA PAPARAN

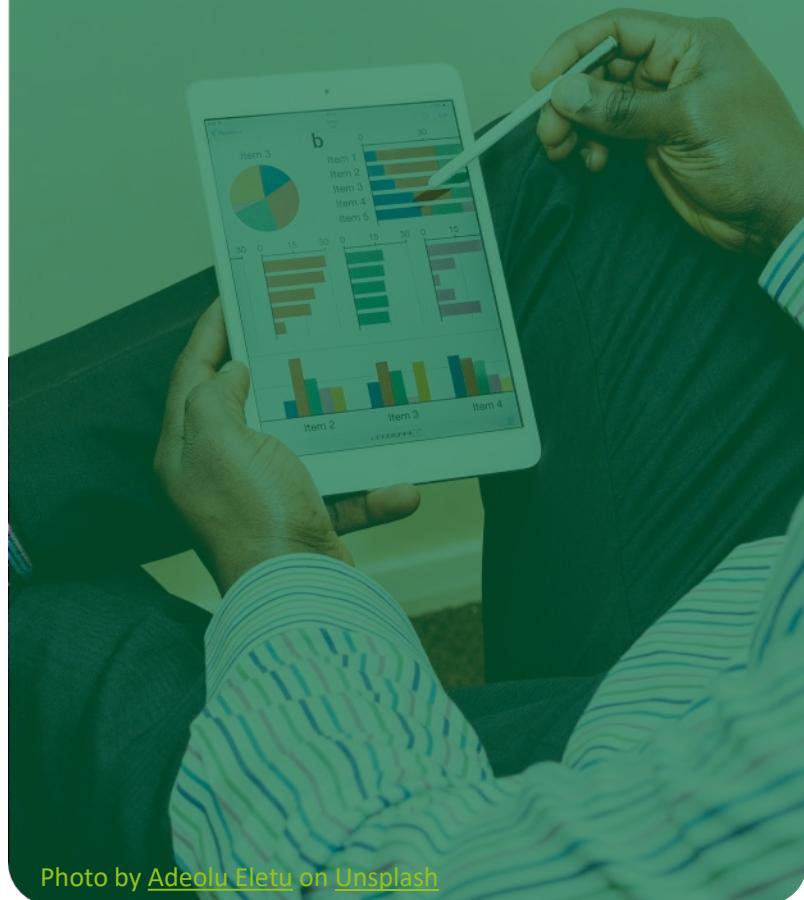


Photo by [Adeolu Eletu](#) on Unsplash

- 1 KONSEP DAN JENIS ASET TETAP**
- 2 JADWAL KEGIATAN**
- 3 METODOLOGI SURVEI**
- 4 PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER**

The background image is an aerial photograph of a lush, green landscape featuring terraced fields and several palm trees. The terrain is hilly and covered in dense vegetation. A small white diamond-shaped graphic is positioned in the upper left corner, containing the number '1' and four small dots below it.

1

....

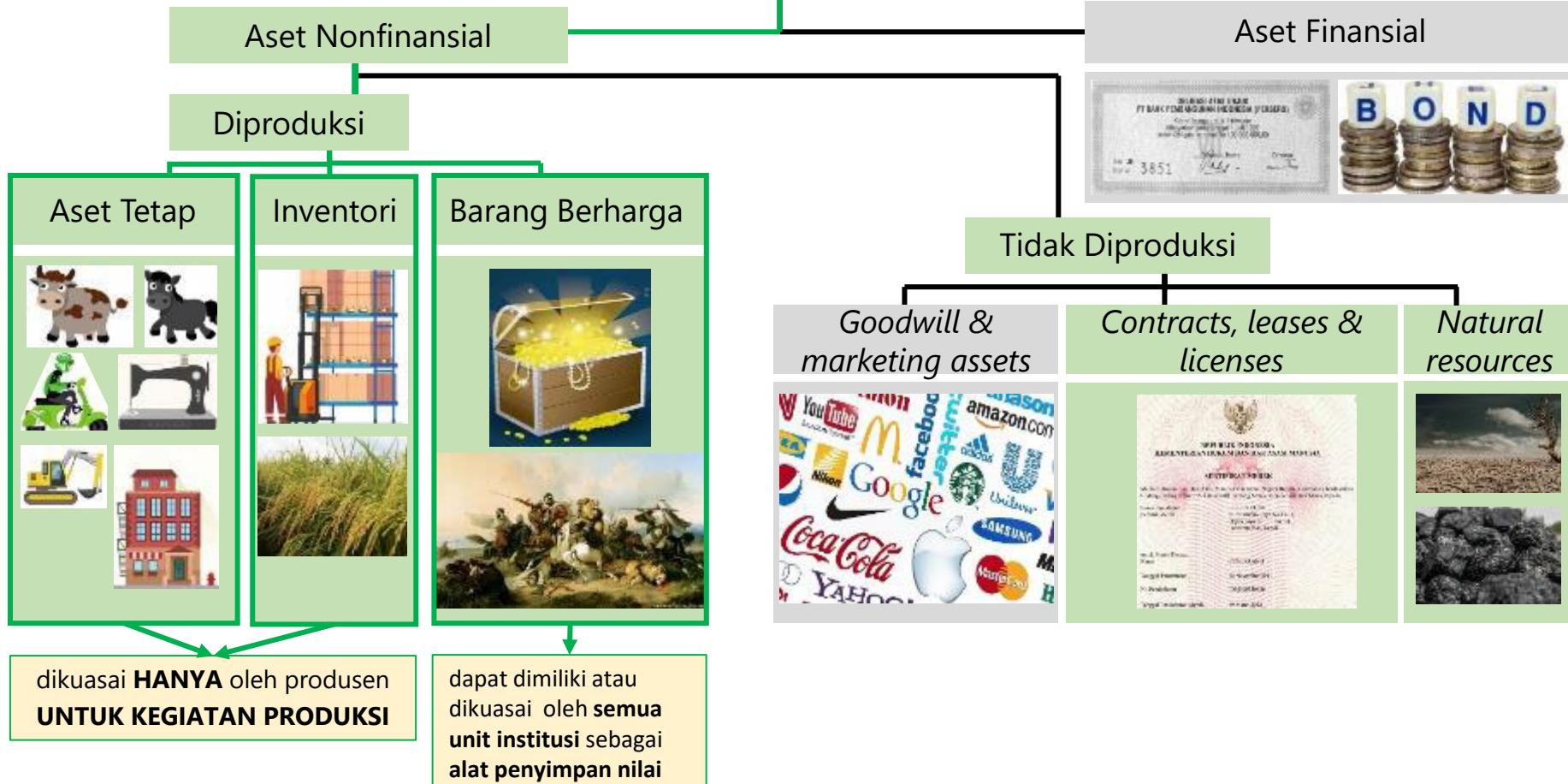
KONSEP DAN JENIS ASET TETAP



DEFINISI ASET



Aset dalam SNA



Aset merupakan alat penyimpan nilai, yang mewakili manfaat atau rangkaian manfaat yang akan diterima pemilik ekonomi dengan cara menguasai atau menggunakannya dalam periode tertentu



DEFINISI ASET TETAP



Aset tetap adalah **aset diproduksi** yang digunakan secara kontinyu atau **berulang kali dalam proses produksi** selama **lebih dari satu tahun**



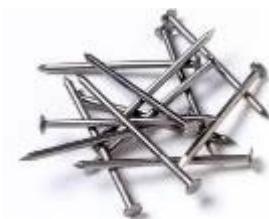
Bangunan:
Aset Tetap
(Aset Diproduksi)



Tanah:
Bukan Aset Tetap
(Aset Tidak Diproduksi)



Mesin traktor:
Aset Tetap
(Dipakai berulang kali)



Paku:
Bukan Aset Tetap
(Sekali pakai)



Digunakan rumah tangga usaha ojek:
Aset Tetap

Digunakan rumah tangga non usaha:
Bukan Aset Tetap



CAKUPAN ASET TETAP



Aset Tetap	Jenis	Bukan Aset Tetap	Jenis
Kelapa sawit yang dibudidayakan	CBR	Kelapa sawit yang tidak dibudidayakan di hutan rimba	<i>Natural Resources</i>
Biaya alih kepemilikan tanah	Biaya alih kepemilikan aset tak diproduksi	Tanah	<i>Natural Resources</i>
Lisensi <i>software</i>	IPP	Ijin pengelolaan sumber daya alam	<i>Contracts, leases & licenses</i>
Lukisan biasa	Peralatan lainnya	Lukisan antik	Barang Berharga
Renovasi tempat tinggal	Bangunan	Apartemen yang sudah dibangun, namun belum terjual	Inventori
Hak cipta buku	IPP	Citra perusahaan termasuk slogan, nama <i>brand</i> , dan merek dagang	<i>Goodwill & marketing assets</i>



JENIS ASET TETAP



8 Jenis Aset Tetap



BANGUNAN



MESIN DAN
PERLENGKAPAN



KENDARAAN



PERALATAN
LAINNYA



HEWAN MENGHASILKAN
BERULANG



TANAMAN
MENGHASILKAN
BERULANG



IPP



BIAYA ALIH
KEPEMILIKAN ASET
TAK DIPRODUKSI



1. BANGUNAN

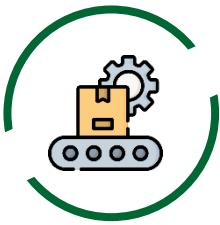


Bangunan terdiri dari bangunan tempat tinggal dan bangunan lainnya.

- Bangunan tempat tinggal adalah keseluruhan bangunan atau bagian dari bangunan yang digunakan seluruhnya atau utamanya sebagai tempat tinggal, termasuk bangunan yang terhubung dengan bangunan utama, seperti garasi dan seluruh perlengkapan permanen yang biasanya dipasang pada bangunan tempat tinggal.
- Bangunan lainnya adalah bangunan yang digunakan untuk keperluan selain tempat tinggal, seperti bangunan bukan tempat tinggal, konstruksi lainnya, dan perbaikan lahan.

KLASIFIKASI

1.1 Bangunan tempat tinggal	→ Rumah, apartemen, dll
1.2 Bangunan bukan tempat tinggal	→ Hotel, perkantoran, gedung sekolah, dll
1.3 Jalan, jembatan, dan pelabuhan	→ Jalan, tol, pelabuhan, bandara, rel, dermaga, dll
1.4 Bangunan dan instalasi listrik, gas, air minum dan komunikasi	→ Konstruksi pembangkit, instalasi air/gas, dll
1.5 Instalasi pipa gas & minyak	→ Konstruksi produksi migas, kilang, dll
1.6 Konstruksi pengaturan & pengolahan air & limbah	→ Konstruksi pengolah limbah, waduk, kanal, dll
1.7 Bangunan lainnya	→ Konstruksi untuk distribusi listrik/air/gas, perbaikan lahan, dll



2. MESIN DAN PERLENGKAPAN



Mesin dan perlengkapan adalah **alat/perkakas (nonkendaraan)** untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yang dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, dengan menggunakan listrik, bahan bakar minyak, atau tenaga alam sebagai **sumber energi** di mana alat/perkakas tersebut dimanfaatkan dalam proses produksi lebih dari satu tahun.

KLASIFIKASI

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 2.1 Mesin pembangkit dan penggerak mula | → Genset, turbin, dll |
| 2.2 Mesin Khusus | → Alat berat, mesin pertanian, dll |
| 2.3 Mesin pengolah data dan komputer | → Komputer, scanner, ATM, dll |
| 2.4 Peralatan informasi dan telekomunikasi | → Radio, TV, telepon, pemancar, dll |
| 2.5 Peralatan elektronik | → Kulkas, mesin cuci, alat musik, dll |



3. KENDARAAN

Kendaraan adalah **alat transportasi** yang digunakan untuk **memindahkan** manusia atau objek lainnya.

KLASIFIKASI

3.1 Pesawat terbang dan sejenisnya	→ Pesawat, helikopter, pesawat militer, dll
3.2 Kapal dan sejenisnya	→ Kapal, kapal ikan, kapal perang, dll
3.3 Kereta api dan sejenisnya	→ Kereta api, KRL, monorel, <i>rail bus</i> , dll
3.4 Kendaraan bermotor kecuali sepeda motor	→ Mobil, bus, truk, ambulan, dll
3.5 Kendaraan bermotor roda 2 & 3	→ Motor, bajaj, bentor, dll
3.6 Alat pengangkutan lainnya	→ Sepeda, becak, gerobak, trolley, dll



4. PERALATAN LAINNYA



Peralatan lainnya adalah **alat/perkakas (nonkendaraan)** yang **tidak membutuhkan energi** dalam penggunaannya di mana alat/perkakas tersebut dimanfaatkan dalam proses produksi lebih dari satu tahun.

KLASIFIKASI

4.1 Barang-barang dari kayu, rotan & bambu	→ Meja/kursi kayu, lemari kayu, dll
4.2 Barang dari keramik, kaca, tanah liat & batu alam	→ Guci, piring kaca, alu, tembikar, dll
4.3 Peralatan dari logam	→ Senjata, lemari besi, tanki, dll
4.4 Barang dari kain & kulit	→ Selimut, seprei, karpet, gorden, dll
4.5 Barang cetakan (buku perpustakaan & reproduksi)	→ Buku pelajaran, buku sastra, dll
4.6 Peralatan laboratorium, instrumen optik & alat ukur	→ Gelas ukur, cawan, tabung reaksi, dll
4.7 Alat musik dan perlengkapan studio tradisional dan nontradisional (tanpa listrik)	→ Gamelan, gitar, angklung, suling, dll
4.8 Alat olah raga	→ Meja biliar, raket, papan selancar, dll
4.9 Peralatan kedokteran dan kesehatan (tanpa listrik)	→ Stetoskop, tempat tidur pasien, dll
4.10 Lainnya	→ Barang dari plastik, mainan, dll



5. HEWAN MENGHASILKAN BERULANG



Hewan menghasilkan berulang adalah **hewan** yang menghasilkan **produk berulang** dengan usia manfaat hewan dalam proses produksi lebih dari satu tahun.

KLASIFIKASI

- | | |
|------------------|--|
| 5.1 Ternak besar | → Sapi perah, kuda, sapi/kerbau induk, dll |
| 5.2 Ternak kecil | → Domba wol, kambing/babi induk, anjing pelacak, dll |
| 5.3 Unggas | → Ayam petelur, itik petelur, ayam/itik induk, dll |
| 5.4 Ikan | → Lele induk, nila induk, dll |



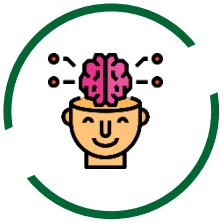
6. TANAMAN MENGHASILKAN BERULANG



Tanaman menghasilkan produk berulang adalah **tanaman** yang menghasilkan **produk berulang** dengan usia manfaat tanaman dalam proses produksi lebih dari satu tahun.

KLASIFIKASI

- | | |
|--|--|
| 6.1 Tanaman buah-buahan & hortikultura lainnya | → Anggur, apel, alpukat, belimbing, durian, dll |
| 6.2 Tanaman sayuran tahunan | → Petai, jengkol, melinjo, dll |
| 6.3 Tanaman biofarmaka | → Kayu putih, mengkudu, mahkota dewa, dll |
| 6.4 Tanaman perkebunan | → Kelapa sawit, karet, teh, kakao, kopi, lada, dll |
| 6.5 Tanaman tahunan lainnya | → Siwalan, aren, kemiri, kapuk, asam, jarak pagar, dll |



7. PRODUK KEKAYAAN INTELEKTUAL



Produk kekayaan intelektual merupakan hasil penelitian, pengembangan, investigasi atau inovasi yang mengarah pada peningkatan pengetahuan yang dapat dipasarkan atau digunakan untuk memperoleh keuntungan melalui kegiatan produksi karena penggunaannya dibatasi oleh perlindungan hukum atau proteksi lainnya.

KLASIFIKASI

- | | |
|--|---|
| 7.1 Riset dan pengembangan | → Penemuan obat, pengembangan produk, dll |
| 7.2 Eksplorasi dan evaluasi mineral | → Eksplorasi migas, eksplorasi mineral, evaluasi, dll |
| 7.3 <i>Software</i> komputer dan <i>database</i> | → <i>Pre-packaged/customized software</i> , dll |
| 7.4 Hiburan, literatur, dan karya artistik asli | → Film, lagu, novel, program TV (<i>stock</i>), dll |
| 7.5 Produk kekayaan intelektual lainnya | → IPP yang belum dicakup di atas |



8. BIAYA ALIH KEPEMILIKAN ASET TAK DIPRODUKSI

Biaya alih kepemilikan aset tak diproduksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk pemindahan kepemilikan aset-aset yang bukan merupakan hasil dari kegiatan produksi. Biaya pemindahan kepemilikan ini termasuk ke dalam kategori aset yang diproduksi, namun tidak dapat dikelompokkan dengan aset yang diproduksi lainnya.

KLASIFIKASI

- | | | |
|-----|---|--|
| 8.1 | Biaya pemindahan kepemilikan tanah | → Alih kepemilikan tanah, wilayah tambang, dll |
| 8.2 | Biaya pemindahan <i>Contract, Lease & Lisensi</i> | → Alih ijin pengelolaan SDA, transfer pemain bola, dll |



PENCATATAN ASET TETAP



1

Aset yang membutuhkan waktu penyelesaian ≤ 1 Tahun

→ saat **kepemilikan aset** dialihkan ke unit institusi lain untuk digunakan dalam *aktivitas produksi*

2

Aset yang membutuhkan waktu penyelesaian *Multiyears*



Proyek
konstruksi
dalam proses
pembangunan



Tanaman/
hewan
menghasilkan
berulang



ASET TETAP jika sudah ada pemiliknya
saat **proyek mulai dikerjakan** atau
saat **tanaman/hewan mulai ditanam**

BUKAN ASET TETAP Jika **belum terjual**
kepada pihak lain (masih dimiliki *developer*
atau pedagang tanaman/hewan)



PENILAIAN ASET TETAP



- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Perolehan aset tetap melalui pembelian | : Harga pembeli |
| <input checked="" type="checkbox"/> Perolehan aset tetap melalui barter/transfer | : Harga pembeli (perkiraan) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Perolehan aset tetap melalui produksi sendiri | : Harga dasar/biaya produksi/perkiraan harga pembeli |

- **Harga pembeli** merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh unit usaha untuk memperoleh suatu aset tetap.
- **Harga pembeli mencakup harga dasar produk ditambah:**
 - pajak (kurang subsidi) atas produk;
 - biaya transportasi dan margin perdagangan;
 - biaya jasa profesional;
 - biaya instalasi; serta
 - biaya pemindahan kepemilikan lainnya.

Contoh:

Sebuah perusahaan membeli AC untuk ruangan kantor. Harga AC sebesar Rp3.000.000, pajak pembelian AC sebesar 5% (Rp150.000), biaya pengiriman AC sebesar Rp100.000, dan biaya pemasangan AC sebesar Rp50.000.

$$\text{Nilai Aset tetap AC} = \text{Rp}3.000.000 + \text{Rp}150.000 + \text{Rp}100.000 + \text{Rp}50.000 = \text{Rp}3.300.000$$



DEFINISI PMTB

PMTB didefinisikan sebagai **penambahan dan pengurangan aset tetap** pada suatu unit produksi.

PMTB =

**Penambahan
Aset Tetap**

**Pengurangan
Aset Tetap**

PENAMBAHAN ASET TETAP

Mencakup:

1. Pembelian, barter, produksi sendiri, dan sewa beli (*financial lease*) barang modal
2. Pemberian/transfer/hibah dari pihak lain
3. Perbaikan besar aset tetap guna meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai

PENGURANGAN ASET TETAP

Mencakup:

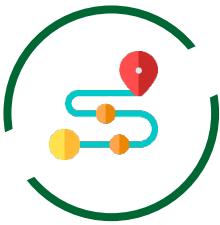
1. Penjualan dan barter barang modal
2. Pemberian/transfer/hibah ke pihak lain

Tidak termasuk kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam

2



JADWAL KEGIATAN



JADWAL KEGIATAN



A. Persiapan dan Perencanaan

Penyusunan metodologi, pedoman, dan daftar isian Januari - April 2022

Penggandaan pedoman dan daftar isian Januari - April 2022

Pelatihan instruktur pelatihan petugas pencacahan Mei - Juni 2022

Pelatihan petugas pencacahan di daerah Mei - Juni 2022

B. Pelaksanaan

Updating daftar sampel dinas April 2022

Pencacahan Juni - Agustus 2022

Pemeriksaan Juni - Agustus 2022

Pengentrian data kuesioner hasil pencacahan September 2022

C. Pengolahan

Penyusunan program pengolahan April - Juli 2022

Analisis tabulasi hasil entri Oktober 2022

Analisis data hasil pengolahan Oktober 2022

Penulisan laporan hasil November - Desember 2022



3



METODOLOGI SURVEI



CAKUPAN, KERANGKA SAMPEL, DAN DESAIN SAMPLING



Cakupan

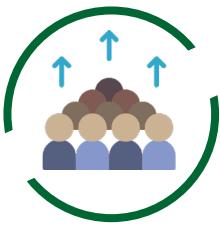
Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2022 (DINAS) dilaksanakan di 34 provinsi dan 506 kabupaten/kota.

Kerangka Sampel

Kerangka sampel berasal dari daftar Dinas/OPD/Kementerian/Lembaga di tingkat provinsi/kabupaten/kota.

Kerangka Sampel

Desain samplingnya adalah memilih sejumlah Dinas/OPD/Kementerian/Lembaga secara ***certainty selection***.



JUMLAH SAMPEL



PROVINSI	MI-01	MI-02	MI-03	MI-04	MI-05A	MI-06A	MI-06B	MI-07B	MI-09	MI-10	TOTAL
[11] ACEH	23	24	24	-	24	13	18	24	23	-	173
[12] SUMATERA UTARA	29	30	32	1	17	5	11	34	26	6	191
[13] SUMATERA BARAT	20	20	20	1	1	5	6	20	19	-	112
[14] RIAU	6	13	1	-	12	4	5	13	11	12	77
[15] JAMBI	12	12	12	1	3	2	2	12	11	11	78
[16] SUMATERA SELATAN	18	18	18	-	18	-	-	18	12	-	102
[17] BENGKULU	11	11	11	-	4	-	8	11	5	5	66
[18] LAMPUNG	15	16	16	1	13	-	-	16	3	15	95
[19] KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	7	8	8	1	4	-	10	8	7	-	53
[21] KEPULAUAN RIAU	5	4	6	-	7	3	5	8	7	1	46
[31] DKI JAKARTA	-	6	6	-	1	3	3	1	48	7	75
[32] JAWA BARAT	21	28	28	1	31	3	3	28	27	-	170
[33] JAWA TENGAH	32	35	33	1	7	6	14	36	33	10	207
[34] DI YOGYAKARTA	6	6	5	-	2	2	4	6	4	2	37
[35] JAWA TIMUR	36	39	39	-	38	7	18	39	34	1	251
[36] BANTEN	7	9	9	-	9	2	4	9	8	1	58
[51] BALI	9	9	9	-	10	-	4	10	9	3	63
[52] NUSA TENGGARA BARAT	11	9	11	1	11	2	7	11	3	8	74
[53] NUSA TENGGARA TIMUR	21	21	23	1	1	-	23	23	19	22	154
[61] KALIMANTAN BARAT	14	15	15	1	13	10	6	15	14	2	105
[62] KALIMANTAN TENGAH	15	15	25	-	15	14	6	15	14	14	133
[63] KALIMANTAN SELATAN	13	14	13	-	14	6	5	14	75	-	154
[64] KALIMANTAN TIMUR	11	11	11	-	2	4	7	11	6	-	63
[65] KALIMANTAN UTARA	6	5	6	1	3	2	2	6	3	-	34
[71] SULAWESI UTARA	15	15	15	1	15	7	11	15	15	2	111
[72] SULAWESI TENGAH	14	14	14	1	14	13	14	14	13	-	111
[73] SULAWESI SELATAN	25	25	25	1	25	-	20	25	24	22	192
[74] SULAWESI TENGGARA	18	18	18	-	4	8	12	18	14	-	110
[75] GORONTALO	6	7	7	1	6	-	6	7	6	2	48
[76] SULAWESI BARAT	7	7	6	1	4	3	3	7	6	6	50
[81] MALUKU	11	4	12	1	8	1	12	12	11	1	73
[82] MALUKU UTARA	11	11	11	1	11	-	11	11	1	8	76
[91] PAPUA BARAT	13	11	13	-	10	9	11	14	10	1	92
[94] PAPUA	22	22	22	3	17	13	6	30	13	3	151
TOTAL	490	512	524	21	374	147	277	541	534	165	3.585

**Jumlah dan alokasi sampel
menurut kabupaten/kota dapat
diakses pada link**
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xw2AIKPvrbWjigDmzgR1aYDJeHHOmzqD/edit?usp=sharing&ouid=102603796377702721755&rtpof=true&sd=true>



DAFTAR SAMPEL DINAS (PMTB22-DSDINAS)

Daftar Sampel Dinas adalah daftar yang memuat nama dan keterangan sampel Dinas.

SURVEI PENYUSUNAN DISAGREGASI PMTB 2022
DAFTAR SAMPEL DINAS

PMTB22-DSDINAS

Isikan kode dan nama provinsi

PROVINSI : ()

KABUPATEN/KOTA : ()

No	Nomor Urut Instansi/Dinas	Kode Dinas	Nama Dinas	Alokasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Isikan nomor urut sampel mulai dari 1, sesuai dengan banyaknya dinas yang menjadi sampel

Isikan kode dan nama kabupaten/kota. Untuk sampel instansi/dinas tingkat provinsi, isikan 00 pada kode kabupaten/kota.

**Isikan nomor urut Instansi/Dinas yang terpilih sebagai sampel.
Nomor urut Instansi/Dinas ini harus panel (nomornya sama) jika ada sampel tahun lalu. Namun, jika alokasi sampel suatu kuesioner baru ada tahun ini, nomor urut dimulai dari 001.**



DAFTAR SAMPEL DINAS (PMTB22-DSDINAS)



Mekanisme Pengisian Kolom (2) Nomor Urut Instansi/Dinas:

1. Pada setiap jenis kuesioner Dinas (MI) yang berbeda, Nomor Urut Instansi/Dinas selalu dimulai dari 001
2. Jika Instansi/Dinas yang menjadi sampel tahun 2022 merupakan sampel tahun 2021 maka nomor urut Instansi/Dinas dibuat sama dengan tahun 2021 (panel)
3. Jika Instansi/Dinas yang menjadi sampel tahun 2022 merupakan sampel baru, maka nomor urut dimulai dari 001
4. Contoh pengisian

Pada tahun survei 2021, Kuesioner **MI-03 HEWAN** di Kabupaten A memiliki 1 responden yaitu Dinas Peternakan (diberi Nomor Urut Instansi/Dinas 001), sedangkan pada tahun survei 2022, kuesioner ini memiliki 2 responden yaitu Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan, maka Nomor Urut Instansi/Dinas adalah:

- a. Dinas Peternakan = 001 (panel tahun sebelumnya)
- b. Dinas Perikanan = 002



DAFTAR SAMPEL DINAS (PMTB22-DSDINAS)

Isikan **kode Instansi/Dinas** sesuai jenis kuesioner yang dicacah

- 1 : Perkebunan MI-01
- 2 : Hortikultura MI-02
- 3 : Hewan MI-03
- 4 : Eksplorasi MI-04
- 5 : Kendaraan (SAMSAT) MI-05A
- 6 : Kapal (Perhubungan) MI-06A
- 7 : Kapal (Kelautan) MI-06B
- 9 : APBD MI-07B
- 11 : IMB MI-09
- 12 : PBB MI-10

Isikan **nama dan alamat lengkap** Instansi/Dinas yang menjadi sampel

PMTB22-DSDINAS

SURVEI PENYUSUNAN DISAGREGASI PMTB 2022 DAFTAR SAMPEL DINAS

OTU : ()

OTA : ()

Instansi Dinas	Kode Dinas	Nama Dinas	Alamat	Hasil Pencacahan
	(3)	(4)	(5)	(6)

Isikan **kode kondisi hasil pencacahan** Instansi/Dinas, yaitu:

- 1 : berhasil dicacah
- 2 : tidak berhasil dicacah



DAFTAR SAMPEL DINAS (PMTB22-DSDINAS)



PMTB22-DSDINAS

SURVEI PENYUSUNAN DISAGREGASI PMTB 2022 DAFTAR SAMPEL DINAS

PROVINSI : [33] JAWA TENGAH

KABUPATEN/KOTA : [13] KARANGANYAR

NO	NOMOR URUT INSTANSI/ DINAS	KODE DINAS	NAMA DINAS	ALAMAT	HASIL PENCACAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	001	1	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	JL. KH. SAMANHUDI NO.2 CANGAKAN	
2	001	2	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	JL. KH. SAMANHUDI NO.2 CANGAKAN	
3	001	3	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	JL KH SAMANHUDI KOMPLEK PERKANTORAN CANGAKAN	
4	001	9	BADAN KEUANGAN DAERAH	JL. KH. WACHID HASIM NO 2	
5	001	11	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	JL LAWU KARANGANYAR	
6	001	12	BADAN KEUANGAN DAERAH	JL. KH. WACHID HASYIM NO 2	

The background of the slide is a high-angle aerial photograph of a lush, green landscape. It features numerous terraced fields, likely rice paddies, which are organized into a grid-like pattern across a hillside. Interspersed among the fields are several large, healthy palm trees with distinct yellow-green fronds. A few small buildings or houses are visible, nestled among the vegetation. The overall scene conveys a sense of agricultural productivity and natural beauty.

4

PEDOMAN
PENGISIAN
KUESIONER

4.1

PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER (PMTB22-PERKEBUNAN MI-01)





STRUKTUR KUESIONER

BLOK I

KETERANGAN UMUM

BLOK II

KETERANGAN TANAMAN PERKEBUNAN MENGHASILKAN BERULANG BELUM PRODUKTIF

BLOK III

CATATAN

BLOK IV

KETERANGAN PEMBERI INFORMASI

BLOK V

KETERANGAN PETUGAS



BLOK I. KETERANGAN UMUM

Isikan **nama dan kode provinsi & kabupaten/kota**. Untuk instansi tingkat provinsi, isikan 00 pada kode kabupaten/kota.

BLOK
I

BLOK
II

BLOK
III

BLOK
IV

BLOK
V

Isikan **nomor urut instansi** 3 digit sesuai dengan **daftar PMTB22-DSDINAS**. Nomor urut instansi ini harus panel (nomornya sama) jika ada sampel tahun lalu. Namun, jika merupakan sampel baru maka nomor urut instansi dimulai dari 001.

BLOK I. KETERANGAN UMUM

1. Provinsi	1. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
2. Kabupaten/Kota*)	2. Dinas Perkebunan dan Kehutanan
3. Nomor Urut Instansi	3. Dinas Pertanian Tanaman Pangan
4. Nama Instansi	4. Dinas Pertanian dan Peternakan
5. Alamat Instansi	5. Dinas Pertanian dan Perkebunan
	6. Dinas Pertanian
	7. Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan
	8. Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan
	9. Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perkebunan
	10. Dinas Pertanian Tanaman Pangan/Bidang Perkebunan

*) Coret yang tidak sesuai

Isikan **alamat instansi** beserta **nomor telepon** dengan lengkap dan jelas.

Jika terdapat **data instansi/dinas yang panel dari data tahun lalu**, maka silakan menuliskan terlebih dahulu data tahun sebelumnya dengan menggunakan pensil, jika terdapat pembaharuan data instansi/dinas maka yang dipakai adalah data terakhir yang paling **update**.



BLOK I. KETERANGAN UMUM

BLOK
I

BLOK
II

BLOK
III

BLOK
IV

BLOK
V

BLOK I. KETERANGAN UMUM	
1. Provinsi	<input type="text"/>
2. Kabupaten/Kota*)	<input type="text"/>
3. Nomor Urut Instansi	<input type="text"/>
4. Nama Instansi	<input type="text"/>
5. Alamat Instansi	<input type="text"/>

*) Coret yang tidak sesuai

**Sesuai dengan Daftar
PMTB22-DSDINAS**

**Nama dan alamat instansi
dapat diperbaharui
sesuai dengan keadaan pada
saat pencacahan**



BLOK II. KETERANGAN TANAMAN PERKEBUNAN MENGHASILKAN BERULANG BELUM PRODUKTIF

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK IIA. KETERANGAN TANAMAN PERKEBUNAN MENGHASILKAN BERULANG BELUM PRODUKTIF SELAMA TAHUN 2021

Jenis Tanaman (1)	Kode PMTB	Luas Tanaman Belum Menghasilkan (Ha)		Biaya Perawatan per Ha/Tahun (Ribu Rupiah)	
		Usia ≤ 1 Tahun (2)	Usia > 1 Tahun (3)	Usia ≤ 1 Tahun (4)	Usia > 1 Tahun (5)
Jenis tanaman perkebunan yang tercantum pada kuesioner adalah tanaman produk unggulan. Jika terdapat jenis tanaman perkebunan menghasilkan berulang lainnya, isikan pada baris kosong di bawah baris terakhir rincian tanaman. Contoh: murbei, soga, mimba/nimba, kemiri sunan, klerek				Tanaman yang pada umumnya berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali dan tidak dibongkar sekali panen.	



BLOK II. KETERANGAN TANAMAN PERKEBUNAN MENGHASILKAN BERULANG BELUM PRODUKTIF

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK IIA. KETERANGAN TANAMAN PERKEBUNAN MENGHASILKAN BERULANG BELUM PRODUKTIF SELAMA TAHUN 2021

Jenis Tanaman (1)	Kode PMTB (2)	Luas Tanaman Belum Menghasilkan (Ha)		Biaya Perawatan per Ha/Tahun (Ribu Rupiah)	
		Usia ≤ 1 Tahun (3)	Usia > 1 Tahun (4)	Usia ≤ 1 Tahun (5)	Usia > 1 Tahun (6)
1. Karet	6410				
2. Kelapa	6420				
3. Kelapa Sawit	6430				
4. Kopi	6440				
5. Teh	6450				

Kode PMTB adalah 4 digit kode unik jenis barang yang menjadi PMTB. Kuesioner MI-01 terdapat rule validasi dimana kode PMTB untuk tanaman perkebunan harus diantara kode pada tabel Master Kode PMTB



BLOK II. KETERANGAN TANAMAN PERKEBUNAN MENGHASILKAN BERULANG BELUM PRODUKTIF

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK IIA. KETERANGAN TANAMAN PERKEBUNAN MENGHASILKAN BERULANG BELUM PRODUKTIF SELAMA TAHUN 2021

Jenis Tanaman (1)	Kode PMTB (2)	Luas Tanaman Belum Menghasilkan (Ha)		Biaya Perawatan per Ha/Tahun (Ribu Rupiah)	
		Usia ≤ 1 Tahun (3)	Usia > 1 Tahun (4)	Usia ≤ 1 Tahun (5)	Usia > 1 Tahun
1. Karet	6410				
2. Kelapa	6410	Luas lahan tanaman perkebunan yang belum memberikan hasil karena tanaman tersebut masih muda (belum pernah berbunga/belum cukup umur untuk berproduksi)			
3. Kelapa Sawit	6410				
4. Kopi	6410	Jika tanaman tidak dapat dibedakan usianya, maka luas tanaman dicatat di kolom 3 (Usia > 1 tahun).			
5. Teh	6410				



BLOK II. KETERANGAN TANAMAN PERKEBUNAN MENGHASILKAN BERULANG BELUM PRODUKTIF

Biaya dalam

RIBU RUPIAH

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK II. KETERANGAN TANAMAN PERKEBUNAN MENGHASILKAN BERULANG BELUM PRODUKTIF SELAMA TAHUN 2021

Jenis Tanaman	Kode PMTB	Luas Tanaman Belum Menghasilkan (Ha)		Biaya Perawatan per Ha/Tahun (Ribu Rupiah)	
		Usia ≤ 1 Tahun	Usia > 1 Tahun	Usia ≤ 1 Tahun	Usia > 1 Tahun
1. Karet		Jika data biaya perawatan tidak tersedia di Instansi/Dinas, dibutuhkan informasi dari sumber lain (perusahaan, petani, hasil sensus/survei, dll.)		(4)	(5)
2. Kelapa	0.100				
3. Kelapa S		Jika tanaman tidak dapat dibedakan usianya, maka biaya perawatan tanaman dicatat di kolom 5 (Usia > 1 tahun).			
4. Kopi		Penting!			
5. Teh		Validasi biaya perawatan TBM Usia ≤ 1 Tahun HARUS LEBIH BESAR ATAU SAMA DENGAN biaya perawatan TBM Usia > 1 Tahun			



BLOK II. KETERANGAN TANAMAN PERKEBUNAN MENGHASILKAN BERULANG BELUM PRODUKTIF

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

Pada Blok II kolom (2) s.d. (5), jika salah satu kolom terisi (> 0) maka kolom lainnya pada satu jenis tanaman harus terisi (≥ 0)

Diisi sesuai kode PMTB pada **Tabel Master Kode PMTB**

Isian Blok II kol (4) $\geq (5)$

BLOK IIA. KETERANGAN TANAMAN PERKEBUNAN MENGHASILKAN BERULANG BELUM PRODUKTIF SELAMA TAHUN 2021		Luas Tanaman Belum Menghasilkan (Ha)		Biaya Perawatan per Ha/Tahun (Ribu Rupiah)	
Jenis Tanaman (1)	Kode PMTB (2)	Usia ≤ 1 Tahun (3)	Usia > 1 Tahun (4)	Usia ≤ 1 Tahun (5)	Usia > 1 Tahun (6)
1. Karet	6410				
2. Kelapa	6420				
3. Kelapa Sawit	6430				

Isian Blok II kol (2) dan (4) ≥ 0

- Jika Blok II kol (2) > 0 maka Blok II kol (4) > 0
- Jika Blok II kol (2) = 0 maka Blok II kol (4) = 0

Isian Blok II kol (3) dan (5) ≥ 0

- Jika Blok II kol (3) > 0 maka Blok II kol (5) > 0
- Jika Blok II kol (3) = 0 maka Blok II kol (5) = 0



BLOK III. CATATAN



BLOK III. CATATAN

Harap ditulis jika ada hal-hal khusus berkaitan dengan data instansi

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan-keterangan penting yang diperlukan, **terutama cakupan data yang dimiliki oleh instansi/dinas.**



BLOK IV. KETERANGAN PEMBERI INFORMASI

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK IV. KETERANGAN PEMBERI INFORMASI				
1. Nama Pemberi Informasi			4. Tanda Tangan dan Cap Instansi	
2. Jabatan				
3. Nomor Telepon/HP				
Harus Terisi				

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan pemberi informasi. Tuliskan nama, jabatan, nomor telepon/HP, dan tanda tangan pemberi informasi serta cap instansi



BLOK V. KETERANGAN PETUGAS

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK V. KETERANGAN PETUGAS			
1. Nama Pencacah		1. Nama Pengawas	
2. Tanggal Pencacahan		2. Tanggal Pengawasan	
3. Tanda Tangan		3. Tanda Tangan	

Isikan **tanggal** pada saat melakukan **pencacahan** dan **pengawasan** dengan format **DD-MM-YYYY**

Tuliskan nama pencacah, tanggal pencacahan, dan tanda tangan pencacah. Selanjutnya kuesioner diserahkan pada pengawas untuk diperiksa kelengkapan dan konsistensi isiannya. Tuliskan nama pengawas, tanggal pengawasan, dan tanda tangan pengawas untuk memastikan bahwa semua isian sudah benar.

Rule Validasi

- Semua rincian harus terisi
- Nama pencacah dan pengawas tidak boleh sama
- Tanggal pencacahan \leq tanggal pengawasan
- Tanggal pencacahan dan tanggal pengawasan tidak melebihi bulan Agustus 2022



PENEGASAN PMTB22-PERKEBUNAN



1. Luas **tanaman belum menghasilkan (TBM)** komoditas perkebunan yang merupakan komoditas unggulan nasional seharusnya tersedia di Dinas Kabupaten/Kota karena setiap tahun data tersebut direkonsili oleh Dinas Kabupaten/Kota dengan Dinas Provinsi
2. Saat pencacahan, jika Dinas Kabupaten/Kota tidak memiliki data luas TBM maka dapat dilakukan pendekatan sebagai berikut:
 - a. Untuk komoditas unggulan nasional dapat menggunakan data dari publikasi Dirjen Perkebunan
 - b. Untuk komoditas non unggulan nasional dapat menggunakan:
 - Rasio hasil survei/sensus
 - Rasio wilayah lain (provinsi/kabupaten/kota) yang memiliki kemiripan karakteristik



EVALUASI ISIAN BLOK II



- Evaluasi dilakukan untuk menjaga konsistensi nilai PMTB CBR Tanaman Perkebunan Level Provinsi dengan Level Kabupaten/Kota yang ada di provinsi tersebut, baik secara total maupun menurut jenis tanaman
- Formula penghitungan PMTB CBR Tanaman Perkebunan:

$$PMTB\ CBRk_{i,t} = (LTBMkl_{i,t} \times BPTBMkl_{i,t}) + (LTBMku_{i,t} \times BPTBMku_{i,t})$$

$$PMTB\ CBRk_{prov,i,t} = \sum_{n=1}^s PMTB\ CBRk_{kabkot\ n,i,t}$$

Dimana:

- $PMTB\ CBRk_{i,t}$ = Nilai PMTB CBR tanaman perkebunan ke-i pada tahun ke-t (ribu rupiah)
- $LTBMkl_{i,t}$ = Luas tanaman perkebunan belum menghasilkan ke-i pada tahun ke-t usia ≤ 1 tahun (ha)
- $BPTBMkl_{i,t}$ = Rata-rata biaya perawatan tanaman perkebunan belum menghasilkan ke-i pada tahun ke-t usia ≤ 1 tahun (ribu rupiah/ha)
- $LTBMku_{i,t}$ = Luas tanaman perkebunan belum menghasilkan ke-i pada tahun ke-t usia > 1 tahun (ha)
- $BPTBMku_{i,t}$ = Rata-rata biaya perawatan tanaman perkebunan belum menghasilkan ke-i pada tahun ke-t usia > 1 tahun (ribu rupiah/ha)
- $PMTB\ CBRk_{prov,i,t}$ = Nilai PMTB CBR tanaman perkebunan provinsi, jenis tanaman ke-i pada tahun ke-t (ribu rupiah)
- $PMTB\ CBRk_{kabkot\ n,i,t}$ = Nilai PMTB CBR tanaman perkebunan di kabupaten/kota ke-n, jenis tanaman ke-i pada tahun ke-t (ribu rupiah)



EVALUASI ISIAN BLOK II

Evaluasi

- Selisih antara Luas TBM hasil survei dengan Ditjen Perkebunan hanya diperbolehkan maksimal $\pm 10\%$

Data Luas Tanaman Perkebunan Belum Menghasilkan Tahun 2020 Prov. X (Ha)
(Sampel 1 Dinas Provinsi, 88% Dinas Kab/Kot)

Jenis Tanaman	Data Survei Penyusunan Disagregasi PMTB						Range Toleransi		
	Usia ≤ 1 Tahun		Usia > 1 Tahun		Usia ≤ 1 Tahun + Usia > 1 Tahun		Data Ditjen Perkebunan	90% Data Ditjen Perkebunan	110% Data Ditjen Perkebunan
	Prov	Kab/Kot	Prov	Kab/Kot	Prov	Kab/Kot		90% Data Ditjen Perkebunan	110% Data Ditjen Perkebunan
Cengkeh	339	2.344	11.729	10.578	12.068	12.922	14.231	12.808	15.654
Jambu Mete	59	387	2.182	3.584	2.241	3.971	2.251	2.026	2.476
Kakao	77	284	1.868	1.587	1.945	1.871	2.037	1.833	2.241
Karet	17	1.966	5.334	3.467	5.351	5.433	3.145	2.831	3.460
Kelapa	696	8.878	44.615	32.383	45.311	41.260	45.807	41.226	50.388
Kopi	1.066	1.365	8.735	6.445	9.801	7.811	9.945	8.951	10.940
Lada	40	89	738	704	779	793	781	703	859
Pala	173	1.261	1.692	639	1.865	1.900	1.842	1.658	2.026
Teh	24	11	154	710	178	721	292	263	321



EVALUASI ISIAN BLOK II

Kondisi/status data TBM perkebunan ada tiga, yaitu angka tetap (tahun n), angka sementara (tahun n + 1), angka estimasi (tahun n + 2) sehingga perlu dibuat kesepatan antara **BPS Provinsi dengan Semua BPS Kabupaten/Kota di provinsi tersebut** terkait kondisi data yang akan dicatat pada kuesioner supaya **diskrepansi = 0**

Evaluasi

- Jika provinsi dan **semua kab/kota** menjadi sampel maka total luas tanaman perkebunan belum menghasilkan (TBM) provinsi **harus sama dengan** total luas TBM kabupaten/kota di provinsi tersebut
- Jika provinsi dan **sebagian kab/kota** menjadi sampel maka total luas tanaman perkebunan belum menghasilkan (TBM) provinsi **harus lebih besar atau sama dengan** total luas TBM kabupaten/kota yang menjadi sampel di provinsi tersebut

Data Luas Tanaman Perkebunan Belum Menghasilkan Tahun 2020 Prov. X (Ha)
(Sampel 1 Dinas Provinsi, 88% Dinas Kab/Kot)

Jenis Tanaman	Usia ≤ 1 Tahun		Usia > 1 Tahun		Usia ≤ 1 Tahun + Usia >1 Tahun	
	Prov	Kab/Kot	Prov	Kab/Kot	Prov	Kab/Kot
Cengkeh	339	2.344	11.729	10.578	12.068	12.922
Jambu Mete	59	387	2.182	3.584	2.241	3.971
Kakao	77	284	1.868	1.587	1.945	1.871
Karet	17	1.966	5.334	3.467	5.351	5.433
Kelapa	696	8.878	44.615	32.383	45.311	41.260
Kopi	1.066	1.365	8.735	6.445	9.801	7.811
Lada	40	89	738	704	779	793
Pala	173	1.261	1.692	639	1.865	1.900
Teh	24	11	154	710	178	721



EVALUASI ISIAN BLOK II

- Luas TBM **yang ekstrim** sangat memengaruhi nilai PMTB CBR Tanaman Perkebunan

Langkah-langkah evaluasi:

- BPS Provinsi melakukan tabulasi raw data, hasil entri kuesioner Perkebunan MI-01 baik untuk level provinsi maupun kab/kot
- BPS Provinsi melakukan rekonsiliasi dengan BPS Kab/Kot untuk isian data yang belum sama antara prov dan kab/kot termasuk untuk isian yang ekstrim
- Jika tidak dicapai kesepakatan rekonsiliasi, BPS Prov/Kab/Kot melakukan
 - pengecekan kembali isian kuesioner dengan hasil entri
 - kunjungan kembali ke responden (instansi/dinas) **untuk mengonfirmasi isian kuesioner dan kondisi status data** (angka tetap/angka sementara/angka estimasi)
- Berdasarkan hasil konfirmasi BPS Provinsi dan BPS Kab/Kot membuat kesepakatan mengenai angka mana yang akan digunakan
- Lakukan perbaikan hasil entri pada program aplikasi entri **sebelum deadline entri tanggal 30 September 2022**

Contoh Data Luas Tanaman Perkebunan Belum Menghasilkan Tahun 2020 **yang Ekstrim** (Ha)

Jenis Tanaman	Wilayah	Kab/Kot			Total Provinsi
		Usia ≤ 1 Tahun	Usia > 1 Tahun	Usia ≤ 1 Tahun + Usia > 1 Tahun	
Kopi	Kab. PWK	401.000	445	401.445	17.539
	Kab. RJ LB	132.872	2.657	135.529	8.246
	Kab. SMLG	1.124	1.765.503	1.766.627	18.856
Cengkeh	Kab. BLMG TM	2.798	212.200	214.998	21.604
	Kab. LBK UTR	100	100.782	100.882	1.372
Kelapa	Kab. INHR	0	302.370	302.370	22.199

Nasional : 185.740 Ha



EVALUASI ISIAN BLOK II



- Biaya perawatan **yang ekstrim** sangat memengaruhi nilai PMTB CBR Tanaman Perkebunan

Langkah-langkah evaluasi:

1. BPS Provinsi melakukan tabulasi raw data, hasil entri kuesioner Perkebunan MI-01 baik untuk level provinsi maupun kab/kot
2. BPS Provinsi melakukan rekonsiliasi dengan BPS Kab/Kot untuk isian data yang belum sama antara prov dan kab/kot termasuk untuk isian yang ekstrim
3. Jika tidak dicapai kesepakatan rekonsiliasi, BPS Prov/Kab/Kot melakukan
 - a. pengecekan kembali isian kuesioner dengan hasil entri
 - b. kunjungan kembali ke responden **untuk mengonfirmasi isian biaya perawatan**
4. Berdasarkan hasil konfirmasi BPS Provinsi dan BPS Kab/Kot membuat kesepakatan mengenai angka mana yang akan digunakan
5. Lakukan perbaikan hasil entri pada program aplikasi entri **sebelum deadline entri tanggal 30 September 2022**

Contoh Data Biaya Perawatan Tanaman Perkebunan Belum Menghasilkan Tahun 2020 **yang Ekstrim** (Ribu Rupiah/Ha)

Jenis Tanaman	Wilayah	Usia ≤ 1 Tahun	Usia > 1 Tahun
Kelapa Sawit	Prov. X	1	1
	Kab. DGL	23.300.584	7.232.502
Cengkeh	Kab. SKB	182.808.000	121.872.000
	Kab. DGL	805.381.884	16.172.043
Jambu Mete	Kab. JPR	4	2
Kakao	Kab. YHK	2	2



BIAYA PERAWATAN TERTIMBANG



Biaya perawatan level provinsi dapat menggunakan rata-rata tertimbang dari biaya perawatan level kabupaten/kota

Formula Rata-rata Biaya Perawatan Tertimbang untuk $TBM \leq 1$ Tahun

$$BPTBMkl_{prov,i,t} = \frac{\sum_{n=1}^s (PMTB CBRkl_{n,i,t})}{\sum_{n=1}^s LTBMkl_{n,i,t}} = \frac{\sum_{n=1}^s (LTBMkl_{n,i,t} \times BPTBMkl_{n,i,t})}{\sum_{n=1}^s LTBMkl_{n,i,t}}$$

Dimana:

- $BPTBMkl_{prov,i,t}$ = Rata-rata biaya perawatan tanaman perkebunan belum menghasilkan ke-i pada tahun ke-t usia ≤ 1 tahun di provinsi (ribu rupiah/ha)
- $PMTB CBRkl_{n,i,t}$ = Nilai PMTB CBR tanaman perkebunan di kabupaten/kota ke-n, jenis tanaman ke-i pada tahun ke-t usia ≤ 1 tahun (ribu rupiah)
- $LTBMkl_{n,i,t}$ = Luas tanaman perkebunan belum menghasilkan di kabupaten/kota ke-n, jenis tanaman ke-i pada tahun ke-t usia ≤ 1 tahun (ha)
- $BPTBMkl_{n,i,t}$ = Rata-rata biaya perawatan tanaman perkebunan belum menghasilkan di kabupaten/kota ke-n, jenis tanaman ke-i pada tahun ke-t usia ≤ 1 tahun (ribu rupiah/ha)

4.2

PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER (PMTB22-HORTIKULTURA MI-02)



[This Photo](#) by Unknown Author is licensed under [CC BY-SA](#)

[This Photo](#) by Unknown Author is licensed under [CC BY-SA](#)



STRUKTUR KUESIONER

BLOK I

KETERANGAN UMUM

BLOK II

KETERANGAN TANAMAN HORTIKULTURA MENGHASILKAN BERULANG
BELUM PRODUKTIF

BLOK III

CATATAN

BLOK IV

KETERANGAN PEMBERI INFORMASI

BLOK V

KETERANGAN PETUGAS



BLOK I. KETERANGAN UMUM

Isikan **nama dan kode provinsi & kabupaten/kota**. Untuk instansi tingkat provinsi, isikan 00 pada kode kabupaten/kota.

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

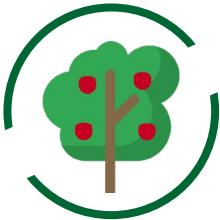
Isikan **nomor urut instansi** 3 digit sesuai dengan **daftar PMTB22-DSDINAS**. Nomor urut instansi ini harus panel (nomornya sama) jika ada sampel tahun lalu. Namun, jika merupakan sampel baru maka nomor urut instansi dimulai dari 001.

BLOK I. KETERANGAN UMUM	
1. Provinsi	1. Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
2. Kabupaten/Kota*)	2. Dinas Pertanian
3. Nomor Urut Instansi	3. Distannak
4. Nama Instansi	4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
5. Alamat Instansi	5. Dinas Pertanian Tanaman Pangan
	6. Dinas Pertanian dan Peternakan
	7. Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan
	8. Dinas Perkebunan dan Pertanian
	9. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian
	10. Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perkebunan

*) Coret yang tidak sesuai

Isikan **alamat instansi beserta nomor telepon** dengan lengkap dan jelas.

Jika terdapat **data instansi/dinas yang panel dari data tahun lalu**, maka silakan menuliskan terlebih dahulu data tahun sebelumnya dengan menggunakan pensil, jika terdapat pembaharuan data instansi/dinas maka yang dipakai adalah data terakhir yang paling **update**.



BLOK I. KETERANGAN UMUM

BLOK I BLOK II BLOK III BLOK IV BLOK V

BLOK I. KETERANGAN UMUM	
1. Provinsi	<input type="text"/>
2. Kabupaten/Kota*)	<input type="text"/>
3. Nomor Urut Instansi	<input type="text"/>
4. Nama Instansi	<input type="text"/>
5. Alamat Instansi	<input type="text"/>

*) Coret yang tidak sesuai

**Sesuai dengan Daftar
PMTB22-DSDINAS**

**Nama dan alamat instansi
dapat diperbarui
sesuai dengan keadaan pada
saat pencacahan**



BLOK II. KETERANGAN TANAMAN HORTIKULTURA MENGHASILKAN BERULANG BELUM PRODUKTIF

BLOK I

BLOK II

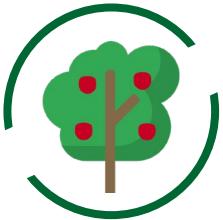
BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK IIA. KETERANGAN TANAMAN HORTIKULTURA MENGHASILKAN BERULANG BELUM PRODUKTIF SELAMA TAHUN 2021

Jenis Tanaman (1)	Kode PMTB (2)	Satuan (3)	Jumlah Tanaman Belum Menghasilkan		Biaya Perawatan per Satuan/Tahun (Ribu Rupiah)	
			Usia ≤ 1 Tahun (4)	Usia > 1 Tahun (5)	Usia ≤ 1 Tahun (6)	Usia > 1 Tahun
Jika terdapat tanaman hortikultura menghasilkan berulang yang belum tercantum , tambahkan pada baris kosong di bawah baris terakhir rincian tanaman.					Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman sayuran , tanaman buah-buahan , tanaman obat , dan tanaman hias yang pada umumnya berumur lebih dari 1 tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali dan tidak dibongkar sekali panen .	
Contoh: kluwih, buah naga, srikaya, markisa, matoa, nangka, pepaya, rambutan, sawo, sirsak, sukun						



BLOK II. KETERANGAN TANAMAN HORTIKULTURA MENGHASILKAN BERULANG BELUM PRODUKTIF

BLOK I

BLOK II

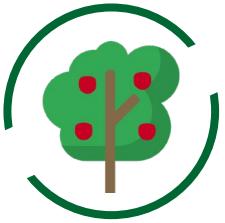
BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK IIA. KETERANGAN TANAMAN HORTIKULTURA MENGHASILKAN BERULANG BELUM PRODUKTIF SELAMA TAHUN 2021

Jenis Tanaman (1)	Kode PMTB (2)	Satuan (3)	Jumlah Tanaman Belum Menghasilkan		Biaya Perawatan per Satuan/Tahun (Ribu Rupiah)	
			Usia ≤ 1 Tahun (3)	Usia > 1 Tahun (4)	Usia ≤ 1 Tahun (5)	Usia > 1 Tahun (6)
1. Anggur	6110	Pohon				
2. Apel	6120		Jumlah tanaman hortikultura yang belum memberikan hasil karena tanaman tersebut masih muda (belum pernah berbunga/belum cukup umur untuk berproduksi)			
3. Alpukat	6130					
4. Belimbing	6140	Pohon	Jika tanaman tidak dapat dibedakan usianya, maka luas tanaman dicatat di kolom 4 (Usia > 1 tahun).			



BLOK II. KETERANGAN TANAMAN HORTIKULTURA MENGHASILKAN BERULANG BELUM PRODUKTIF

Biaya dalam

RIBU RUPIAH

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK IIA. KETERANGAN TANAMAN HORTIKULTURA MENGHASILKAN BERULANG BELUM PRODUKTIF SELAMA TAHUN 2021

Jenis Tanaman	Kode PMTB	Satuan	Jumlah Tanaman Belum Menghasilkan		Biaya Perawatan per Satuan/Tahun (Ribu Rupiah)	
			Usia ≤ 1 Tahun	Usia > 1 Tahun	Usia ≤ 1 Tahun	Usia > 1 Tahun
1. Anggur	6110	Pohon			(5)	(6)
2. Apel			Jika tanaman tidak dapat dibedakan usianya, maka biaya perawatan tanaman dicatat di kolom 6 (Usia > 1 tahun).			
3. Alpukat	6150	Pohon				
4. Belimbing			<p>Penting! Validasi biaya perawatan TBM Usia ≤ 1 Tahun HARUS LEBIH BESAR ATAU SAMA DENGAN biaya perawatan TBM Usia > 1 Tahun</p>		Biaya perawatan untuk tanaman belum menghasilkan per Satuan/tahun , meliputi biaya pembelian bibit, jaring pelindung, pupuk, zat pengatur tumbuh, pestisida, tenaga kerja, sewa alat, jasa pertanian, transportasi, pengairan, penyusutan barang modal, dll, tidak termasuk biaya transportasi/pengangkutan hasil dan upah pemanenan/pengeringan hasil	



BLOK II. KETERANGAN TANAMAN HORTIKULTURA MENGHASILKAN BERULANG BELUM PRODUKTIF

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

Pada Blok II kolom (3) s.d. (6), jika salah satu kolom terisi (> 0) maka kolom lainnya pada satu jenis tanaman harus terisi (≥ 0)

Diisi sesuai kode PMTB pada Tabel Master Kode PMTB

Isian Blok II kol (5) $\geq (6)$

BLOK II A. KETERANGAN TANAMAN HORTIKULTURA MENGHASILKAN BERULANG BELUM PRODUKTIF SELAMA TAHUN 2021						
Jenis Tanaman (1)	Kode PMTB (2)	Satuan	Jumlah Tanaman Belum Menghasilkan		Biaya Perawatan per Satuan/Tahun (Ribu Rupiah)	
			Usia ≤ 1 Tahun (3)	Usia > 1 Tahun (4)	Usia ≤ 1 Tahun (5)	Usia > 1 Tahun (6)
1. Anggur	6110	Pohon				
2. Apel	6120	Pohon				
3. Alpukat	6130	Pohon				

Isian Blok II kol (3) dan (5) ≥ 0

- Jika Blok II kol (3) > 0 maka Blok II kol (5) > 0
- Jika Blok II kol (3) = 0 maka Blok II kol (5) = 0

Isian Blok II kol (4) dan (6) ≥ 0

- Jika Blok II kol (4) > 0 maka Blok II kol (6) > 0
- Jika Blok II kol (4) = 0 maka Blok II kol (6) = 0



BLOK III. CATATAN

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK III. CATATAN

Harap ditulis jika ada hal-hal khusus berkaitan dengan data instansi

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan-keterangan penting yang diperlukan, **terutama cakupan data yang dimiliki oleh instansi/dinas.**



BLOK IV. KETERANGAN PEMBERI INFORMASI

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK IV. KETERANGAN PEMBERI INFORMASI				
1. Nama Pemberi Informasi			4. Tanda Tangan dan Cap Instansi	
2. Jabatan				
3. Nomor Telepon/HP				

Harus Terisi

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan pemberi informasi. Tuliskan nama, jabatan, nomor telepon/HP, dan tanda tangan pemberi informasi serta cap instansi



BLOK V. KETERANGAN PETUGAS

BLOK I BLOK II BLOK III BLOK IV BLOK V

BLOK V. KETERANGAN PETUGAS			
1. Nama Pencacah		1. Nama Pengawas	
2. Tanggal Pencacahan		2. Tanggal Pengawasan	
3. Tanda Tangan		3. Tanda Tangan	

Isikan **tanggal** pada saat melakukan **pencacahan** dan **pengawasan** dengan format **DD-MM-YYYY**

Tuliskan nama pencacah, tanggal pencacahan, dan tanda tangan pencacah. Selanjutnya kuesioner diserahkan pada pengawas untuk diperiksa kelengkapan dan konsistensi isiannya. Tuliskan nama pengawas, tanggal pengawasan, dan tanda tangan pengawas untuk memastikan bahwa semua isian sudah benar.

Rule Validasi

- Semua rincian harus terisi
- Nama pencacah dan pengawas tidak boleh sama
- Tanggal pencacahan \leq tanggal pengawasan
- Tanggal pencacahan dan tanggal pengawasan tidak melebihi bulan Agustus 2022



EVALUASI ISIAN BLOK II



- Evaluasi dilakukan untuk menjaga konsistensi nilai PMTB CBR Tanaman Hortikultura Level Provinsi dengan Level Kabupaten/Kota yang ada di provinsi tersebut, baik secara total maupun menurut jenis tanaman
- Formula penghitungan PMTB CBR Tanaman Hortikultura:

$$PMTB\ CBRh_{i,t} = (LTBMhl_{i,t} \times BPTBMhl_{i,t}) + (LTBMhu_{i,t} \times BPTBMhu_{i,t})$$

$$PMTB\ CBRh_{prov,i,t} = \sum_{n=1}^s PMTB\ CBRh_{kabkot\ n,i,t}$$

Dimana:

- $PMTB\ CBRh_{i,t}$ = Nilai PMTB CBR tanaman hortikultura ke-i pada tahun ke-t (ribu rupiah)
- $LTBMhl_{i,t}$ = Jumlah tanaman hortikultura belum menghasilkan ke-i pada tahun ke-t usia ≤ 1 tahun (pohon)
- $BPTBMhl_{i,t}$ = Rata-rata biaya perawatan tanaman hortikultura belum menghasilkan ke-i pada tahun ke-t usia ≤ 1 tahun (ribu rupiah/pohon)
- $LTBMhu_{i,t}$ = Jumlah tanaman hortikultura belum menghasilkan ke-i pada tahun ke-t usia > 1 tahun (pohon)
- $BPTBMhu_{i,t}$ = Rata-rata biaya perawatan tanaman hortikultura belum menghasilkan ke-i pada tahun ke-t usia > 1 tahun (ribu rupiah/pohon)
- $PMTB\ CBRh_{prov,i,t}$ = Nilai PMTB CBR tanaman hortikultura provinsi, jenis tanaman ke-i pada tahun ke-t (ribu rupiah)
- $PMTB\ CBRh_{kabkot\ n,i,t}$ = Nilai PMTB CBR tanaman hortikultura di kabupaten/kota ke-n, jenis tanaman ke-i pada tahun ke-t (ribu rupiah)



EVALUASI ISIAN BLOK II



Kondisi/status data TBM Hortikultura ada tiga, yaitu angka tetap (tahun n), angka sementara (tahun n + 1), angka estimasi (tahun n + 2) sehingga perlu dibuat kesepatan antara **BPS Provinsi dengan Semua BPS Kabupaten/Kota di provinsi tersebut** terkait kondisi data yang akan dicatat pada kuesioner supaya **diskrepansi = 0**

Evaluasi

- Jika provinsi dan **semua kab/kota** menjadi sampel maka total luas tanaman hortikultura belum menghasilkan (TBM) provinsi **harus sama dengan** total luas TBM kabupaten/kota di provinsi tersebut
- Jika provinsi dan **sebagian kab/kota** menjadi sampel maka total luas tanaman hortikultura belum menghasilkan (TBM) provinsi **harus lebih besar atau sama dengan** total luas TBM kabupaten/kota yang menjadi sampel di provinsi tersebut

Data Jumlah Tanaman Hortikultura Belum Menghasilkan Tahun 2020 Prov. X (Pohon)
(Sampel 1 Dinas Provinsi, 90% Dinas Kab/Kot)

Jenis Tanaman	Data Survei Penyusunan Disagregasi PMTB					
	Usia ≤ 1 Tahun	Usia > 1 Tahun	Prov	Kab/Kot	Prov	Kab/Kot
	Prov	Kab/Kot	Prov	Kab/Kot	Prov	Kab/Kot
Alpukat	59.108	38.857	324.341	115.249	383.449	154.106
Belimbing	3.086	2.523	17.158	38.618	20.244	41.141
Duku/Langsat	20.551	13.544	153.429	203.630	173.980	217.174
Durian	71.642	43.632	752.989	594.269	824.631	637.901
Kapulaga	182.658	5.600	0	6.755	182.658	12.355
Mangga	474.931	26.954	387.746	161.042	862.677	187.996
Manggis	0	6.057	0	45.138	0	51.195
Melinjo	5.979	859	31.432	24.848	37.411	25.707
Rambutan	0	3.369	0	125.959	0	129.328



EVALUASI ISIAN BLOK II



- Jumlah TBM **yang ekstrim** sangat memengaruhi nilai PMTB CBR Tanaman Hortikultura

Langkah-langkah validasi:

- BPS Provinsi melakukan tabulasi raw data, hasil entri kuesioner Hortikultura MI-02 baik untuk level provinsi maupun kab/kot
- BPS Provinsi melakukan rekonsiliasi dengan BPS Kab/Kot untuk isian data yang belum sama antara prov dan kab/kot termasuk untuk isian yang ekstrim
- Jika tidak dicapai kesepakatan rekonsiliasi, BPS Prov/Kab/Kot melakukan
 - pengecekan kembali isian kuesioner dengan hasil entri
 - kunjungan kembali ke responden (instansi/dinas) **untuk mengonfirmasi isian kuesioner dan kondisi status data** (angka tetap/angka sementara/angka estimasi)
- Berdasarkan hasil konfirmasi BPS Provinsi dan BPS Kab/Kot membuat kesepakatan mengenai angka mana yang akan digunakan
- Lakukan perbaikan hasil entri pada program aplikasi entri **sebelum deadline entri tanggal 30 September 2022**

Contoh Data Jumlah Tanaman Hortikultura Belum Menghasilkan Tahun 2020 **yang Ekstrim** (pohon)

Jenis Tanaman	Wilayah	Kab/Kot			Total Provinsi
		Usia ≤ 1 Tahun	Usia > 1 Tahun	Usia ≤ 1 Tahun + Usia > 1 Tahun	
Nenas	Kab. PML	9.896.000	28.853.163	38.749.163	0
	Kab. KPS	4.000.059	11.857.953	15.858.012	0
Durian	Kab. PCT	4.442	4.355.690	4.360.132	3.848.932
Salak	Kab. BJG	1.428	17.720.507	17.721.935	8.000.396



EVALUASI ISIAN BLOK II



- Biaya perawatan **yang ekstrim** sangat memengaruhi nilai PMTB CBR Tanaman Hortikultura

Langkah-langkah evaluasi:

1. BPS Provinsi melakukan tabulasi raw data, hasil entri kuesioner Hortikultura MI-02 baik untuk level provinsi maupun kab/kot
2. BPS Provinsi melakukan rekonsiliasi dengan BPS Kab/Kot untuk isian data yang belum sama antara prov dan kab/kot termasuk untuk isian yang ekstrim
3. Jika tidak dicapai kesepakatan rekonsiliasi, BPS Prov/Kab/Kot melakukan
 - a. pengecekan kembali isian kuesioner dengan hasil entri
 - b. kunjungan kembali ke responden **untuk mengonfirmasi isian biaya perawatan**
4. Berdasarkan hasil konfirmasi BPS Provinsi dan BPS Kab/Kot membuat kesepakatan mengenai angka mana yang akan digunakan
5. Lakukan perbaikan hasil entri pada program aplikasi entri **sebelum deadline entri tanggal 30 September 2022**

Contoh Data Biaya Perawatan Tanaman Hortikultura Belum Menghasilkan Tahun 2020 **yang Ekstrim** (Ribu Rupiah/Ha)

Jenis Tanaman	Wilayah	Usia ≤ 1 Tahun	Usia > 1 Tahun
Salak	Kab. SLM	83.939.265	11.585.035
	Prov. Delapan Puluh	292.000	226.500
Pepaya	Kab. SMLG	29.955	20.415
Petai	Kab. NJK	28.000	25.000
Durian	Kab. KTN	1	1



BIAYA PERAWATAN TERTIMBANG



Biaya perawatan level provinsi dapat menggunakan rata-rata tertimbang dari biaya perawatan level kabupaten/kota

Formula Rata-rata Biaya Perawatan Tertimbang untuk $TBM \leq 1$ Tahun

$$BPTBMhl_{prov,i,t} = \frac{\sum_{n=1}^s (PMTB\ CBRhl_{n,i,t})}{\sum_{n=1}^s LTBMhl_{n,i,t}} = \frac{\sum_{n=1}^s (LTBMhl_{n,i,t} \times BPTBMhl_{n,i,t})}{\sum_{n=1}^s LTBMhl_{n,i,t}}$$

Dimana:

- $BPTBMhl_{prov,i,t}$ = Rata-rata biaya perawatan tanaman hortikultura belum menghasilkan ke-i pada tahun ke-t usia ≤ 1 tahun di provinsi (ribu rupiah/pohon)
- $PMTB\ CBRhl_{n,i,t}$ = Nilai PMTB CBR tanaman hortikultura di kabupaten/kota ke-n, jenis tanaman ke-i pada tahun ke-t usia ≤ 1 tahun (ribu rupiah)
- $LTBMhl_{n,i,t}$ = Jumlah tanaman hortikultura belum menghasilkan di kabupaten/kota ke-n, jenis tanaman ke-i pada tahun ke-t usia ≤ 1 tahun (pohon)
- $BPTBMhl_{n,i,t}$ = Rata-rata biaya perawatan tanaman hortikultura belum menghasilkan di kabupaten/kota ke-n, jenis tanaman ke-i pada tahun ke-t usia ≤ 1 tahun (ribu rupiah/pohon)

4.3

PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER (PMTB22-HEWAN MI-03)





STRUKTUR KUESIONER

BLOK I

KETERANGAN UMUM

BLOK II

KETERANGAN HEWAN MENGHASILKAN BERULANG

BLOK III

CATATAN

BLOK IV

KETERANGAN PEMBERI INFORMASI

BLOK V

KETERANGAN PETUGAS



BLOK I. KETERANGAN UMUM

Isikan **nama dan kode provinsi & kabupaten/kota**. Untuk instansi tingkat provinsi, isikan 00 pada kode kabupaten/kota.

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

Isikan **nomor urut instansi** 3 digit sesuai dengan **daftar PMTB22-DSDINAS**. Nomor urut instansi ini harus panel (nomornya sama) jika ada sampel tahun lalu. Namun, jika merupakan sampel baru maka nomor urut instansi dimulai dari 001.

BLOK I. KETERANGAN UMUM	
1. Provinsi	1. Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan
2. Kabupaten/Kota*)	2. Dinas Peternakan
3. Nomor Urut Instansi	3. Dinas Peternakan dan Perikanan
4. Nama Instansi	4. Dinas Pertanian dan Peternakan
5. Alamat Instansi	5. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
	6. Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan
	7. Dinas Perkebunan dan Peternakan
	8. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
	9. Dinas KPKP
	10. Dinas Peternakan Kelautan & Perikanan

*) Coret yang tidak sesuai

Isikan **alamat instansi beserta nomor telepon** dengan lengkap dan jelas.

Jika terdapat **data instansi/dinas yang panel dari data tahun lalu**, maka silakan menuliskan terlebih dahulu data tahun sebelumnya dengan menggunakan pensil, jika terdapat pembaharuan data instansi/dinas maka yang dipakai adalah data terakhir yang paling **update**.



BLOK I. KETERANGAN UMUM

BLOK I BLOK II BLOK III BLOK IV BLOK V

BLOK I. KETERANGAN UMUM	
1. Provinsi	<input type="text"/>
2. Kabupaten/Kota*)	<input type="text"/>
3. Nomor Urut Instansi	<input type="text"/>
4. Nama Instansi	<input type="text"/>
5. Alamat Instansi	<input type="text"/>

*) Coret yang tidak sesuai

**Sesuai dengan Daftar
PMTB22-DSDINAS**

**Nama dan alamat instansi
dapat diperbaharui
sesuai dengan keadaan pada
saat pencacahan**



BLOK II. KETERANGAN HEWAN MENGHASILKAN BERULANG

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK IIA. KETERANGAN HEWAN MENGHASILKAN BERULANG SELAMA TAHUN 2021

Jenis Hewan	Kode PMTB	Satuan	Jumlah Populasi Hewan	Rasio Hewan yang Menjadi PMTB (Tidak dalam)	Hewan Belum Menghasilkan	Biaya Perawatan per Satuan/Tahun (Ribu Rupiah)			
1. Sapi Induk	5120	Ekor			Jumlah	Usia ≤ 1 Tahun	Usia > 1 Tahun	Usia ≤ 1 Tahun	Usia > 1 Tahun
<p>Hewan induk adalah ternak/unggas/ikan/hewan lainnya pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan bibit/benih.</p> <p>Jika terdapat hewan menghasilkan berulang yang belum tercantum, tambahkan pada baris kosong di bawah baris terakhir rincian hewan.</p>				<p>Isikan satuan hewan yang belum tercantum menurut jenis hewannya</p>				<p>Hewan yang dicakup adalah hewan menghasilkan produk berulang (telur, susu, jasa transportasi, jasa hiburan, dll.) dan digunakan lebih dari satu tahun secara terus-menerus.</p>	



BLOK II. KETERANGAN HEWAN MENGHASILKAN BERULANG

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK IIA. KETERANGAN HEWAN MENGHASILKAN BERULANG SELAMA TAHUN 2021

Jenis Hewan (1)	Kode PMTB (2)	Satuan (3)	Jumlah Populasi Hewan (4)	Rasio Hewan yang Menjadi PMTB (Tidak dalam Persentase) (5)	Hewan Belum Menghasilkan Jumlah (6)	Biaya Perawatan per Satuan/Tahun (Ribu Rupiah) (7)	Usia > 1 Tahun (8)
1. Sapi Induk	5100	EL		Isikan jumlah populasi hewan dalam suatu wilayah. Populasi disini merupakan posisi akhir tahun.	Usia ≤ 1 Tahun	Isikan rasio hewan yang menjadi PMTB terhadap total populasi hewan dalam suatu wilayah.	Usia > 1 Tahun
2. Sapi Perah							
3. Kerbau Induk/B							

Validasi

Rasio hewan yang menjadi PMTB pada rentang $0 < \text{Rasio PMTB} \leq 1$
(tidak dalam persentase)



BLOK II. KETERANGAN HEWAN MENGHASILKAN BERULANG

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK IIA. KETERANGAN HEWAN MENGHASILKAN BERULANG SELAMA TAHUN 2021

Jenis Hewan (1)	Kode PMTB (2)	Satuan (3)	Jumlah Populasi Hewan (4)	Rasio Hewan yang Menjadi PMTB (Tidak dalam Persentase)	Hewan Belum Menghasilkan		Biaya Perawatan per Satuan/Tahun (Ribu Rupiah) (7)	Usia > 1 Tahun (8)
					Jumlah (5)	Usia ≤ 1 Tahun (6)		
1. Jika data jumlah hewan belum menghasilkan menurut jenisnya tidak tersedia, sementara Instansi/Dinas memiliki data jumlah populasi hewan/ternak/ikan, jumlah hewan belum menghasilkan dapat dihitung menggunakan data hasil survei terkait.	<p>Hewan yang belum dapat memberikan hasil karena masih muda (belum pernah berproduksi/belum cukup umur untuk berproduksi).</p> <p>Jika hewan tidak dapat dibedakan usianya, maka jumlah hewan dicatat di kolom 6 (Usia > 1 tahun).</p>							



BLOK II. KETERANGAN HEWAN MENGHASILKAN BERULANG

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

Perkiraan Ternak yang Menjadi PMTB berdasarkan Hasil Survei Rumah Tangga Usaha Peternakan (ST2013-STU)

Jenis Ternak (kuesioner)	Jenis Ternak (dinas)	Rasio Ternak yang Dikuasai Rumah Tangga Usaha Peternakan menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur*)						Total Populasi Ternak**) (ekor)	Rasio Ternak yang Menjadi PMTB	Perkiraan Ternak yang Menjadi PMTB (ekor)			
		Jantan			Betina								
		Anak	Muda	Dewasa	Anak	Muda	Dewasa						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
Sapi induk	Sapi potong	0,11	0,12	0,09	0,11	0,12	0,46	14.726.875	0,25	3.695.120			
Sapi perah	Sapi perah	0,07	0,04	0,02	0,11	0,09	0,67	502.516	0,20	101.357			
Kerbau induk	Kerbau	0,10	0,09	0,12	0,10	0,10	0,49	1.335.147	0,20	261.155			
Kambing induk	Kambing	0,13	0,12	0,12	0,14	0,14	0,35	18.639.533	0,28	5.142.647			
Domba induk	Domba	0,12	0,13	0,14	0,13	0,14	0,34	16.091.838	0,26	4.235.372			
Babi induk	Babi	0,20	0,16	0,13	0,18	0,13	0,20	7.694.130	0,31	2.422.112			

Sumber: *) BPS

**) Dirjend Peternakan, Kementan

Formula:

- ✓ Sapi potong → kolom (10) = {0,1 x [kolom (3) + kolom (4)] } + kolom (6) + kolom (7)
- ✓ Selain sapi potong → kolom (10) = kolom (6) + kolom (7)
- ✓ Kolom (11) = kolom (9) x kolom (10)



BLOK II. KETERANGAN HEWAN MENGHASILKAN BERULANG

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

Perkiraan Unggas yang Menjadi PMTB berdasarkan Hasil Survei Laporan Tahunan Perusahaan Peternakan Unggas Tahun 2018

Jenis Ternak (kuesioner)	Jenis Ternak (dinas)	Populasi Unggas Hasil Survei (000 ekor)			Total Populasi Unggas Hasil Survei (000 ekor)	Rasio Ternak yang Menjadi PMTB	Total Populasi Unggas (000 ekor)	Perkiraan Unggas yang Menjadi PMTB (000 ekor)
		Belum Berproduksi	Sudah Berproduksi	Tidak Berproduksi Lagi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(11)	(12)
Ayam induk/petelur	Ayam petelur	1.605,55	7.307,45	666,77	9.579,76	0,17	176.936,92	30.079,27

Formula:

- ✓ Kolom (10) = Kolom (3)
 Kolom (9)
- ✓ Kolom (12) = Kolom (10) x Kolom (11)



BLOK II. KETERANGAN HEWAN MENGHASILKAN BERULANG



Biaya dalam

RIBU RUPIAH

BLOK I

BLOK II

BLOK II

BLOK I

BLOK

BLOK IIA. KETERANGAN HEWAN MENGHASILKAN BERULANG SELAMA TAHUN 2021



BLOK II. KETERANGAN HEWAN MENGHASILKAN BERULANG

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

Pada Blok II kolom (3) s.d. (8), jika salah satu kolom terisi (> 0) maka kolom lainnya pada satu jenis hewan harus terisi (≥ 0)

Diisi sesuai kode PMTB pada Tabel Master Kode PMTB

Isian Blok II kol (7) $\geq (8)$

BLOK II A. KETERANGAN HEWAN MENGHASILKAN BERULANG SELAMA TAHUN 2021								
Jenis Hewan (1)	Kode PMTB (2)	Satuan (3)	Jumlah Populasi Hewan (4)	Rasio Hewan yang Menjadi PMTB (Tidak dalam Persentase) (5)	Hewan Belum Menghasilkan			
					Jumlah (6)	Biaya Perawatan per Satuan/Tahun (Ribu Rupiah) (7)	Usia \leq 1 Tahun (8)	Usia > 1 Tahun (9)
1. Sapi Induk	5120	Ekor						
2. Sapi Perah	5110	Ekor						
3. Kerbau Induk/Bajak	5140	Ekor						

Isian Blok II kol (5) dan (7) ≥ 0

- Jika Blok II kol (5) > 0 maka Blok II kol (7) > 0
- Jika Blok II kol (5) = 0 maka Blok II kol (7) = 0

Isian Blok II kol (6) dan (8) ≥ 0

- Jika Blok II kol (6) > 0 maka Blok II kol (8) > 0
- Jika Blok II kol (6) = 0 maka Blok II kol (8) = 0



BLOK III. CATATAN

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK III. CATATAN

Harap ditulis jika ada hal-hal khusus berkaitan dengan data instansi

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan-keterangan penting yang diperlukan, **terutama cakupan data yang dimiliki oleh instansi/dinas.**



BLOK IV. KETERANGAN PEMBERI INFORMASI

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK IV. KETERANGAN PEMBERI INFORMASI				
1. Nama Pemberi Informasi			4. Tanda Tangan dan Cap Instansi	
2. Jabatan				
3. Nomor Telepon/HP				
Harus Terisi				

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan pemberi informasi. Tuliskan nama, jabatan, nomor telepon/HP, dan tanda tangan pemberi informasi serta cap instansi



BLOK V. KETERANGAN PETUGAS

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK V. KETERANGAN PETUGAS			
1. Nama Pencacah		1. Nama Pengawas	
2. Tanggal Pencacahan		2. Tanggal Pengawasan	
3. Tanda Tangan		3. Tanda Tangan	

Isikan **tanggal** pada saat melakukan **pencacahan** dan **pengawasan** dengan format **DD-MM-YYYY**

Tuliskan nama pencacah, tanggal pencacahan, dan tanda tangan pencacah. Selanjutnya kuesioner diserahkan pada pengawas untuk diperiksa kelengkapan dan konsistensi isiannya. Tuliskan nama pengawas, tanggal pengawasan, dan tanda tangan pengawas untuk memastikan bahwa semua isian sudah benar.

Rule Validasi

- Semua rincian harus terisi
- Nama pencacah dan pengawas tidak boleh sama
- Tanggal pencacahan \leq tanggal pengawasan
- Tanggal pencacahan dan tanggal pengawasan tidak melebihi bulan Agustus 2022



EVALUASI ISIAN BLOK II



- Evaluasi dilakukan untuk menjaga konsistensi nilai PMTB CBR Hewan Level Provinsi dengan Level Kabupaten/Kota yang ada di provinsi tersebut, baik secara total maupun menurut jenis hewan
- Formula penghitungan PMTB CBR Hewan:

$$PMTB\ CBRs_{i,t} = (JHBMsl_{i,t} \times BPHBMsl_{i,t}) + (JHBMsu_{i,t} \times BPHBMsu_{i,t})$$

$$PMTB\ CBRs_{prov,i,t} = \sum_{n=1}^p PMTB\ CBRs_{kabkot\ n,i,t}$$

Dimana:

- $PMTB\ CBRs_{i,t}$ = Nilai PMTB CBR hewan ke-i pada tahun ke-t (ribu rupiah)
- $JHBMsl_{i,t}$ = Jumlah hewan belum menghasilkan ke-i pada tahun ke-t usia ≤ 1 tahun (ekor)
- $BPHBMsl_{i,t}$ = Rata-rata biaya perawatan hewan belum menghasilkan ke-i pada tahun ke-t usia ≤ 1 tahun (ribu rupiah/ekor)
- $JHBMsu_{i,t}$ = Jumlah hewan belum menghasilkan ke-i pada tahun ke-t usia > 1 tahun (ekor)
- $BPHBMsu_{i,t}$ = Rata-rata biaya perawatan hewan belum menghasilkan ke-i pada tahun ke-t usia > 1 tahun (ribu rupiah/ekor)
- $PMTB\ CBRs_{prov,i,t}$ = Nilai PMTB CBR hewan provinsi, jenis hewan ke-i pada tahun ke-t (ribu rupiah)
- $PMTB\ CBRs_{kabkot\ n,i,t}$ = Nilai PMTB CBR hewan di kabupaten/kota ke-n, jenis hewan ke-i pada tahun ke-t (ribu rupiah)



EVALUASI ISIAN BLOK II

Data Jumlah Hewan Belum Menghasilkan Tahun 2020 Prov. X (Ekor)
(Sampel 1 Dinas Provinsi, 100% Dinas Kab/Kot)

Evaluasi

- Selisih antara jumlah HBM hasil survei dengan Ditjen Peternakan dan Keswan hanya diperbolehkan maksimal $\pm 10\%$

Jenis Hewan	Data Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2021								Range Toleransi		
	Usia ≤ 1 Tahun		Usia > 1 Tahun		Usia ≤ 1 Tahun + Usia > 1 Tahun		Populasi		Data Ditjen Paterna kan & Keswan	90% Data Ditjen Paterna kan & Keswan	110% Data Ditjen Paterna kan & Keswan
	Prov	Kab/Kot	Prov	Kab/Kot	Prov	Kab/Kot	Prov	Kab/Kot			
Sapi Perah	0	0	10	13	10	13	51	43	51	46	56
Sapi Induk	0	39.835	327.960	415.307	327.960	455.142	131.186	299.465	361.568	325.411	397.725
Kuda Induk/Tunggang	0	3	54	104	54	107	27.000	41.798	644	580	708
Kerbau Induk/Bajak	0	131	16.400	39.361	16.400	39.492	82.200	124.857	2.349	2.114	2.584
Kambing Perah/Induk	0	15.655	22.397	260.598	22.397	276.253	79.989	256.333	195.128	175.615	214.641
Babi Induk	0	13.873	13.686	102.810	13.686	116.683	44.149	140.202	98.108	88.297	107.919
Ayam Induk/Petelur	0	893.337	77.472	1.808.999	77.472	2.702.336	455.719	7.797.871	17.113.180	15.401.862	18.824.498
Itik Induk/Petelur	0	15.301	68.746	323.692	68.746	338.993	404.389	817.008	577.699	519.929	635.469
Itik Manila Induk	0	1.559	5.110	195.270	5.110	196.829	30.059	239.068	42.942	38.648	47.236
Burung Puyuh	0	0	0	0	0	0	0	0	9.266	8.339	10.193



EVALUASI ISIAN BLOK II

Kondisi/status data HBM ada dua, yaitu angka tetap (tahun n) dan angka sementara (tahun n + 1) sehingga **perlu dibuat kesepatan antara BPS Provinsi dengan Semua BPS Kabupaten/Kota di provinsi tersebut** terkait kondisi data yang akan dicatat pada kuesioner supaya **diskrepansi = 0**

Evaluasi

Total jumlah hewan belum menghasilkan (HBM) provinsi **harus sama dengan** total jumlah HBM kabupaten/kota di provinsi tersebut

1. Jika provinsi dan **semua kab/kota** menjadi sampel maka total jumlah HBM provinsi **harus sama dengan** total jumlah HBM kabupaten/kota di provinsi tersebut
2. Jika provinsi dan **sebagian kab/kota** menjadi sampel maka total jumlah HBM provinsi **harus lebih besar atau sama dengan** total jumlah HBM kabupaten/kota yang menjadi sampel di provinsi tersebut

Data Jumlah Hewan Belum Menghasilkan Tahun 2020 Prov. X (Ekor)
(Sampel 1 Dinas Provinsi, 100% Dinas Kab/Kot)

Jenis Hewan	Data Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2021					
	Usia ≤ 1 Tahun		Usia > 1 Tahun		Usia ≤ 1 Tahun + Usia > 1 Tahun	
	Prov	Kab/Kot	Prov	Kab/Kot	Prov	Kab/Kot
Sapi Perah	0	0	10	13	10	13
Sapi Induk	0	39.835	327.960	415.307	327.960	455.142
Kuda Induk/Tunggang	0	3	54	104	54	107
Kerbau Induk/Bajak	0	131	16.400	39.361	16.400	39.492
Kambing Perah/Induk	0	15.655	22.397	260.598	22.397	276.253
Babi Induk	0	13.873	13.686	102.810	13.686	116.683
Ayam Induk/Petelur	0	893.337	77.472	1.808.999	77.472	2.702.336
Itik Induk/Petelur	0	15.301	68.746	323.692	68.746	338.993
Itik Manila Induk	0	1.559	5.110	195.270	5.110	196.829
Burung Puyuh	0	0	0	0	0	0



EVALUASI ISIAN BLOK II

- Jumlah HBM **yang ekstrim** sangat memengaruhi nilai PMTB CBR Hewan

Langkah-langkah validasi:

1. BPS Provinsi melakukan tabulasi raw data, hasil entri kuesioner Hewan MI-03 baik untuk level provinsi maupun kab/kot
2. BPS Provinsi melakukan rekonsiliasi dengan BPS Kab/Kot untuk isian data yang belum sama antara prov dan kab/kot termasuk untuk isian yang ekstrim
3. Jika tidak dicapai kesepakatan rekonsiliasi, BPS Prov/Kab/Kot melakukan
 - a. pengecekan kembali isian kuesioner dengan hasil entri
 - b. kunjungan kembali ke responden (instansi/dinas) **untuk mengonfirmasi isian kuesioner dan kondisi status data** (angka tetap/angka sementara)
4. Berdasarkan hasil konfirmasi BPS Provinsi dan BPS Kab/Kot membuat kesepakatan mengenai angka mana yang akan digunakan
5. Lakukan perbaikan hasil entri pada program aplikasi entri **sebelum deadline entri tanggal 30 September 2022**

Contoh Data Jumlah Hewan Belum Menghasilkan Tahun 2020 **yang Ekstrim** (Ekor)

Jenis Hewan	Wilayah	Kab/Kot			Total Provinsi
		Usia ≤ 1 Tahun	Usia > 1 Tahun	Usia ≤ 1 Tahun + Usia > 1 Tahun	
Babi Induk	Kab. LWKU	673.895	562.260	1.236.155	270.060
Burung Puyuh	Kab. TGG	176.574	294.290	470.864	288.121



EVALUASI ISIAN BLOK II

- Biaya perawatan **yang ekstrim** sangat memengaruhi nilai PMTB CBR Hewan

Langkah-langkah validasi:

1. BPS Provinsi melakukan tabulasi raw data, hasil entri kuesioner Hewan MI-03 baik untuk level provinsi maupun kab/kot
2. BPS Provinsi melakukan rekonsiliasi dengan BPS Kab/Kot untuk isian data yang belum sama antara prov dan kab/kot termasuk untuk isian yang ekstrim
3. Jika tidak dicapai kesepakatan rekonsiliasi, BPS Prov/Kab/Kot melakukan
 - a. pengecekan kembali isian kuesioner dengan hasil entri
 - b. kunjungan kembali ke responden **untuk mengonfirmasi isian biaya perawatan**
4. Berdasarkan hasil konfirmasi BPS Provinsi dan BPS Kab/Kot membuat kesepakatan mengenai angka mana yang akan digunakan
5. Lakukan perbaikan hasil entri pada program aplikasi entri **sebelum deadline entri tanggal 30 September 2022**

Contoh Data Biaya Perawatan Hewan Belum Menghasilkan Tahun 2020 **yang Ekstrim (Ribu Rupiah/Ekor)**

Jenis Hewan	Wilayah	Usia ≤ 1 Tahun	Usia > 1 Tahun
Sapi Induk	Kab. BKL	10.800.000	10.800.000
Sapi Perah	Kab. BLR	10.950.000	10.022.500
Kerbau Induk/Bajak	Kab. SMG	10.950.000	10.950.000
Babi Induk	Kab. KR	6.237	6
Itik Induk/Petelur	Kab. BYL	600	1



EVALUASI ISIAN BLOK II

Evaluasi

Rasio hewan yang menjadi PMTB pada rentang $0 < \text{Rasio PMTB} \leq 1$
(tidak dalam persentase)

Contoh Data Rasio Hewan Belum Menghasilkan yang Ekstrim

Jenis Hewan	Wilayah	Rasio Hewan yang Menjadi PMTB
Kelinci Induk	Kab. ACSK	2
Kambing Perah/Induk	Kab. ACBD	1.989
Sapi Perah	Kab. SGN	67
Kerbau Induk	Kab. KRW	67



BIAYA PERAWATAN TERTIMBANG



Biaya perawatan level provinsi dapat menggunakan rata-rata tertimbang dari biaya perawatan level kabupaten/kota

Formula Rata-rata Biaya Perawatan Tertimbang untuk HBM ≤ 1 Tahun

$$BPHBMSl_{prov,i,t} = \frac{\sum_{n=1}^p (PMTB\ CBRsl_{n,i,t})}{\sum_{n=1}^p JHBMsl_{n,i,t}} = \frac{\sum_{n=1}^p (JHBMsl_{n,i,t} \times BPHBMSl_{n,i,t})}{\sum_{n=1}^p JHBMsl_{n,i,t}}$$

Dimana:

$BPHBMSl_{prov,i,t}$ = Rata-rata biaya perawatan hewan belum menghasilkan ke-i pada tahun ke-t usia ≤ 1 tahun di provinsi (ribu rupiah/ekor)

$PMTB\ CBRsl_{n,i,t}$ = Nilai PMTB CBR hewan di kabupaten/kota ke-n, jenis hewan ke-i pada tahun ke-t usia ≤ 1 tahun (ribu rupiah)

$JHBMsl_{n,i,t}$ = Jumlah hewan belum menghasilkan di kabupaten/kota ke-n, jenis hewan ke-i pada tahun ke-t usia ≤ 1 tahun (ekor)

$BPHBMSl_{n,i,t}$ = Rata-rata biaya perawatan hewan belum menghasilkan di kabupaten/kota ke-n, jenis hewan ke-i pada tahun ke-t usia ≤ 1 tahun (ribu rupiah/ekor)

4.4

PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER (PMTB22-EKSPLORASI MI-04)





STRUKTUR KUESIONER

BLOK I

KETERANGAN UMUM

BLOK II

KETERANGAN EKSPLORASI / EVALUASI BAHAN TAMBANG DAN GALIAN

BLOK III

IZIN PERTAMBANGAN/PENGGALIAN BAHAN TAMBANG DAN GALIAN

BLOK IV

CATATAN

BLOK V

KETERANGAN PEMBERI INFORMASI

BLOK VI

KETERANGAN PETUGAS



BLOK I. KETERANGAN UMUM

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK I. KETERANGAN UMUM

1. Provinsi

2. Kabupaten/Kota*)

3. Nomor Urut Instansi

4. Nama Instansi

5. Alamat Instansi

- 1. Dinas Pertambangan
- 2. Dinas Pertambangan dan Energi
- 3. Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP)
- 4. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal
- 5. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- 6. Badan Lingkungan Hidup dan Pertambangan
- 7. Dinas Pertambangan dan Penggalian
- 8. Dinas Sumber Daya Manusia dan Energi
- 9. Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi
- 10. Dinas Pertambangan dan Mineral

Isikan **nomor urut instansi**
3 digit sesuai dengan
daftar PMTB22-DSDINAS

Isikan **alamat instansi** beserta **nomor telefon** dengan lengkap dan jelas.

Isikan **nama dan kode provinsi kabupaten/kota**
Untuk instansi tingkat provinsi, isikan 00 pada
kode kabupaten/kota.



BLOK II. KETERANGAN EKSPLORASI/EVALUASI BAHAN TAMBANG DAN GALIAN

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

Jumlah proyek adalah banyaknya kegiatan eksplorasi dan evaluasi mineral yang dilakukan oleh usaha/perusahaan pertambangan/penggalian dalam satu wilayah (provinsi/kabupaten/kota) pada periode tertentu.

BLOK IIA. KETERANGAN EKSPLORASI/EVALUASI BAHAN TAMBANG DAN GALIAN				Biaya dalam RIBU RUPIAH
Jenis Bahan Tambang dan Galian	Kode PMTB	Luas Lahan Eksplorasi/Evaluasi (Ha)	Jumlah Proyek	Jumlah Biaya yang Dikeluarkan Perusahaan (Ribu Rupiah)
1. Batu Bara	7210	(2)	(3)	(4)
2. Minyak Bumi	7210			
3. Gas Bumi dan Panas Bumi	7210			
4. Bijih Timah	7220			

Isikan besarnya **luas lahan** (baik berhasil maupun gagal) menurut jenis mineral yang kegiatan eksplorasi dan evaluasinya dilakukan pada tahun 2021 dalam satuan hektar (ha).

Biaya-biaya yang dikeluarkan atas kegiatan eksplorasi dan evaluasi minyak, gas alam, dan bahan tambang lainnya. Kegiatan ini dapat dilakukan sendiri atau perusahaan lain.



BLOK II. KETERANGAN EKSPLORASI/EVALUASI BAHAN TAMBANG DAN GALIAN

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK IIA. KETERANGAN EKSPLORASI/EVALUASI BAHAN TAMBANG DAN GALIAN TAHUN 2021

Jenis Bahan Tambang dan Galian (1)	Kode PMTB (2)	Luas Lahan Eksplorasi/Evaluasi (Ha) (3)	Jumlah Proyek (4)	Jumlah Biaya yang Dikeluarkan Perusahaan (Ribu Rupiah) (5)
1. Batu Bara	7210			
2. Minyak Bumi	7210			
3. Gas Bumi dan Panas Bumi	7210			
4. Bijih Timah	7220			

- Minimal harus terisi satu baris rincian di kolom (2) Luas Lahan pada blok II
- Jika luas lahan terisi maka jumlah proyek harus terisi > 0 . Begitu juga sebaliknya, jika jumlah proyeknya terisi > 0 maka luas lahan seharusnya terisi.
- Jika Kolom (2) dan Kolom (3) terisi, maka kolom (4) harus **terisi**.
- Jika terdapat baris tambahan (Rincian (11), dst.), maka Kolom (2) s.d. Kolom (4) harus terisi



BLOK III. IZIN PERTAMBANGAN/PENGGALIAN BAHAN TAMBANG DAN GALIAN

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

Jumlah proyek adalah jumlah ijin penggalian hasil tambang dan barang galian yang dikeluarkan oleh dinas kepada perusahaan pada periode tertentu.

BLOK IIIA. IZIN PERTAMBANGAN/PENGGALIAN BAHAN TAMBANG DAN GALIAN			
Jenis Bahan Tambang dan Galian (1)	Kode PMTB	Luas Lahan Pertambangan/Penggalian yang Izinnya Diterbitkan (Ha) (2)	Jumlah Proyek yang Izinnya Diterbitkan (3)
1. Batu Bara	7210		
2. Minyak Bumi	7210		
3. Gas Bumi dan Panas Bumi	7210		
4. Bijih Timah	7220		

Luas lahan penggalian adalah luas area penggalian hasil tambang dan barang galian. Isikan besarnya luas lahan menurut jenis mineral yang ijinya dikeluarkan dinas pada 2021 dalam satuan hektar (ha).

Biaya dalam
RIBU RUPIAH

Biaya yang diterima dinas merupakan pendapatan yang diterima dinas dari biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh ijin penggalian hasil tambang dan barang galian pada periode tertentu.



BLOK III. IZIN PERTAMBANGAN/PENGGALIAN BAHAN TAMBANG DAN GALIAN

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK IIIA. IZIN PERTAMBANGAN/PENGGALIAN BAHAN TAMBANG DAN GALIAN TAHUN 2020

Jenis Bahan Tambang dan Galian
(1)

1. Batu Bara
2. Minyak Bumi
3. Gas Bumi dan Panas Bumi
4. Bijih Timah

Kode PMTB

7210
7210
7210
7220

Kode PMTB adalah 4 digit kode unik jenis barang yang menjadi PMTB. Kuesioner MI-04 terdapat rule validasi dimana kode PMTB untuk eksplorasi harus diantara kode pada tabel di bawah ini.

Kode PMTB	Deskripsi
7210	Eksplorasi/evaluasi migas
7220	Eksplorasi/evaluasi nonmigas



BLOK III. IZIN PERTAMBANGAN/PENGGALIAN BAHAN TAMBANG DAN GALIAN

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK IIIA. IZIN PERTAMBANGAN/PENGGALIAN BAHAN TAMBANG DAN GALIAN TAHUN 2021

Jenis Bahan Tambang dan Galian	Kode PMTB
(1)	
1. Batu Bara	7210
2. Minyak Bumi	7210
3. Gas Bumi dan Panas Bumi	7210
4. Bijih Timah	7220
5. Bijih Nikel	7220
6. Bijih Bauksit	7220
7. Bijih Tembaga	7220
8. Bijih Emas	7220
9. Bijih Perak	7220
10. Bijih & Pasir Besi	7220
11.	

Isikan semua komoditas mineral hasil tambang dan barang galian yang ijin pertambangan/penggaliannya dikeluarkan oleh dinas pada tahun 2021

Komoditas mineral yang belum tercantum pada Blok IIA kolom (1) perlu ditambahkan/dicatat mulai baris ke 11 dan seterusnya, seperti: radium, mangan, antimoni, alumina, batu gunung, thorium, platina, kobalt, niobium, batu kali, dll.



BLOK III. IZIN PERTAMBANGAN/PENGGALIAN BAHAN TAMBANG DAN GALIAN

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK IIIA. IZIN PERTAMBANGAN/PENGGALIAN BAHAN TAMBANG DAN GALIAN TAHUN 2021

Jenis Bahan Tambang dan Galian (1)	Kode PMTB (2)	Luas Lahan Pertambangan/Penggalian yang Izinnya Diterbitkan (Ha) (3)	Jumlah Proyek yang Izinnya Diterbitkan (4)	Jumlah Biaya yang Diterima Dinas (Ribu Rupiah)
1. Batu Bara	7210			
2. Minyak Bumi	7210			
3. Gas Bumi dan Panas Bumi	7210			
4. Bijih Timah	7220			
5. Bijih Nikel	7220			
6. Bijih Bauksit	7220			
7. Bijih Tembaga	7220			
8. Bijih Emas	7220			
9. Bijih Perak	7220			
10. Bijih & Pasir Besi	7220			
11.				

- Minimal harus terisi satu baris rincian di kolom (2) Luas Lahan pada blok III
- Jika luas lahan terisi maka jumlah proyek harus terisi > 0 . Begitu juga sebaliknya, jika jumlah proyeknya terisi > 0 maka luas lahan seharusnya terisi.
- Jika Kolom (2) dan Kolom (3) terisi, maka kolom (4) harus terisi.
- Jika terdapat baris tambahan (Rincian (11), dst.), maka Kolom (2) s.d. Kolom (4) harus terisi



BLOK IV. CATATAN

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK IV. CATATAN

Harap ditulis jika ada hal-hal khusus berkaitan dengan data instansi

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan-keterangan penting yang diperlukan, **terutama cakupan data yang dimiliki oleh instansi/dinas.**



BLOK V. KETERANGAN PEMBERI INFORMASI

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK V. KETERANGAN PEMBERI INFORMASI					
1. Nama Pemberi Informasi			4. Tanda Tangan dan Cap Instansi		
2. Jabatan					
3. Nomor Telepon/HP					
Harus Terisi					

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan pemberi informasi. Tuliskan nama, jabatan, nomor telepon/HP, dan tanda tangan pemberi informasi serta cap instansi



BLOK VI. KETERANGAN PETUGAS

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK VI. KETERANGAN PETUGAS			
1. Nama Pencacah		1. Nama Pengawas	
2. Tanggal Pencacahan		2. Tanggal Pengawasan	
3. Tanda Tangan		3. Tanda Tangan	

Isikan **tanggal** pada saat melakukan **pencacahan** dan **pengawasan** dengan format **DD-MM-YYYY**

Tuliskan nama pencacah, tanggal pencacahan, dan tanda tangan pencacah. Selanjutnya kuesioner diserahkan pada pengawas untuk diperiksa kelengkapan dan konsistensi isiannya. Tuliskan nama pengawas, tanggal pengawasan, dan tanda tangan pengawas untuk memastikan bahwa semua isian sudah benar.

Rule Validasi

- Semua rincian harus terisi
- Nama pencacah dan pengawas tidak boleh sama
- Tanggal pencacahan \leq tanggal pengawasan
- Tanggal pencacahan dan tanggal pengawasan tidak melebihi bulan Agustus 2022



EVALUASI ISIAN BLOK II

Data MI-04 tahun 2020

Jumlah proyek kosong, namun luas lahan eksplorasi/evaluasi terisi. Jika luas lahan eksplorasi/evaluasi terisi (luas > 0), maka jumlah proyek juga harus terisi (jumlah > 0)

Kesalahan satuan. Satuan untuk jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan adalah ribu rupiah (Rp.000)

Provinsi	Luas Lahan Eksplorasi/Evaluasi (Ha)	Jumlah Proyek	Jumlah Biaya yang Dikeluarkan Perusahaan (Ribu Rupiah)
Prov 1	31.582	-	-
Prov 2	9.704	8	-
Prov 3	1.231	5	-
Prov 4	4.455	50	8.680.335
Prov 5	1.229	113	-
Prov 6	127	23	-
Prov 7	32.976	-	-
Prov 8	130.759	-	-
Prov 9	15.276	33	-
Prov 10	812.683	217	-
Prov 11	10.839	14	-
Prov 12	56.577	5	-
Prov 13	2.102	54	3
Prov 14	41.703	5	1.216.239
Prov 15	815	37	-
Prov 16	1	1	-
Prov 17	11.162	6	2
Total	1.163.220	571	9.896.579



EVALUASI ISIAN BLOK III



Data MI-04 tahun 2020

Jumlah proyek kosong, namun luas lahan eksplorasi/evaluasi terisi. Jika luas lahan eksplorasi/evaluasi terisi (luas > 0), maka jumlah proyek juga harus terisi (jumlah > 0)

Kesalahan satuan. Satuan untuk jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan adalah ribu rupiah (Rp.000)

Provinsi	Luas Lahan Pertambangan/Penggalian yang Izinnya Diterbitkan (Ha)	Jumlah Proyek yang Izinnya Diterbitkan	Jumlah Biaya yang Diterima Dinas (Ribu Rupiah)
Prov 1	30.473	61	-
Prov 2	166.822	-	-
Prov 3	39.745	62	-
Prov 4	1.974	109	-
Prov 5	3.504	413	-
Prov 6	128	36	-
Prov 7	86.105	-	-
Prov 8	131.257	95	-
Prov 9	31.473	59	-
Prov 10	1.061.869	295	-
Prov 11	5.626	2	-
Prov 12	10.839	14	-
Prov 13	66.263	21	-
Prov 14	3.487	103	6
Prov 15	9.374	114	383.866
Prov 16	4.841	70	-
Prov 17	20.935	5	-
Prov 18	563.217	103	6
Total	2.237.934	1.562	383.878

4.5

PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER (PMTB22-KENDARAAN SAMSAT MI-05A)





STRUKTUR KUESIONER

BLOK I

KETERANGAN UMUM

BLOK II

KENDARAAN BERMOTOR & ALAT BERAT BARU DAN BESARNYA BBN-KB I

BLOK III

KENDARAAN BERMOTOR & ALAT BERAT BEKAS DAN BESARNYA BBN-KB II

BLOK IV

CATATAN

BLOK V

KETERANGAN PEMBERI INFORMASI

BLOK VI

KETERANGAN PETUGAS



BLOK I. KETERANGAN UMUM

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK I. KETERANGAN UMUM

1. Provinsi

2. Kabupaten/Kota*)

3. Nomor Urut Instansi

4. Nama Instansi

5. Alamat Instansi

SATUAN ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP
(SAMSAT)

Isikan **nomor urut instansi**
3 digit sesuai dengan
daftar PMTB22-DSDINAS

Isikan **alamat instansi** beserta **nomor**
telepon dengan lengkap dan jelas.

Isikan **nama dan kode provinsi kabupaten/kota**
Untuk instansi tingkat provinsi, isikan 00 pada
kode kabupaten/kota.



BLOK II. KETERANGAN MENGENAI KENDARAAN BERMOTOR DAN ALAT BERAT BARU DAN BESARNYA BBN-KB I PADA SAMSAT

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK IIA. KETERANGAN MENGENAI KENDARAAN BERMOTOR & ALAT BERAT BARU DAN BESARNYA BBN-KB I PADA SAMSAT SELAMA TAHUN 2021												
RINCIAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR (KB) DAN ALAT BERAT (AB)	Kode PMTB	JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR (KB) & ALAT BERAT (AB) BARU DAN BESARNYA PENDAPATAN BBN-KB I MENURUT WARNA PELAT NOMOR						PERSENTASE NILAI BBN-KB I TERHADAP HARGA KENDARAAN DAN ALAT BERAT PER UNIT (%)				
		PELAT HITAM		PELAT KUNING		PELAT MERAH		PELAT HITAM	PELAT KUNING	PELAT MERAH		
(1)	(2)	JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB I (Ribu Rupiah)	JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB I (Ribu Rupiah)	JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB I (Ribu Rupiah)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Bus	3420											
2. Minibus	3420											
3. Microbus	3420											

Jumlah Kendaraan Bermotor (KB) dan Alat Berat (AB) dengan warna dasar pelat **nomor hitam** yang membayar BBN-KB I

Isikan jumlah biaya BBN-KB I yang diterima kantor SAMSAT untuk kendaraan dan alat berat dengan warna dasar pelat nomor hitam

Jumlah Kendaraan Bermotor (KB) dan Alat Berat (AB) dengan warna dasar pelat **nomor kuning** yang membayar BBN-KB I

Isikan jumlah biaya BBN-KB I yang diterima kantor SAMSAT untuk kendaraan dan alat berat dengan warna dasar pelat nomor kuning

BBN-KB I adalah **bea balik nama** atas **penyerahan pertama** atau penyerahan kendaraan dari pihak dealer kepada pihak konsumen.



BLOK II. KETERANGAN MENGENAI KENDARAAN BERMOTOR DAN ALAT BERAT BARU DAN BESARNYA BBN-KB I PADA SAMSAT

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK IIA. KETERANGAN MENGENAI KENDARAAN BERMOTOR & ALAT BERAT BARU DAN BESARNYA BBN-KB I PADA SAMSAT SELAMA TAHUN 2021										
RINCIAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR (KB) DAN ALAT BERAT (AB)	Kode PMTB	JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR (KB) & ALAT BERAT (AB) BARU DAN BESARNYA PENDAPATAN BBN-KB I MENURUT WARNA PELAT NOMOR						PERSENTASE NILAI BBN-KB I TERHADAP HARGA KENDARAAN DAN ALAT BERAT PER UNIT (%)		
		PELAT HITAM		PELAT KUNING		PELAT MERAH		PELAT HITAM	PELAT KUNING	PELAT MERAH
		JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB I (Ribu Rupiah)	JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB I (Ribu Rupiah)	JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB I (Ribu Rupiah)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1. Bus	3420									
2. Minibus	3420									
3. Microbus										
4. Truck										
5. Pick-up										
6. Ambulance										
7. Station Wagon										
8. Mobil pemadam										
9. Sepeda motor										
10. Kendaraan roda 3										

Jumlah Kendaraan Bermotor (KB) dan Alat Berat (AB) dengan warna dasar pelat **nomor merah** yang membayar BBN-KB I

Jumlah Kendaraan Bermotor (KB) dan Alat Berat (AB) dengan warna dasar pelat nomor merah yang membayar BBN-KB I

Persentase besaran BBN-KB I terhadap harga per unit kendaraan dan alat berat yang ditetapkan berdasarkan peraturan Gubernur atau lainnya



BLOK II. KETERANGAN MENGENAI KENDARAAN BERMOTOR DAN ALAT BERAT BARU DAN BESARNYA BBN-KB I PADA SAMSAT

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK IIA. KETERANGAN MENGENAI KENDARAAN BERMOTOR & ALAT BERAT BARU DAN BESARNYA BBN-KB I PADA SAMSAT SELAMA TAHUN 2021										
RINCIAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR (KB) DAN ALAT BERAT (AB)	Kode PMTB	JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR (KB) & ALAT BERAT (AB) BARU DAN BESARNYA PENDAPATAN BBN-KB I MENURUT WARNA PELAT NOMOR						PERSENTASE NILAI BBN-KB I TERHADAP HARGA KENDARAAN DAN ALAT BERAT PER UNIT (%)		
		PELAT HITAM		PELAT KUNING		PELAT MERAH		PELAT HITAM	PELAT KUNING	PELAT MERAH
		JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB I (Ribu Rupiah)	JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB I (Ribu Rupiah)	JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB I (Ribu Rupiah)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1. Bus	3420									
2. Minibus	3420									
3. Microbus	3420									
4. Truck	3430									
5. Pick-up	3430									
6. Ambulance	3440									
7. Station Wagon	3410									
8. Mobil pemadam	3440									
9. Sepeda motor	3510									
10. Kendaraan roda 3	3520									

Kode PMTB adalah 4 digit kode unik jenis barang yang menjadi PMTB. Kuesioner MI-05A terdapat *rule validasi* dimana kode PMTB harus diantara kode pada tabel Master Kode PMTB

Di isi sesuai kode PMTB pada Tabel Master Kode PMTB



BLOK II. KETERANGAN MENGENAI KENDARAAN BERMOTOR DAN ALAT BERAT BARU DAN BESARNYA BBN-KB I PADA SAMSAT

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK IIA. KETERANGAN MENGENAI KENDARAAN BERMOTOR & ALAT BERAT BARU DAN BESARNYA BBN-KB I PADA SAMSAT SELAMA TAHUN 2021										
RINCIAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR (KB) DAN ALAT BERAT (AB)	Kode PMTB	JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR (KB) & ALAT BERAT (AB) BARU DAN BESARNYA PENDAPATAN BBN-KB I MENURUT WARNA PELAT NOMOR						PERSENTASE NILAI BBN-KB I TERHADAP HARGA KENDARAAN DAN ALAT BERAT PER UNIT (%)		
		PELAT HITAM		PELAT KUNING		PELAT MERAH		PELAT HITAM	PELAT KUNING	PELAT MERAH
		JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB I (Ribu Rupiah)	JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB I (Ribu Rupiah)	JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB I (Ribu Rupiah)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1. Bus	3420									
2. Minibus	3420									
3. Microbus	3420									
4. Truck	3430									
5. Pick-up	3430									
6. Ambulance	3440									
7. Station Wagon	3410									
8. Mobil pemadam	3440									
9. Sepeda motor	3510									
10. Kendaraan roda 3	3520									

- Kolom (2) s.d. Kolom (10) ≥ 0
- Jika salah satu Kolom (2) s.d. Kolom (10) terisi, maka kolom lainnya harus terisi



BLOK II. KETERANGAN MENGENAI KENDARAAN BERMOTOR DAN ALAT BERAT BARU DAN BESARNYA BBN-KB I PADA SAMSAT

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK IIA. KETERANGAN MENGENAI KENDARAAN BERMOTOR & ALAT BERAT BARU DAN BESARNYA BBN-KB I PADA SAMSAT SELAMA TAHUN 2021										
RINCIAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR (KB) DAN ALAT BERAT (AB)	Kode PMTB	JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR (KB) & ALAT BERAT (AB) BARU DAN BESARNYA PENDAPATAN BBN-KB I MENURUT WARNA PELAT NOMOR						PERSENTASE NILAI BBN-KB I TERHADAP HARGA KENDARAAN DAN ALAT BERAT PER UNIT (%)		
		PELAT HITAM		PELAT KUNING		PELAT MERAH		PELAT HITAM	PELAT KUNING	PELAT MERAH
		JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB I (Ribu Rupiah)	JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB I (Ribu Rupiah)	JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB I (Ribu Rupiah)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1. Bus	3420									
2. Minibus	3420									
3. Microbus	3420									
4. Truck	3430									
5. Pick-up	3430									
6. Ambulance	3440									
7. Station Wagon	3410									
8. Mobil pemadam	3440									
9. Sepeda motor	3510									
10. Kendaraan roda 3	3520									

- Jika Kolom (2) > 0, maka Kolom (3) > 0
- Jika Kolom (3) > 0, maka Kolom (2) > 0



BLOK II. KETERANGAN MENGENAI KENDARAAN BERMOTOR DAN ALAT BERAT BARU DAN BESARNYA BBN-KB I PADA SAMSAT

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK IIA. KETERANGAN MENGENAI KENDARAAN BERMOTOR & ALAT BERAT BARU DAN BESARNYA BBN-KB I PADA SAMSAT SELAMA TAHUN 2021										
RINCIAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR (KB) DAN ALAT BERAT (AB)	Kode PMTB	JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR (KB) & ALAT BERAT (AB) BARU DAN BESARNYA PENDAPATAN BBN-KB I MENURUT WARNA PELAT NOMOR						PERSENTASE NILAI BBN-KB I TERHADAP HARGA KENDARAAN DAN ALAT BERAT PER UNIT (%)		
		PELAT HITAM		PELAT KUNING		PELAT MERAH		PELAT HITAM	PELAT KUNING	PELAT MERAH
		JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB I (Ribu Rupiah)	JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB I (Ribu Rupiah)	JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB I (Ribu Rupiah)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1. Bus	3420									
2. Minibus	3420									
3. Microbus	3420									
4. Truck	3430									
5. Pick-up	3430									
6. Ambulance	3440									
7. Station Wagon	3410									
8. Mobil pemadam	3440									
9. Sepeda motor	3510									
10. Kendaraan roda 3	3520									

- Jika Kolom (4) > 0, maka Kolom (5) > 0
- Jika Kolom (5) > 0, maka Kolom (4) > 0



BLOK II. KETERANGAN MENGENAI KENDARAAN BERMOTOR DAN ALAT BERAT BARU DAN BESARNYA BBN-KB I PADA SAMSAT

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK IIA. KETERANGAN MENGENAI KENDARAAN BERMOTOR & ALAT BERAT BARU DAN BESARNYA BBN-KB I PADA SAMSAT SELAMA TAHUN 2021										
RINCIAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR (KB) DAN ALAT BERAT (AB)	Kode PMTB	JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR (KB) & ALAT BERAT (AB) BARU DAN BESARNYA PENDAPATAN BBN-KB I MENURUT WARNA PELAT NOMOR						PERSENTASE NILAI BBN-KB I TERHADAP HARGA KENDARAAN DAN ALAT BERAT PER UNIT (%)		
		PELAT HITAM		PELAT KUNING		PELAT MERAH		PELAT HITAM	PELAT KUNING	PELAT MERAH
		JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB I (Ribu Rupiah)	JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB I (Ribu Rupiah)	JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB I (Ribu Rupiah)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1. Bus	3420									
2. Minibus	3420									
3. Microbus	3420									
4. Truck	3430									
5. Pick-up	3430									
6. Ambulance	3440									
7. Station Wagon	3410									
8. Mobil pemadam	3440									
9. Sepeda motor	3510									
10. Kendaraan roda 3	3520									

- Jika Kolom (6) > 0, maka Kolom (7) > 0
- Jika Kolom (7) > 0, maka Kolom (6) > 0



BLOK II. KETERANGAN MENGENAI KENDARAAN BERMOTOR DAN ALAT BERAT BARU DAN BESARNYA BBN-KB I PADA SAMSAT

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK IIA. KETERANGAN MENGENAI KENDARAAN BERMOTOR & ALAT BERAT BARU DAN BESARNYA BBN-KB I PADA SAMSAT SELAMA TAHUN 2021										
RINCIAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR (KB) DAN ALAT BERAT (AB)	Kode PMTB	JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR (KB) & ALAT BERAT (AB) BARU DAN BESARNYA PENDAPATAN BBN-KB I MENURUT WARNA PELAT NOMOR						PERSENTASE NILAI BBN-KB I TERHADAP HARGA KENDARAAN DAN ALAT BERAT PER UNIT (%)		
		PELAT HITAM		PELAT KUNING		PELAT MERAH		PELAT HITAM	PELAT KUNING	PELAT MERAH
		JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB I (Ribu Rupiah)	JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB I (Ribu Rupiah)	JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB I (Ribu Rupiah)	(8)	(9)	(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				
1. Bus	3420									
2. Minibus	3420									
3. Microbus	3420									
4. Truck	3430									
5. Pick-up	3430									
6. Ambulance	3440									
7. Station Wagon	3410									
8. Mobil pemadam	3440									
9. Sepeda motor	3510									
10. Kendaraan roda 3	3520									

Kolom (8) s.d. Kolom (10) berada diantara rentang 0-100%



BLOK II. KETERANGAN MENGENAI KENDARAAN BERMOTOR DAN ALAT BERAT BARU DAN BESARNYA BBN-KB I PADA SAMSAT

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK IIA. KETERANGAN MENGENAI KENDARAAN BERMOTOR & ALAT BERAT BARU DAN BESARNYA BBN-KB I PADA SAMSAT SELAMA TAHUN 2021										
RINCIAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR (KB) DAN ALAT BERAT (AB)	Kode PMTB	JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR (KB) & ALAT BERAT (AB) BARU DAN BESARNYA PENDAPATAN BBN-KB I MENURUT WARNA PELAT NOMOR						PERSENTASE NILAI BBN-KB I TERHADAP HARGA KENDARAAN DAN ALAT BERAT PER UNIT (%)		
		PELAT HITAM		PELAT KUNING		PELAT MERAH		PELAT HITAM	PELAT KUNING	PELAT MERAH
		JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB I (Ribu Rupiah)	JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB I (Ribu Rupiah)	JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB I (Ribu Rupiah)	(8)	(9)	(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				
1. Bus	3420									
2. Minibus	3420									
3. Microbus	3420									
4. Truck	3430									
5. Pick-up	3430									
6. Ambulance	3440									
7. Station Wagon	3410									
8. Mobi										
9. Sepeda										
10. Kend										

Jika Kolom (3) > 0, maka Kolom (8) > 0

Perhatikan kewajaran harga setiap Kendaraan Bermotor/ Alat Berat, caranya:

$$\left(\frac{\text{Pendapatan BBN - KB I}}{\text{Persentase Nilai BBN - KB I terhadap Harga Kendaraan atau Alat Berat}} \times 100 \right)$$

Jumlah Kendaraan atau Alat Berat



BLOK II. KETERANGAN MENGENAI KENDARAAN BERMOTOR DAN ALAT BERAT BARU DAN BESARNYA BBN-KB I PADA SAMSAT

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK IIA. KETERANGAN MENGENAI KENDARAAN BERMOTOR & ALAT BERAT BARU DAN BESARNYA BBN-KB I PADA SAMSAT SELAMA TAHUN 2021									
RINCIAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR (KB) DAN ALAT BERAT (AB)	Kode PMTB	JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR (KB) & ALAT BERAT (AB) BARU DAN BESARNYA PENDAPATAN BBN-KB I MENURUT WARNA PELAT NOMOR					PERSENTASE NILAI BBN-KB I TERHADAP HARGA KENDARAAN DAN ALAT BERAT PER UNIT (%)		
		PELAT HITAM		PELAT KUNING		PELAT MERAH	PELAT HITAM	PELAT KUNING	PELAT MERAH
		JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB I (Ribu Rupiah)	JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB I (Ribu Rupiah)	JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB I (Ribu Rupiah)	(8)	(9)
1. Bus	3420								
2. Minibus	3420								
3. Microbus	3420								
4. Truck	3430								
5. Pick-up	3430								
6. Ambulance	3440								
7. Station Wagon	3410								
8. Mobil pemadam	3440								
9. Sepeda motor	3510								
10. Kendaraan roda 3	3520								

Jika Kolom (5) > 0, maka Kolom (9) > 0



BLOK II. KETERANGAN MENGENAI KENDARAAN BERMOTOR DAN ALAT BERAT BARU DAN BESARNYA BBN-KB I PADA SAMSAT

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK IIA. KETERANGAN MENGENAI KENDARAAN BERMOTOR & ALAT BERAT BARU DAN BESARNYA BBN-KB I PADA SAMSAT SELAMA TAHUN 2021										
RINCIAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR (KB) DAN ALAT BERAT (AB)	Kode PMTB	JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR (KB) & ALAT BERAT (AB) BARU DAN BESARNYA PENDAPATAN BBN-KB I MENURUT WARNA PELAT NOMOR						PERSENTASE NILAI BBN-KB I TERHADAP HARGA KENDARAAN DAN ALAT BERAT PER UNIT (%)		
		PELAT HITAM		PELAT KUNING		PELAT MERAH		PELAT HITAM	PELAT KUNING	PELAT MERAH
		JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB I (Ribu Rupiah)	JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB I (Ribu Rupiah)	JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB I (Ribu Rupiah)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1. Bus	3420									
2. Minibus	3420									
3. Microbus	3420									
4. Truck	3430									
5. Pick-up	3430									
6. Ambulance	3440									
7. Station Wagon	3410									
8. Mobil pemadam	3440									
9. Sepeda motor	3510									
10. Kendaraan roda 3	3520									

Jika Kolom (7) > 0, maka Kolom (10) >0



MASTER KODE PMTB



Kode PMTB	Deskripsi
3410	Mobil penumpang (sedan, SUV, MPV)
3420	Mobil bus (bus besar (36-60), bus sedang (17-35), bus kecil (9-16), articulated bus, double decker bus)
3430	Mobil barang/truk (pick up, truk engkel, truk besar, truk tronton, truk gandeng, truk sumbu, truk tempel)
3440	Kendaraan khusus di jalan raya (ambulance w/wo perlengkapan tindakan rumah sakit, kendaraan pemadam kebakaran)
3450	Kendaraan khusus tidak di jalan raya (mobil lapangan golf, mobil di dalam bandara)
3510	Kendaraan bermotor roda 2
3520	Kendaraan bermotor roda 3



BLOK III. KETERANGAN MENGENAI KENDARAAN BERMOTOR DAN ALAT BERAT BEKAS DAN BESARNYA BBN-KB II PADA SAMSAT

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK IIIA. KETERANGAN MENGENAI KENDARAAN BERMOTOR & ALAT BERAT BEKAS DAN BESARNYA BBN-KB II PADA SAMSAT SELAMA TAHUN 2021										
RINCIAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR (KB) DAN ALAT BERAT (AB)	Kode PMTB	JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR (KB) & ALAT BERAT (AB) BEKAS DAN BESARNYA PENDAPATAN BBN-KB II MENURUT WARNA PELAT NOMOR						PERSENTASE NILAI BBN-KB II TERHADAP HARGA KENDARAAN DAN ALAT BERAT PER UNIT (%)		
		PELAT HITAM		PELAT KUNING		PELAT MERAH		PELAT HITAM	PELAT KUNING	PELAT MERAH
		JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB II (Ribu Rupiah)	JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB II (Ribu Rupiah)	JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB II (Ribu Rupiah)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1. Bus	3420									
2. Minibus	3420									
3. Microbus	3420									
4. Truck	3430									
5. Pick-up	3430									
6. Ambulance	3440									
7. Station Wagon	3410									
8. Mobil pemadam	3440									
9. Sepeda motor	3510									
10. Kendaraan roda 3	3520									

Isikan semua jenis kendaraan bermotor dan alat berat bekas karena mutasi atau balik nama, bukan dari pembelian kendaraan/alat berat baru. Jika data jenis kendaraan dan alat berat berbeda dengan rincian pada kolom ini, tuliskan jenis kendaraan bermotor dan alat berat sesuai dengan klasifikasi data yang tersedia pada baris berikutnya

BBN-KB II adalah **bea balik nama** atas **perubahan kepemilikan** kendaraan **dari pemilik pertama ke tangan pemilik kedua** dan seterusnya dari dasar jual beli dan hibah kendaraan.



BLOK III. KETERANGAN MENGENAI KENDARAAN BERMOTOR DAN ALAT BERAT BEKAS DAN BESARNYA BBN-KB II PADA SAMSAT

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK IIIA. KETERANGAN MENGENAI KENDARAAN BERMOTOR & ALAT BERAT BEKAS DAN BESARNYA BBN-KB II PADA SAMSAT SELAMA TAHUN 2021										
RINCIAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR (KB) DAN ALAT BERAT (AB)	Kode PMTB	JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR (KB) & ALAT BERAT (AB) BEKAS DAN BESARNYA PENDAPATAN BBN-KB II MENURUT WARNA PELAT NOMOR						PERSENTASE NILAI BBN-KB II TERHADAP HARGA KENDARAAN DAN ALAT BERAT PER UNIT (%)		
		PELAT HITAM		PELAT KUNING		PELAT MERAH		PELAT HITAM	PELAT KUNING	PELAT MERAH
		JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB II (Ribu Rupiah)	JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB II (Ribu Rupiah)	JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB II (Ribu Rupiah)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1. Bus	3420									
2. Minibus	3420									
3. Microbus	3420									
4. Truck	3430									
5. Pick-up	3430									
6. Ambulance	3440									
7. Station Wagon	3410									
8. Mobil pemadam	3440									
9. Sepeda motor	3510									
10. Kendaraan roda 3	3520									

- Kolom (2) s.d. Kolom (10) ≥ 0
- Jika salah satu Kolom (2) s.d. Kolom (10) terisi, maka kolom lainnya harus terisi



BLOK III. KETERANGAN MENGENAI KENDARAAN BERMOTOR DAN ALAT BERAT BEKAS DAN BESARNYA BBN-KB II PADA SAMSAT

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK IIIA. KETERANGAN MENGENAI KENDARAAN BERMOTOR & ALAT BERAT BEKAS DAN BESARNYA BBN-KB II PADA SAMSAT SELAMA TAHUN 2021										
RINCIAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR (KB) DAN ALAT BERAT (AB)	Kode PMTB	JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR (KB) & ALAT BERAT (AB) BEKAS DAN BESARNYA PENDAPATAN BBN-KB II MENURUT WARNA PELAT NOMOR						PERSENTASE NILAI BBN-KB II TERHADAP HARGA KENDARAAN DAN ALAT BERAT PER UNIT (%)		
		PELAT HITAM		PELAT KUNING		PELAT MERAH		PELAT HITAM	PELAT KUNING	PELAT MERAH
		JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB II (Ribu Rupiah)	JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB II (Ribu Rupiah)	JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB II (Ribu Rupiah)	(8)	(9)	(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				
1. Bus	3420									
2. Minibus	3420									
3. Microbus	3420									
4. Truck	3430									
5. Pick-up	3430									
6. Ambulance	3440									
7. Station Wagon	3410									
8. Mobil pemadam	3440									
9. Sepeda motor	3510									
10. Kendaraan roda 3	3520									

Kolom (8) s.d. Kolom (10) berada dalam rentang 0-100%



BLOK III. KETERANGAN MENGENAI KENDARAAN BERMOTOR DAN ALAT BERAT BEKAS DAN BESARNYA BBN-KB II PADA SAMSAT

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK IIIA. KETERANGAN MENGENAI KENDARAAN BERMOTOR & ALAT BERAT BEKAS DAN BESARNYA BBN-KB II PADA SAMSAT SELAMA TAHUN 2021										
RINCIAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR (KB) DAN ALAT BERAT (AB)	Kode PMTB	JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR (KB) & ALAT BERAT (AB) BEKAS DAN BESARNYA PENDAPATAN BBN-KB II MENURUT WARNA PELAT NOMOR						PERSENTASE NILAI BBN-KB II TERHADAP HARGA KENDARAAN DAN ALAT BERAT PER UNIT (%)		
		PELAT HITAM		PELAT KUNING		PELAT MERAH		PELAT HITAM	PELAT KUNING	PELAT MERAH
		JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB II (Ribu Rupiah)	JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB II (Ribu Rupiah)	JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB II (Ribu Rupiah)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1. Bus	3420									
2. Minibus	3420									
3. Microbus	3420									
4. Truck	3430									
5. Pick-up	3430									
6. Ambulance	3440									
7. Station Wagon	3410									
8. Mobil pemadam	3440									
9. Sepeda motor	3510									
10. Kendaraan roda 3	3520									

Jika Kolom (3) > 0, maka Kolom (8) > 0



BLOK III. KETERANGAN MENGENAI KENDARAAN BERMOTOR DAN ALAT BERAT BEKAS DAN BESARNYA BBN-KB II PADA SAMSAT

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK IIIA. KETERANGAN MENGENAI KENDARAAN BERMOTOR & ALAT BERAT BEKAS DAN BESARNYA BBN-KB II PADA SAMSAT SELAMA TAHUN 2021										
RINCIAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR (KB) DAN ALAT BERAT (AB)	Kode PMTB	JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR (KB) & ALAT BERAT (AB) BEKAS DAN BESARNYA PENDAPATAN BBN-KB II MENURUT WARNA PELAT NOMOR						PERSENTASE NILAI BBN-KB II TERHADAP HARGA KENDARAAN DAN ALAT BERAT PER UNIT (%)		
		PELAT HITAM		PELAT KUNING		PELAT MERAH		PELAT HITAM	PELAT KUNING	PELAT MERAH
		JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB II (Ribu Rupiah)	JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB II (Ribu Rupiah)	JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB II (Ribu Rupiah)	(8)	(9)	(10)
1. Bus	3420									
2. Minibus	3420									
3. Microbus	3420									
4. Truck	3430									
5. Pick-up	3430									
6. Ambulance	3440									
7. Station Wagon	3410									
8. Mobil pemadam	3440									
9. Sepeda motor	3510									
10. Kendaraan roda 3	3520									

Jika Kolom (5) > 0, maka Kolom (9) > 0



BLOK III. KETERANGAN MENGENAI KENDARAAN BERMOTOR DAN ALAT BERAT BEKAS DAN BESARNYA BBN-KB II PADA SAMSAT

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK IIIA. KETERANGAN MENGENAI KENDARAAN BERMOTOR & ALAT BERAT BEKAS DAN BESARNYA BBN-KB II PADA SAMSAT SELAMA TAHUN 2021										
RINCIAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR (KB) DAN ALAT BERAT (AB)	Kode PMTB	JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR (KB) & ALAT BERAT (AB) BEKAS DAN BESARNYA PENDAPATAN BBN-KB II MENURUT WARNA PELAT NOMOR						PERSENTASE NILAI BBN-KB II TERHADAP HARGA KENDARAAN DAN ALAT BERAT PER UNIT (%)		
		PELAT HITAM		PELAT KUNING		PELAT MERAH		PELAT HITAM	PELAT KUNING	PELAT MERAH
		JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB II (Ribu Rupiah)	JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB II (Ribu Rupiah)	JML KB & AB (Unit)	PENDAPATAN BBN-KB II (Ribu Rupiah)			
1. Bus	3420									
2. Minibus	3420									
3. Microbus	3420									
4. Truck	3430									
5. Pick-up	3430									
6. Ambulance	3440									
7. Station Wagon	3410									
8. Mobil pemadam	3440									
9. Sepeda motor	3510									
10. Kendaraan roda 3	3520									

Jika Kolom (7) > 0, maka Kolom (10) > 0



BLOK IV. CATATAN

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK IV. CATATAN

Harap ditulis jika ada hal-hal khusus berkaitan dengan data instansi

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan-keterangan penting yang diperlukan, **terutama cakupan data yang dimiliki oleh instansi/dinas.**



BLOK V. KETERANGAN PEMBERI INFORMASI

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK V. KETERANGAN PEMBERI INFORMASI					
1. Nama Pemberi Informasi			4. Tanda Tangan dan Cap Instansi		
2. Jabatan					
3. Nomor Telepon/HP					
Harus Terisi					

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan pemberi informasi. Tuliskan nama, jabatan, nomor telepon/HP, dan tanda tangan pemberi informasi serta cap instansi



BLOK VI. KETERANGAN PETUGAS

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK VI. KETERANGAN PETUGAS			
1. Nama Pencacah		1. Nama Pengawas	
2. Tanggal Pencacahan		2. Tanggal Pengawasan	
3. Tanda Tangan		3. Tanda Tangan	

Isikan **tanggal** pada saat melakukan **pencacahan** dan **pengawasan** dengan format **DD-MM-YYYY**

Tuliskan nama pencacah, tanggal pencacahan, dan tanda tangan pencacah. Selanjutnya kuesioner diserahkan pada pengawas untuk diperiksa kelengkapan dan konsistensi isiannya. Tuliskan nama pengawas, tanggal pengawasan, dan tanda tangan pengawas untuk memastikan bahwa semua isian sudah benar.

Rule Validasi

- Semua rincian harus terisi
- Nama pencacah dan pengawas tidak boleh sama
- Tanggal pencacahan \leq tanggal pengawasan
- Tanggal pencacahan dan tanggal pengawasan tidak melebihi bulan Agustus 2022



EVALUASI ISIAN BLOK II



- Evaluasi dilakukan **untuk menjaga konsistensi** nilai PMTB Kendaraan Level Provinsi dengan Level Kabupaten/Kota yang ada di provinsi tersebut, baik secara total maupun menurut jenis kendaraan
- Formula penghitungan PMTB **Kendaraan Baru**:

$$PMTB\ Kendaraan_i = \left[\frac{\frac{Rasio\ PMTB_{hitam,i} \times BBNKBI_{hitam,i}}{(Persentase\ BBNKBI_{hitam,i})}}{100} + BBNKBI_{hitam,i} \right] + \left[\frac{\frac{BBNKBI_{kuning,i}}{(Persentase\ BBNKBI_{kuning,i})}}{100} + BBNKBI_{kuning,i} \right] + \left[\frac{\frac{BBNKBI_{merah,i}}{(Persentase\ BBNKBI_{merah,i})}}{100} + BBNKBI_{merah,i} \right]$$

$$PMTB\ Kendaraan_{prov,i,t} = \sum_{n=1}^s PMTB\ Kendaraan_{kabkot\ n,i,t}$$



EVALUASI ISIAN BLOK II



Data Jumlah Kendaraan Bermotor & Alat Berat di Prov. X, 2020

Evaluasi

- Jumlah kendaraan provinsi **harus sama dengan** total jumlah kendaraan kabupaten/kota di provinsi tersebut
- Redaksi isian jenis kendaraan rincian **perlu diseragamkan** di provinsi dan kabupaten/kota dalam provinsi tersebut disepakati penulisannya untuk memudahkan proses pengolahan dan tabulasi

Jenis Kendaraan	Pelat Hitam		Pelat Kuning		Pelat Merah	
	Prov	Kab/Kot	Prov	Kab/Kot	Prov	Kab/Kot
AERIAL WORK PLATFORM		0		0		2
ALAT BERAT	41	16.425	133	629	1	348
AMBULANCE	519	1.301	133	103	1.610	1.677
ARM ROLL	25	0	0	2	3	3
BAK BESI	1	2	0	0	0	0
BAK KAYU		3		0		0
BILD VAN (ANGKUTAN BARANG)		4		0		0
BLIN VAN		13		0		1
BLIN VAN(ANG BARANG)		2		0		0



EVALUASI ISIAN BLOK II



Evaluasi

- Untuk memudahkan evaluasi kewajaran jumlah kendaraan, pendapatan BBNKB I, dan persentase BBNKB I dapat dilakukan dengan cara menghitung kewajaran harga kendaraan.
- Perhatikan **penulisan digit** – apakah harga ambulance senilai Rp 4 miliar atau Rp 400 juta?

Estimasi Harga Ambulance di Prov. X, 2020 (Ribu Rupiah)

Kabupaten	Data Survei Penyusunan Disagregasi PMTB		
	Pelat Hitam (ribu)	Pelat Kuning (ribu)	Pelat Merah (ribu)
00	155,188	177,737	0
08	4,413,265	0	123,731
09	0	0	0
15	0	0	0
24	0	0	0
27	0	0	0
74	0	0	0



EVALUASI ISIAN BLOK II



Estimasi Harga Kendaraan Bermotor & Alat Berat di Prov. X, 2020 (Ribu Rupiah)

Evaluasi

- Untuk memudahkan evaluasi kewajaran jumlah kendaraan, pendapatan BBNKB I, dan persentase BBNKB I dapat dilakukan dengan cara menghitung kewajaran harga kendaraan.
- Perhatikan **kewajaran harga** – apakah benar harga ambulance sebesar Rp 2,7 – 3,4 miliar?

Jenis Kendaraan	Data Survei Penyusunan Disagregasi PMTB		
	Pelat Hitam (ribu)	Pelat Kuning (ribu)	Pelat Merah (ribu)
AERIAL WORK PLATFORM	0	0	204.875
ALAT BERAT	825.393	279.942	496.525
AMBULANCE	3.436.929	2.755.134	9.278.233
ARM ROLL	39.760.000	120.833.333	643.546.875
BAK BESI	118.123.250	0	0
BAK KAYU	143.555	0	0
BESTEL WAGON	776	0	0
BILD VAN (ANGKUTAN BARANG)	151.737	0	0
BLIN VAN	110.383	0	21.400

$$Harga\ Kendaraan_{Kuning,i} = \frac{BBNKB_{kuning,i}}{\left(\frac{Persentase\ BBNKB_{kuning,i}}{100} \right) \times JKB_{kuning,i}}$$



EVALUASI ISIAN BLOK II



Evaluasi

- Isian nilai presentase BBNKB-I adalah berdasarkan pergub masing-masing provinsi
- Presentase Nilai BBNKB I adalah **lebih dari 0% dan kurang dari sama dengan 20%**

Rata-rata Presentase Nilai BBNKB-I Terhadap Harga Kendaraan & Alat Berat di Prov. X, 2020 (Ribu Rupiah)

Jenis Kendaraan	Data Survei Penyusunan Disagregasi PMTB		
	Pelat Hitam (%)	Pelat Kuning (%)	Pelat Merah (%)
ALAT BERAT	0	0	0
AMBULANCE	4	4	33
BLIND VAN	100	0	0
BUS	10	20	4
CONCREE DUMP	0	0	0
CRANE	12	0	22
DOUBLE CABIN	33	0	0
DUMP TRUCK	24	10	0
JEEP	41	4	0
KENDARAAN RODA 3	33	0	4
MICROBUS	24	10	5
MIKROLET	0	0	0
MINIBUS	23	2	5



EVALUASI ISIAN BLOK II

Rata-rata Presentase Nilai BBNKB-I Terhadap Harga Kendaraan & Alat Berat di Prov. X, 2020 (Ribu Rupiah)

Evaluasi

- Kabupaten-kabupaten di provinsi yang sama nilai BBNKB I-nya seragam karena mengacu pada Pergub yang sama

Kabupaten	Data Survei Penyusunan Disagregasi PMTB		
	Pelat Hitam (%)	Pelat Kuning (%)	Pelat Merah (%)
00	13	13	13
08	0	100	0
09	12	12	0
27	13	13	0
74	11	2	5



CONTOH PERGUB TENTANG BBNKB

Provinsi Jawa Barat



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 02 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 33
TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
UNTUK JENIS PUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOtor DAN BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOtor

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

21. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Tarif BBNKB ditetapkan sebagai berikut:

a. Tarif BBNKB atas penyerahan pertama, ditetapkan sebesar:

1. 12,5% (dua belas koma lima persen) untuk kendaraan bermotor orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri;
2. 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor listrik roda 4 (empat) atau lebih;
3. 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar;

23

4. 15% (lima belas persen) untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) dengan kapasitas isi silinder 250 cc atau lebih;

5. 12,5% (dua belas koma lima persen) untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) dengan kapasitas isi silinder di bawah 250 cc; dan

6. 2,5% (dua koma lima persen) untuk kendaraan bermotor listrik roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga).

b. Tarif BBNKB atas penyerahan kedua dan seterusnya ditetapkan sebesar:

1. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, TNI dan Polri, termasuk milik pribadi atau lembaga sosial dan lembaga keagamaan;
2. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang atau barang;
3. 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.



CONTOH PERGUB TENTANG BBNKB

Provinsi Jawa Timur



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2001
TENTANG
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR

Pasal 8

- (1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar:
 - a. 10 % (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum ;
 - b. 10 % (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor umum ;
 - c. 3 % (tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

- (2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan ke dua dan selanjutnya ditetapkan sebesar:
 - a. 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum ;
 - b. 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum ;
 - c. 0.3 % (nol koma tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.



CONTOH PERGUB TENTANG BBNKB

Provinsi Kalimantan Timur



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 22 TAHUN 2008

TENTANG

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Pasal 8

- (1) Tarif BBNKB atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar :
 - a. 10 % (sepuluh persen) untuk Kendaraan Bermotor bukan umum;
 - b. 10 % (sepuluh persen) untuk Kendaraan Bermotor umum;
 - c. 3 % (tiga persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) Tarif BBNKB atas penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar :
 - a. 1 % (satu persen) untuk Kendaraan Bermotor bukan umum;
 - b. 1 % (satu persen) untuk Kendaraan Bermotor umum;
 - c. 0,3 % (nol koma tiga persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.



CONTOH PERGUB TENTANG BBNKB

Provinsi Papua Barat



GUBERNUR PAPUA BARAT

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA BARAT,

Pasal 8

- (1) Tarif BBN-KB adalah sebagai berikut:
- tarif 10% (sepuluh persen) adalah penyerahan pertama pada semua jenis kendaraan bermotor yang baru;
 - tarif 1% (satu persen) adalah penyerahan kedua dan seterusnya termasuk penyerahan kendaraan bermotor lelang/dump, pribadi, umum, hibah dan waris;
 - tarif 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) adalah penyerahan pertama untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar; dan
 - tarif 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen) adalah penyerahan kedua dan seterusnya untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar.

4.6

PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER (PMTB22-KAPAL (PERHUBUNGAN) MI-06A) (PMTB22-KAPAL (KELAUTAN) MI-06B)





STRUKTUR KUESIONER

BLOK I

KETERANGAN UMUM

BLOK II

KETERANGAN JUMLAH DAN PENAMBAHAN KAPAL MENURUT FUNGSI

BLOK III

KETERANGAN JUMLAH DAN PENAMBAHAN KAPAL MENURUT UKURAN

BLOK IV

CATATAN

BLOK V

KETERANGAN PEMBERI INFORMASI

BLOK VI

KETERANGAN PETUGAS



BLOK I. KETERANGAN UMUM

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK I. KETERANGAN UMUM

1. Provinsi

2. Kabupaten/Kota*)

3. Nomor Urut Instansi

4. Nama Instansi

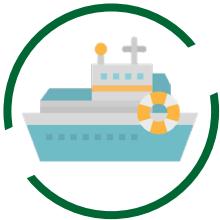
5. Alamat Instansi

DINAS KELAUTAN
DINAS PERHUBUNGAN

Isikan **nomor urut instansi**
3 digit sesuai dengan
daftar PMTB22-DSDINAS

Isikan **alamat instansi** beserta **nomor**
telepon dengan lengkap dan jelas.

Isikan **nama dan kode provinsi kabupaten/kota**
Untuk instansi tingkat provinsi, isikan 00 pada
kode kabupaten/kota.



BLOK II. KETERANGAN JUMLAH DAN PENAMBAHAN KAPAL MENURUT FUNGSI

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

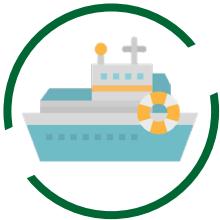
BLOK VI

BLOK IIA. KETERANGAN JUMLAH DAN PENAMBAHAN KAPAL MENURUT FUNGSI SELAMA TAHUN 2021					
Jenis Kapal	Kode PMTB	Jumlah Kapal pada 1 Januari 2021 (Unit)	Penambahan Kapal selama 2021 (Unit)	Harga Kapal/unit (Ribu Rupiah)	Biaya Pemindahan Kepemilikan dan Izin Operasional Kapal (Ribu Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kapal Nelayan/Perahu Penangkap Ikan	3219				
2. Kapal Penangkap Ikan (<i>Fishing Vessel</i>)					
3. Kapal Kargo (<i>Container Ship</i>)					
4. Kapal Kargo/Kapal Barang (<i>Cargo Ships</i>)					
5. Kapal Penumpang (<i>Ferry</i>)					

Kapal yang dicatat adalah kapal **usaha atau yang dimiliki perusahaan di suatu wilayah.**

Data harga kapal diperoleh dari **sumber lain** (perusahaan, dll.) dan informasi narasumber ditulis di Blok Catatan. Rata-rata harga kapal per unit merupakan harga konsumen yang sudah mencakup biaya pemindahan kepemilikan.

Isikan total biaya pemindahan kepemilikan dan ijin operasional kapal yang dibayarkan oleh pemilik kapal kepada OPD/instansi terkait.



BLOK II. KETERANGAN JUMLAH DAN PENAMBAHAN KAPAL MENURUT FUNGSI

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK IIA. KETERANGAN JUMLAH DAN PENAMBAHAN KAPAL MENURUT FUNGSI SELAMA TAHUN 2021					
Jenis Kapal (1)	Kode PMTB 3219	Jumlah Kapal pada 1 Januari 2021 (Unit) (2)	Penambahan Kapal selama 2021 (Unit) (3)	Harga Kapal/unit (Ribu Rupiah) (4)	Biaya Pemindahan Kepemilikan dan Izin Operasional Kapal (Ribu Rupiah) (5)
1. Kapal Nelayan/Perahu Penangkap Ikan	3280				
2. Kapal Penangkap Ikan (<i>Fishing Vessel</i>)	3230				
3. Kapal Kargo (<i>Container Ship</i>)	3230				
4. Kapal Kargo/Kapal Barang (<i>Cargo Ships</i>)	3210				
5. Kapal Penumpang (<i>Ferry</i>)					

Kode PMTB adalah 4 digit kode unik jenis barang yang menjadi PMTB. Kuesioner MI-06A dan MI-06B terdapat rule validasi dimana kode PMTB untuk jenis kapal harus diantara kode pada tabel Master Kode PMTB

Diisi sesuai kode PMTB pada Tabel Master Kode PMTB



BLOK II. KETERANGAN JUMLAH DAN PENAMBAHAN KAPAL MENURUT FUNGSI

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

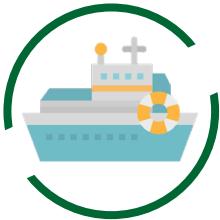
BLOK V

BLOK VI

BLOK IIA. KETERANGAN JUMLAH DAN PENAMBAHAN KAPAL MENURUT FUNGSI SELAMA TAHUN 2021

Jenis Kapal (1)	Kode PMTB	Jumlah Kapal pada 1 Januari 2021 (Unit) (2)	Penambahan Kapal selama 2021 (Unit) (3)	Harga Kapal/unit (Ribu Rupiah) (4)	Biaya Pemindahan Kepemilikan dan Izin Operasional Kapal (Ribu Rupiah) (5)
1. Kapal Nelayan/Perahu Penangkap Ikan	3219				
2. Kapal Penangkap Ikan (<i>Fishing Vessel</i>)	3280				
3. Kapal Kargo (<i>Container Ship</i>)	3230				
4. Kapal Kargo/Kapal Barang (<i>Cargo Ships</i>)	3230				
5. Kapal Penumpang (<i>Ferry</i>)	3210				

- Jika salah satu Kolom (2) s.d. Kolom (5) terisi, maka kolom lainnya harus terisi minimal 0
- Jika terdapat baris tambahan (Rincian (9), dst.), maka Kolom (2) s.d. Kolom (5) harus terisi



BLOK II. KETERANGAN JUMLAH DAN PENAMBAHAN KAPAL MENURUT FUNGSI

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

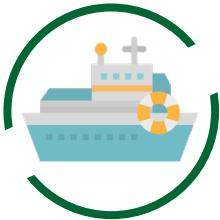
BLOK V

BLOK VI

BLOK IIA. KETERANGAN JUMLAH DAN PENAMBAHAN KAPAL MENURUT FUNGSI SELAMA TAHUN 2021

Jenis Kapal (1)	Kode PMTB (2)	Jumlah Kapal pada 1 Januari 2021 (Unit) (2)	Penambahan Kapal selama 2021 (Unit) (3)	Harga Kapal/unit (Ribu Rupiah) (4)	Biaya Pemindahan Kepemilikan dan Izin Operasional Kapal (Ribu Rupiah) (5)
1. Kapal Nelayan/Perahu Penangkap Ikan	3219				
2. Kapal Penangkap Ikan (<i>Fishing Vessel</i>)	3280				
3. Kapal Kargo (<i>Container Ship</i>)	3230				
4. Kapal Kargo/Kapal Barang (<i>Cargo Ships</i>)	3230				
5. Kapal Penumpang (<i>Ferry</i>)	3210				

Jika Kolom (3)>0, Kolom (4)>0



BLOK III. KETERANGAN JUMLAH DAN PENAMBAHAN KAPAL MENURUT UKURAN

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

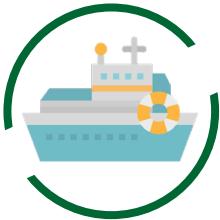
BLOK IIIA. KETERANGAN JUMLAH DAN PENAMBAHAN KAPAL MENURUT UKURAN SELAMA TAHUN 2021

Jenis Kapal (1)	Kode PMTB (2)	Jumlah Kapal pada 1 Januari 2021 (Unit) (3)	Penambahan Kapal selama 2021 (Unit) (4)	Harga Kapal/unit (Ribu Rupiah) (5)	Biaya Pemindahan Kepemilikan dan Izin Operasional Kapal (Ribu Rupiah) (6)
- Pengukuran <i>Grosstonnage</i> (Tonase Kotor) didasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 8 Tahun 2013 tentang Pengukuran Kapal. - Pengelompokan tonase kotor berdasarkan Statistik Perikanan Indonesia dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.	3210	3210	3210	3210	3210

- Pengukuran *Grosstonnage* (Tonase Kotor) didasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 8 Tahun 2013 tentang Pengukuran Kapal.
- Pengelompokan tonase kotor berdasarkan Statistik Perikanan Indonesia dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Data harga kapal diperoleh dari **sumber lain** (perusahaan, dll.) dan informasi narasumber ditulis di Blok Catatan. Rata-rata harga kapal per unit merupakan harga konsumen yang sudah mencakup biaya pemindahan kepemilikan.

Isikan total biaya pemindahan kepemilikan dan ijin operasional kapal yang dibayarkan oleh pemilik kapal kepada OPD/instansi terkait pada tahun 2020.



BLOK III. KETERANGAN JUMLAH DAN PENAMBAHAN KAPAL MENURUT UKURAN

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

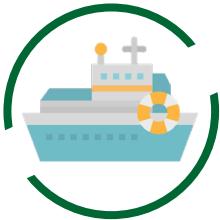
BLOK V

BLOK VI

BLOK IIIA. KETERANGAN JUMLAH DAN PENAMBAHAN KAPAL MENURUT UKURAN SELAMA TAHUN 2021

Jenis Kapal (1)	Kode PMTB (2)	Jumlah Kapal pada 1 Januari 2021 (Unit) (2)	Penambahan Kapal selama 2021 (Unit) (3)	Harga Kapal/unit (Ribu Rupiah) (4)	Biaya Pemindahan Kepemilikan dan Izin Operasional Kapal (Ribu Rupiah) (5)
1. Perahu Tanpa Motor	3219				
a. Jukung	3219				
b. Perahu Papan	3219				
2. Perahu / Kapal Motor					
a. Motor Tempel					
b. Kapal Motor < 5 GT					
c. Kapal Motor 5 – 10 GT					
d. Kapal Motor 11 – 20 GT					
e. Kapal Motor 21 – 30 GT					

- Jika salah satu Kolom (2) s.d. Kolom (5) terisi, maka kolom lainnya harus terisi
- Jika terdapat baris tambahan (Rincian (3), dst.), maka Kolom (2) s.d. Kolom (5) harus terisi



BLOK III. KETERANGAN JUMLAH DAN PENAMBAHAN KAPAL MENURUT UKURAN

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

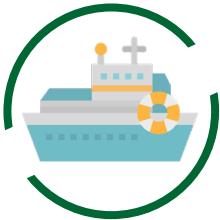
BLOK VI

BLOK IIIA. KETERANGAN JUMLAH DAN PENAMBAHAN KAPAL MENURUT UKURAN SELAMA TAHUN 2021

Jenis Kapal (1)	Kode PMTB (2)	Jumlah Kapal pada 1 Januari 2021 (Unit) (3)	Penambahan Kapal selama 2021 (Unit) (4)	Harga Kapal/unit (Ribu Rupiah) (5)	Biaya Pemindahan Kepemilikan dan Izin Operasional Kapal (Ribu Rupiah)
1. Perahu Tanpa Motor	3219				
a. Jukung	3219				
b. Perahu Papan	3219				
2. Perahu / Kapal Motor	3280				
a. Motor Tempel	3280				
b. Kapal Motor < 5 GT	3280				
c. Kapal Motor 5 – 10 GT	3280				
d. Kapal Motor 11 – 20 GT	3280				

Rata-rata tertimbang:

$$b3ar1k4 = \frac{(b3ar1ak3 \times b3ar1ak4) + (b3ar1bk3 \times b3ar1bk4)}{b3ar1ak3 + b3ar1bk3}$$



BLOK III. KETERANGAN JUMLAH DAN PENAMBAHAN KAPAL MENURUT UKURAN

BLOK I

BLOK II

BLOK III

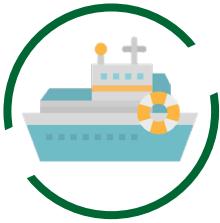
BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK IIIA. KETERANGAN JUMLAH DAN PENAMBAHAN KAPAL MENURUT UKURAN SELAMA TAHUN 2021

Jenis Kapal (1)	Kode PMTB (2)	Jumlah Kapal pada 1 Januari 2021 (Unit) (3)	Penambahan Kapal selama 2021 (Unit) (4)	Harga Kapal/unit (Ribu Rupiah) (5)	Biaya Pemindahan Kepemilikan dan Izin Operasional Kapal (Ribu Rupiah) (6)
1. Perahu Tanpa Motor	3219				Nilai pada baris Rincian (1) merupakan hasil penjumlahan baris Rincian (1a) dan (1b)
a. Jukung	3219				
b. Perahu Papan	3219				
2. Perahu / Kapal Motor	3280				Nilai pada baris Rincian (2) merupakan hasil penjumlahan baris Rincian (2a s.d. 2l)
a. Motor Tempel	3280				
b. Kapal Motor < 5 GT	3280				
c. Kapal Motor 5 – 10 GT	3280				
d. Kapal Motor 11 – 20 GT	3280				
e. Kapal Motor 21 – 30 GT	3280				



BLOK IV. KETERANGAN LUAS LAHAN TAMBAK (KHUSUS KUESIONER MI-06B)

BLOK I

BLOK II

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

Tambak adalah lahan yang dipergunakan untuk memelihara ikan, udang, atau binatang air lainnya. Letak tambak ini tidak jauh dari laut dan airnya asin atau payau.

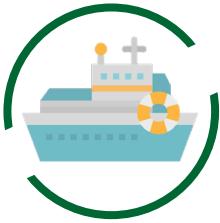
BLOK IV. KETERANGAN LUAS LAHAN TAMBAK TAHUN 2017-2021 (Hektare atau Ha)				
Tahun	Luas Lahan Tambak pada Awal Tahun	Penambahan Luas Lahan selama Setahun	Penutupan Lahan selama Setahun	Luas Lahan Tambak pada Akhir Tahun
(1) 2017	(2)	(3)	(4)	(5)
2018	Isikan luas lahan tambak pada awal tahun dalam satuan hektar.	Isikan luas penambahan lahan tambak selama setahun dalam satuan hektar.	Isikan luas penutupan lahan tambak selama setahun dalam satuan hektar.	Isikan luas lahan tambak pada akhir tahun dalam satuan hektar.
2019				
2020				
2021				



MASTER KODE PMTB



Kode PMTB	Deskripsi
3210	Kapal penumpang (ferry)
3219	Perahu penangkap ikan
3220	Kapal pesiar (cruise ship)
3230	Kapal barang (tanker, car carrier ship, container ship, bulk carrier, cargo ships, platform supply vessel)
3240	Kapal untuk kegiatan khusus selain pertambangan (shipboard fires, diving support vessel, cable ship, dredging, crane vessel, research vessel, harbor tugs, tugboat, heavy lift ship)
3250	Kapal kegiatan pertambangan (drillingship, floating production, storage and offloading vessel (FPSO))
3260	Tongkang (barge, hopper barge)
3270	Kapal militer (warship, submarine, landing craft)
3280	Kapal penangkap ikan (fishing vessel) dilengkapi dengan pengolah atau tanpa pengolah
3290	Sailing ship (kano, kayak, dan perahu karet)



PENEGASAN PMTB22-KAPAL (PERHUBUNGAN) dan PMTB22-KAPAL (KELAUTAN)



Jumlah kapal dan penambahan kapal yang dicatat adalah **kapal usaha yang dimiliki nelayan/usaha/perusahaan di suatu wilayah kabupaten/kota/provinsi** bukan kapal yang singgah atau beroperasi di Pelabuhan yang ada di kabupaten/kota/provinsi tersebut (bukan berasal dari Simmopel)



EVALUASI ISIAN BLOK II



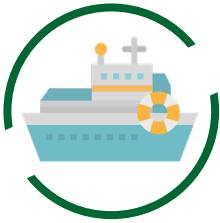
- Evaluasi dilakukan **untuk menjaga konsistensi** nilai PMTB Kapal Level Provinsi dengan Level Kabupaten/Kota yang ada di provinsi tersebut, baik secara total maupun menurut jenis kapal
- PMTB Kapal Perhubungan dihitung menggunakan isian blok IIA (Kapal menurut fungsi), sedangkan PMTB Kapal Kelautan dihitung menggunakan isian blok III (Kapal menurut ukuran)
- Formula penghitungan PMTB Kapal:

$$PMTB \text{ Kapal Perhubungan}_{i,t} = (Penambahan \text{ Kapal}_{i,t} \times Biaya_{i,t}) + \text{Biaya Operasional}$$

$$PMTB \text{ Kapal Perhubungan}_{prov,i,t} = \sum_{n=1}^s PMTB \text{ Kapal Perhubungan}_{kabkot\,n,i,t}$$

$$PMTB \text{ Kapal Kelautan}_{i,t} = (Penambahan \text{ Kapal}_{i,t} \times Biaya_{i,t}) + \text{Biaya Operasional}$$

$$PMTB \text{ Kapal Kelautan}_{prov,i,t} = \sum_{n=1}^s PMTB \text{ Kapal Kelautan}_{kabkot\,n,i,t}$$



EVALUASI ISIAN BLOK II



Evaluasi

- Redaksi isian jenis kapal rincian di provinsi dan kabupaten/kota dalam provinsi tersebut perlu diseragamkan penulisannya untuk memudahkan proses pengolahan dan tabulasi

Data Jumlah Penambahan Kapal Menurut Provinsi di Prov. X, 2020
(Unit)

Data Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2021

Jenis Kapal	Prov	Kab/Kot
KAPAL NELAYAN/PERAHU PENANGKAP IKAN	73	5021
KAPAL OIL TANKER	0	
KAPAL PENANGKAP IKAN (FISHING VESSEL)	8	507
KAPAL PENGGERUKAN (DREDGING)	0	0
KAPAL PENUMPANG	1	
KAPAL PENUMPANG (FERRY)	3	55
KAPAL PENUMPANG (KAYU)	0	0
KAPAL PENUMPANG (KLOTOK)	0	
KAPAL NELAYAN/PERAHU PENANGKAP IKAN	73	5021



EVALUASI ISIAN BLOK III



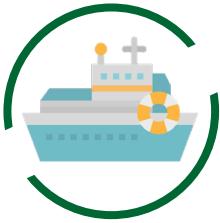
Evaluasi

- Total jumlah penambahan kapal provinsi **harus sama dengan** total penambahan kapal kabupaten/kota di provinsi tersebut

Data Penambahan Jumlah Kapal menurut Ukuran
di Prov. X, 2020

Data Survei Penyusunan Disagregasi PMTB
2021

Jenis Kapal	Prov	Kab/Kot
1. PERAHU TANPA MOTOR	5	30
A. JUKUNG		2
B. PERAHU PAPAN	5	28
2. PERAHU / KAPAL MOTOR		3373
A. MOTOR TEMPEL		593
B. KAPAL MOTOR < 5 GT	180	2761
C. KAPAL MOTOR 5 – 10 GT	135	18
D. KAPAL MOTOR 11 – 20 GT	16	66
E. KAPAL MOTOR 21 – 30 GT	82	96



EVALUASI ISIAN BLOK III



Data Penambahan Jumlah Kapal Menurut Provinsi di Prov X, 2020

Evaluasi

- Perhatikan kembali kewajaran harga kapal/unit dan biaya pemindahan kepemilikan dan izin operasional kapal

Data Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2021					
Jenis Kapal	Jumlah Kapal pada 1 Januari 2020	Penambahan kapal selama 2020	Harga Kapal/unit	Biaya pemindahan kepemilikan dan izin operasional kapal	
1. PERAHU TANPA MOTOR	236	5	150.000	0	0
A. JUKUNG					
B. PERAHU PAPAN	236	5	150.000	0	0
2. PERAHU / KAPAL MOTOR					
A. MOTOR TEMPEL					
B. KAPAL MOTOR < 5 GT	6643	180	200.000	2.000	
C. KAPAL MOTOR 5 – 10 GT	6249	135	600.000	6.000	
D. KAPAL MOTOR 11 – 20 GT	655	16	800.000	9.000	
E. KAPAL MOTOR 21 – 30 GT	3371	82	1.100.000	12.000	

4.7

PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER (PMTB22-APBD MI-07B)





STRUKTUR KUESIONER

BLOK I

KETERANGAN UMUM

BLOK II

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
UNTUK BELANJA MODAL

BLOK IIB

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
UNTUK BELANJA MODAL SELAIN DARI RINCIAN DEFAULT

BLOK III

REALISASI PENDAPATAN/PENERIMAAN DAERAH

BLOK IV

CATATAN

BLOK V

KETERANGAN PEMBERI INFORMASI

BLOK VI

KETERANGAN PETUGAS



BLOK I. KETERANGAN UMUM

BLOK I

BLOK II

BLOK IIB

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK I. KETERANGAN UMUM

1. Provinsi

2. Kabupaten/Kota*)

3. Nomor Urut Instansi

4. Nama Instansi

5. Alamat Instansi

BPKAD (BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH)

Isikan **nomor urut instansi**
3 digit sesuai dengan
daftar PMTB 22-DSDINAS => Panel

Isikan **alamat instansi** beserta **nomor telepon** dengan lengkap dan jelas.

Isikan **nama dan kode provinsi**
kabupaten/kota Untuk instansi tingkat
provinsi, isikan 00 pada kode kabupaten/kota.



BLOK II. REALISASI APBD UNTUK BELANJA MODAL

BLOK I

BLOK II

BLOK IIB

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK II. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) UNTUK BELANJA MODAL

Rincian Jenis Belanja Modal		Realisasi Belanja Modal 2021 (Ribu Rupiah)	Realisasi Belanja Modal 2020 (Ribu Rupiah)
	(1)	(2)	(3)
5.2.3.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkampungan		
5.2.3.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pertanian		
5.2.3.03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkebunan		
5.2.3.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kebun Campuran		
5.2.3.05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan		
5.2.3.06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan		
5.2.3.07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Danau/Rawa		
5.2.3.08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tandus/Rusak		
5.2.3.09	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumput		
5.2.3.10	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pengguna Lain		
5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung		

Jika rincian jenis belanja modal berbeda dengan rincian yang ada di daftar kuesioner, silakan menggunakan format belanja modal format lain seperti di web pengolahan.



BLOK II. REALISASI APBD UNTUK BELANJA MODAL



BLOK I

BLOK II

BLOK IIB

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK II. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) UNTUK BELANJA MODAL		
Rincian Jenis Belanja Modal (1)	Realisasi Belanja Modal 2021 (Ribu Rupiah) (2)	Realisasi Belanja Modal 2020 (Ribu Rupiah) (3)
5.2.3.01 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkampungan		
5.2.3.02 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pertanian		

Rincian Jenis Belanja Modal

Mengadopsi rincian dari **SIMDA** (*Sistem Informasi Manajemen Daerah*)

Pada survei tahun 2018, jumlah daerah yang menggunakan template SIMDA pada pengolahan MI-07B sebesar **±70%**. Sehingga rincian kuesioner MI-07B menggunakan rincian dari 5 dan 7 digit kode akun SIMDA.

Realisasi belanja modal adalah realisasi APBD yang digunakan untuk pembelian/ penambahan barang modal tahun 2020 & 2021

Jika rincian jenis belanja modal berbeda dengan rincian yang ada di daftar kuesioner, silakan menggunakan format belanja modal format lain seperti di web pengolahan.



BLOK II. REALISASI APBD UNTUK BELANJA MODAL



BLOK I

BLOK II

BLOK IIB

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK II. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) UNTUK BELANJA MODAL

Rincian Jenis Belanja Modal (1)		Realisasi Belanja Modal 2021 (Ribu Rupiah) (2)	Realisasi Belanja Modal 2020 (Ribu Rupiah) (3)
5.2.3.16.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator		
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor		
5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		
5.2.3.17.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang		
5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Lainnya		

Disediakan dua format, kuesioner lama dan SIMDA

- Tidak boleh ada formula di Blok II
- Tidak boleh mengganti template
- Tipe angka di excel hanya boleh general

Rincian Blok II

Jika kolom 2 terisi dan kolom 3 tidak ada transaksi isikan dengan 0. Begitu juga sebaliknya



BLOK II. REALISASI APBD UNTUK BELANJA MODAL



BLOK I

BLOK II

BLOK IIB

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

5.2.3.27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	
5.2.3.27.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik
5.2.3.27.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah
5.2.3.27.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)
5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya

Rincian dan Sub Rincian Blok II

Jumlah Rincian sama dengan total penjumlahan Sub Rincian dibawahnya.

Kolom 2 rincian 5.2.3.27 = Kolom 2 rincian 5.2.3.27.1 + Kolom 2 rincian 5.2.3.27.2 + Kolom 2 rincian 5.2.3.27.3 + Kolom 2 rincian 5.2.3.27.4 + Kolom 2 rincian 5.2.3.27.5 dst...

Kolom 3 rincian 5.2.3.27 = Kolom 3 rincian 5.2.3.27.1 + Kolom 3 rincian 5.2.3.27.2 + Kolom 3 rincian 5.2.3.27.3 + Kolom 3 rincian 5.2.3.27.4 + Kolom 3 rincian 5.2.3.27.5 dst...

Jumlah total dari rincian belanja barang modal kode akun 5 digit (5.2.3.27) baik di kolom 2 atau kolom 3 harus sama dengan total rincian belanja barang modal dari data Dinas

Jika tidak sama maka cek kembali mapping realisasi belanja barang modal APBD ke dalam blok II. Namun jika tetap terdapat selisih yang lebih besar, silakan masukkan ke dalam Blok IIB.



BLOK II. REALISASI APBD UNTUK BELANJA MODAL UNTUK BELANJA MODAL SELAIN DARI RINCIAN *DEFAULT*

BLOK I

BLOK II

BLOK IIB

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK IIB. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) UNTUK BELANJA MODAL SELAIN DARI RINCIAN DEFAULT

Kode Akun	Rincian Jenis Belanja Modal (1)	Kode PMTB	Realisasi Belanja Modal 2021 (Ribu Rupiah) (2)	Realisasi Belanja Modal 2020 (Ribu Rupiah) (3)
	<p>Kode PMTB adalah 4 digit kode unik jenis barang yang menjadi PMTB.</p> <p>Jika terdapat pembelian aset tanah silakan isikan dengan kode 9000.</p> <p>Jika terdapat sumber dana yang menjadi belanja barang modal dari subkode akun 5.2.3 dan barangnya masih belum jelas silakan dituliskan di blok IIB dengan kode PMTB 0000.</p>			<p>Di isi sesuai kode PMTB pada Tabel Master Kode PMTB</p>

Field Rincian Jenis Belanja Modal dan Kode PMTB minimal harus terisi jika terdapat baris tambahan



BLOK III. REALISASI PENDAPATAN/PENERIMAAN DAERAH

BLOK I

BLOK II

BLOK IIB

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK III. REALISASI PENDAPATAN/PENERIMAAN DAERAH			
Kode SIMDA	Uraian	Realisasi Pendapatan/ Penerimaan 2021 (Ribu Rupiah)	Realisasi Pendapatan/ Penerimaan 2020 (Ribu Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah		
4.1.1.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		
4.1.1.02.01	Mobil penumpang - Sedan		
4.1.1.02.02	Mobil penumpang - Jeep		
4.1.1.02.03	Mobil penumpang - Minibus		
4.1.1.02.04	Mobil Bus - Microbus		
4.1.1.02.05	Mobil Bus - Bus		
4.1.1.02.06	Mobil Barang/Beban - Pick Up		
4.1.1.02.07	Mobil Barang/Beban - Light Truck		
4.1.1.02.08	Mobil Barang/Beban - Truck		
4.1.1.02.09	Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2		
4.1.1.02.10	Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3		
4.1.1.02.11	Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air		
4.1.1.02.12	BBNKB Lainnya (.....)		
4.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		
4.1.1.16	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		

Isikan nilai realisasi pendapatan/ penerimaan daerah selama tahun 2021 & 2020 sesuai jenis pendapatan/ penerimaan yang terdapat pada Blok III Kolom (1).



BLOK III. REALISASI PENDAPATAN/PENERIMAAN DAERAH



BLOK I

BLOK II

BLOK IIB

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK III. REALISASI PENDAPATAN/PENERIMAAN DAERAH			
Kode SIMDA	Uraian	Realisasi Pendapatan/ Penerimaan 2021 (Ribu Rupiah)	Realisasi Pendapatan/ Penerimaan 2020 (Ribu Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah		
4.1.1.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		
4.1.1.02.01	Mobil penumpang - Sedan		
4.1.1.02.02	Mobil penumpang - Jeep		
4.1.1.02.03	Mobil penumpang - Minibus		
4.1.1.02.04	Mobil Bus - Microbus		
4.1.1.02.05	Mobil Bus - Bus		
4.1.1.02.06	Mobil Barang/Beban - Pick Up		
4.1.1.02.07	Mobil Barang/Beban - Light Truck		
4.1.1.02.08	Mobil Barang/Beban - Truck		
4.1.1.02.09	Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2		
4.1.1.02.10	Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3		
4.1.1.02.11	Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di		
4.1.1.02.12	BBNKB Lainnya (.....)		
4.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		
4.1.1.16	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		

Disediakan dua format, kuesioner lama dan SIMDA

- Tidak boleh ada formula di Blok III
- Tidak boleh mengganti template
- Tipe angka di excel hanya boleh general

Rincian "...lainnya" merupakan selisih antara total dengan jenis pendapatan lain yang berada dalam kelompok yang sama



EVALUASI ISIAN BLOK III

1. Kesalahan Satuan. Kuesioner dan Web Pengolahan (*Manual Entry/Template Upload*) adalah dalam ribuan (Rp.000)
2. Total Belanja Modal tidak ter-entri



RAHASIA		PMTB22-APBD
RAHASIA		PMTB22-APBD
RAHASIA		MI-07B
REPUBLIK INDONESIA BADAN PUSAT STATISTIK SURVEI PENYUSUNAN DISAGREGASI PMTB 2022		
09		
Survei Penyusunan Disagregasi PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) 2022 bertujuan untuk memperoleh gambaran PMTB di Indonesia menurut jenis barang modal, lapangan usaha, dan sektor institusi, serta meningkatkan kualitas data neraca nasional lain yang terkait dengan investasi.		
<input checked="" type="checkbox"/> Kegiatan ini tidak memungut biaya apapun dan tidak ada kaitannya dengan pajak <input checked="" type="checkbox"/> Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik <input checked="" type="checkbox"/> Data yang diberikan dijamin kerahasiaannya oleh Pasal 21 Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik <input checked="" type="checkbox"/> Setiap responden wajib memberikan keterangan dengan benar yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik (Pasal 27 Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik)		
Tata Cara Pengisian Kuesioner <input checked="" type="checkbox"/> Isian ditulis dengan jelas dan mudah dibaca. Penulisan kata-kata menggunakan huruf balok, sedangkan angka ditulis dengan angka biasa (bukan angka romawi). <input checked="" type="checkbox"/> Isikan keterangan/jawaban pada tempat yang disediakan dan tulis kode yang sesuai pada kotak yang tersedia. <input checked="" type="checkbox"/> Pindahkan isian ke kotak dengan mengikuti kaidah penuh tepi kanan (right justified). <input checked="" type="checkbox"/> Contoh: Blok II Kolom 2 Realisasi Belanja Modal 2021 <input checked="" type="checkbox"/> Semua nilai ditulis dalam ribu rupiah.		
BLOK I. KETERANGAN UMUM		
1. Provinsi		
2. Kabupaten/Kota*)		
3. Nomor Urut Instansi		

Contoh Temuan Saat Pengolahan:

BLOK II. REALISASI ANGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) UNTUK BELANJA MODAL

Rincian Jenis Belanja Modal		Realisasi Belanja Modal 2020 (Ribu Rupiah)	Realisasi Belanja Modal 2019 (Ribu Rupiah)
	(1)	(2)	(3)
5.2.3.17	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - PENGADAAN ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	3.641.560	18.986.814,62
5.2.3	TOTAL BELANJA MODAL	197.321.672,80	671.267.235,41
5.2.3	TOTAL BELANJA MODAL		
5.2.3	TOTAL BELANJA MODAL		



EVALUASI ISIAN BLOK III



Data APBD MI-07B vs Data DJPK (Belanja Modal)

1. Sebagai data kontrol belanja modal dapat membandingkan dengan data realisasi pada web djpk
2. Pilih tahun dan wilayah Prov/Kab/Kot (Data realisasi APBD DJPK tersedia dari level provinsi sampai ke kab/kot)
3. Bandingkan dengan total belanja modal yang diperoleh dari SIMDA
4. Jika terdapat perbedaan >5%, Konfirmasikan kembali isian kepada sumber data

Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat 10710 Fax: 021-3509443 Call Center: 150420 (Jam Operasional:

 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Beranda Profil ▾

INFORMASI PUBLIK BERKALA

TRANSPARANSI KINERJA

DIPA
Rencana Kerja
Laporan Kinerja
Laporan Keuangan
Kontrak Kinerja
Laporan Tahunan

INFORMASI PUBLIK SERTA MERTA

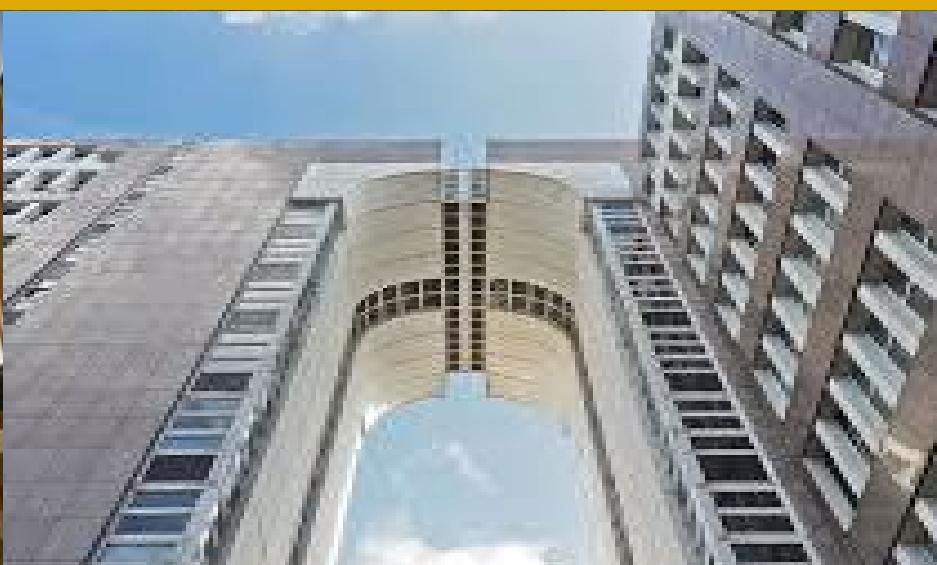
PPID TINGKAT I DJPK

Maklumat dan Standar Layanan
Regulasi PPID
Profil PPID
Laporan Layanan Informasi
Statistik Akses Layanan Informasi DJPK
FAQ
e-PPID
Mekanisme Permohonan
Formulir
Hubungi PPID Tingkat I DJPK

<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>

4.8

PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER (PMTB22-IMB MI-09)





STRUKTUR KUESIONER



BLOK I

KETERANGAN UMUM

BLOK II

KETERANGAN PERMOHONAN PENDAFTARAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BLOK III

CATATAN

BLOK IV

KETERANGAN PEMBERI INFORMASI

BLOK V

KETERANGAN PETUGAS



BLOK I. KETERANGAN UMUM

BLOK I

BLOK II

BLOK IIB

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK I. KETERANGAN UMUM

1. Provinsi
2. Kabupaten/Kota*)
3. Nomor Urut Instansi
4. Nama Instansi
5. Alamat Instansi

1. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T)
2. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP)
3. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)
4. Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP)
5. Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang
6. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
7. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPPT)
8. Kantor Pelayanan Terpadu
9. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Isikan **nomor urut instansi 3 digit** sesuai dengan daftar PMTB22-DSDINAS

Isikan **alamat instansi** beserta **nomor telepon** dengan lengkap dan jelas.

Isikan **nama dan kode provinsi kabupaten/kota** Untuk instansi tingkat provinsi, isikan 00 pada kode kabupaten/kota.



BLOK II. KETERANGAN PERMOHONAN PENDAFTARAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BLOK I

BLOK II

BLOK IIB

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK IIA. KETERANGAN PERMOHONAN PENDAFTARAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN TAHUN 2021					
Klasifikasi Bangunan	Kode PMTB	Jumlah Unit Bangunan yang Disetujui Permoohonannya	Biaya yang Diterima Dinas dari IMB (Ribu Rupiah)	Luas Bangunan (m ²)	Perkiraan Harga Bangunan per m ² (Ribu Rupiah)
1. Fungsi I a. Rumah Tinggal b. Apartemen	1100 1110 1120	Rumah tinggal			
2. Fungsi II a. Sarana Pendidikan b. Sarana Sosial Keagamaan c. Sarana Olahraga	1200 1241 1242 1250	Bangunan sarana pendidikan, sosial keagamaan, dan olahraga			
3. Fungsi III a. Sarana Perdagangan b. Sarana Hotel & Restoran c. Sarana Perkantoran d. Campuran	1200 1230 1210 1220 1280	• Usaha Dagang • Kios • Mini Market • Supermarket • Perkantoran • Bioskop • Cucian Mobil • Bangunan lain yang sejenis			
4. Fungsi IV (Pabrik/Industri)	1270				
5. Fungsi V (Sarang Walet)	1280				
6. Tower	1720				



BLOK II. KETERANGAN PERMOHONAN PENDAFTARAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BLOK I

BLOK II

BLOK IIB

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK IIA. KETERANGAN PERMOHONAN PENDAFTARAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN TAHUN 2021

Klasifikasi Bangunan (1)	Kode PMTB (2)	Jumlah Unit Bangunan yang Disetujui Pemohonannya (3)	Biaya yang Diterima Dinas dari IMB (Ribu Rupiah) (4)	Luas Bangunan (m ²) (5)	Perkiraan Harga Bangunan per m ² (Ribu Rupiah) (6)
1. Fungsi I	1100				
a. Rumah Tinggal	1110				
b. Apartemen	1120				
2. Fungsi II	1200				
a. Sarana Pendidikan	1241				
b. Sarana Sosial Keagamaan	1242				
c. Sarana Olahraga	1250				
3. Fungsi III	1200				
a. Sarana Perdagangan	1230				
b. Sarana Hotel & Restoran	1210				
c. Sarana Perkantoran	1220				
d. Campuran	1280				
4. Fungsi IV (Pabrik/Industri)	1270				
5. Fungsi V (Sarang Walet)	1280				
6. Tower	1720				

Nilai pada baris Rincian (1) harus sama dengan penjumlahan baris Rincian (1a) dan Rincian (1b)

Nilai pada baris Rincian (2) harus sama dengan penjumlahan baris Rincian (2a) s.d. Rincian (2c)

Nilai pada baris Rincian (3) harus sama dengan penjumlahan baris Rincian (3a) s.d. Rincian (3d)



BLOK II. KETERANGAN PERMOHONAN PENDAFTARAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BLOK I

BLOK II

BLOK IIB

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK IIA. KETERANGAN PERMOHONAN PENDAFTARAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN TAHUN 2021					
Klasifikasi Bangunan (1)	Kode PMTB	Jumlah Unit Bangunan yang Disetujui Permohonan-nva	Biaya yang Diterima Dinas dari IMB (Ribu Rupiah)	Luas Bangunan (m ²)	Perkiraan Harga Bangunan per m ² (Ribu Rupiah)
4. Fungsi IV (Pabrik/Industri)	1270				
5. Fungsi V (Sarang Walet)	1280				
6. Tower	1720				
7. Pemancar radio	1440				
8. Rumah kos	1110				

Tempat industri meliputi pabrik dan atau tempat pengolahan berbagai macam barang dan hasil bumi yang sejenis baik permanen maupun semi permanen

Terdiri dari bangunan yang berfungsi dan atau dipergunakan untuk budidaya burung walet baik permanen, tidak permanen maupun semi permanen.

Isikan semua jenis klasifikasi bangunan yang disetujui permohonannya pada tahun 2021



BLOK II. KETERANGAN PERMOHONAN PENDAFTARAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BLOK I

BLOK II

BLOK IIB

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK IIA. KETERANGAN PERMOHONAN PENDAFTARAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN TAHUN 2021

Klasifikasi Bangunan (1)	Kode PMTB (2)	Jumlah Unit Bangunan yang Disetujui Permohonannya (3)	Biaya yang Diterima Dinas dari IMB (Ribu Rupiah) (4)	Luas Bangunan (m ²) (5)	Perkiraan Harga Bangunan per m ² (Ribu Rupiah)
9.					
10.					

Selain bangunan menurut fungsi tersebut terdapat bangunan lain-lain yang menjadi dasar pungutan retribusi daerah, seperti:

- Pagar
- Tanggul
- Turap batas kavling/persilLantai jemur
- Gapura
- Gerbang
- Jalan
- Lapangan upacara
- Lapangan olah terbuka, dll



BLOK II. KETERANGAN PERMOHONAN PENDAFTARAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BLOK I

BLOK II

BLOK IIB

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK IIIA. KETERANGAN PERMOHONAN PENDAFTARAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN TAHUN 2021

Klasifikasi Bangunan (1)	Kode PMTB (2)	Jumlah Unit Bangunan yang Disetujui Permohonannya (3)	Biaya yang Diterima Dinas dari IMB (Ribu Rupiah) (4)	Luas Bangunan (m ²) (5)	Perkiraan Harga Bangunan per m ² (Ribu Rupiah)
-----------------------------	------------------	--	---	--	---

Kode PMTB harus diisi 4 digit kode unik jenis bangunan yang menjadi PMTB.

Isikan **jumlah unit bangunan** yang disetujui permohonan pendaftaran IMB-nya oleh dinas menurut jenis bangunan pada tahun 2021.

Biaya yang diterima dinas dari pembayaran atas IMB, yakni ijin untuk mendirikan dan menggunakan bangunan fisik di suatu wilayah tertentu pada tahun tertentu. Biaya tersebut biasanya merupakan rasio dari nilai bangunan.



BLOK II. KETERANGAN PERMOHONAN PENDAFTARAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BLOK I

BLOK II

BLOK IIB

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK IIA. KETERANGAN PERMOHONAN PENDAFTARAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN TAHUN 2021

Klasifikasi Bangunan (1)	Kode PMTB (2)	Jumlah Unit Bangunan yang Disetujui Permohonannya (3)	Biaya yang Diterima Dinas dari IMB (Ribu Rupiah) (4)	Luas Bangunan (m ²) (5)	Perkiraan Harga Bangunan per m ² (Ribu Rupiah) (6)
-----------------------------	------------------	--	---	--	--

Luas Bangunan Isikan luas bangunan untuk pendaftaran IMB yang disetujui oleh dinas menurut jenis bangunan

Perkiraan Harga Bangunan per m² adalah harga bangunan berdasarkan harga pasar di wilayah tersebut. Informasi ini dapat juga diperoleh dari sumber lain, seperti harga satuan bangunan gedung negara, kontraktor bangunan, dll



BLOK II. KETERANGAN PERMOHONAN PENDAFTARAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BLOK I

BLOK II

BLOK IIB

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK IIA. KETERANGAN PERMOHONAN PENDAFTARAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN TAHUN 2021

Klasifikasi Bangunan (1)	Kode PMTB (2)	Jumlah Unit Bangunan yang Disetujui Permohonannya (3)	Biaya yang Diterima Dinas dari IMB (Ribu Rupiah) (4)	Luas Bangunan (m ²) (5)	Perkiraan Harga Bangunan per m ² (Ribu Rupiah)
1. Fungsi I	1100				
a. Rumah Tinggal					
b. Apartemen					
2. Fungsi II					
a. Sarana Pendidikan					
b. Sarana Sosial Keaga					
c. Sarana Olahraga					
3. Fungsi III					
a. Sarana Perdagangan					
b. Sarana Hotel & Resto					
c. Sarana Perkantoran					
d. Campuran					
4. Fungsi IV (Pabrik/Industr					
5. Fungsi V (Sarang Walet)					

- Kolom Kode PMTB harus terisi sesuai pada Master kode PMTB.
- Kolom yang wajib terisi minimal salah satu baris rincian adalah kolom Luas Bangunan (Kolom 4), Biaya yang diterima dinas (Kolom 3) dan Perkiraan Harga Bangunan per m² (Kolom 5)
- Jika kolom 4 terisi maka kolom 5 harus terisi, begitu juga sebaliknya
- Jika kolom 4 dan kolom 5 terisi maka kolom 3 harus terisi (kecuali Fungsi II), begitu juga sebaliknya
- Jika terdapat baris tambahan (Rincian (9), dst.), maka Kolom (2) s.d. Kolom (5) harus terisi
- Kolom 5 untuk rincian kategori (bukan subkategori) silakan isikan perkiraan harga rata-rata tertimbang
 - Misal:
$$b2ar1k5 = \frac{(b2ar1ak4 * b2ar1ak5 + b2ar1bk4 * b2ar1bk5)}{(b2ar1ak4 + b2ar1bk4)}$$



MASTER KODE PMTB MI-09

BLOK I

BLOK II

BLOK IIB

BLOK III

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

Kode PMTB	Deskripsi	Kode PMTB	Deskripsi	Kode PMTB	Deskripsi	Kode PMTB	Deskripsi
1110	Rumah	1260	Gedung terminal, stasiun dan bandara	1410	Konstruksi pembangkit dan instalasi listrik	1640	Konstruksi kanal
1120	Apartemen	1270	Gedung industri dan gudang	1420	Instalasi air	1710	Konstruksi instalasi transmisi listrik
1210	Hotel	1280	Gedung lainnya	1430	Instalasi gas	1720	Konstruksi instalasi transmisi telepon
1220	Perkantoran	1310	Jalan raya	1440	Konstruksi sentral telekomunikasi	1730	Konstruksi distribusi gas
1230	Pusat perbelanjaan	1320	Jembatan dan jalan layang	1510	Konstruksi produksi dan pengembangan migas	1740	Konstruksi jaringan distribusi air
1240	Gedung pendidikan, tempat ibadah, dan kesehatan	1330	Landasan pacu pesawat	1520	Konstruksi bangunan pengolah/pengilangan dan penampungan minyak dan gas (hulu)	1750	Konstruksi sarana bantu navigasi laut dan rambu sungai
1241	Gedung pendidikan	1340	Jalan kereta	1610	Konstruksi penampungan dan pengolahan air minum dan air limbah	1760	Konstruksi sarana bantu navigasi udara
1242	Tempat ibadah	1350	Dermaga	1620	Konstruksi irigasi	1770	Konstruksi pertambangan nonmigas
1243	Gedung kesehatan	1360	Terowongan	1630	Konstruksi waduk	1780	Taman kota dan bangunan lainnya
1250	Tempat hiburan, rekreasi dan olahraga	1370	Pemecah ombak				



EVALUASI ISIAN BLOK II



- Kesalahan Satuan.** Satuan biaya dalam kuesioner dan web pengolahan adalah dalam ribuan (Rp.000)
- Luas Bangunan/Infrastruktur yang dimintakan izin pembangunan ekstrim**



Data IMB-09 Tahun 2020

BLOK IIA. KETERANGAN PERMOHONAN PENDAFTARAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN TAHUN 2020					
Klasifikasi Bangunan	Kode PMTB	Jumlah Unit Bangunan yang Disetujui Permohonannya	Biaya yang Diterima Dinas dari IMB (Ribu Rupiah)	Luas Bangunan (M ²)	Perkiraan Harga Bangunan per m ² (Ribu Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. FUNGS	1100	46	349.898,87	1	19.709,265
2. A. RI	1110	46	349.898,87	1	19.709,265
18. SARAN HI	1250	2	0	0	
19. SARANA	1243	62	4.756,29	110.386.253	
20. GUDANG	1270	3	128.195	86.227.235	
21. REKLAME	1270	32	1.598,91	234.000.000	
22. PELAYAN.	1280	2	556,16	0	0

C

A

B



A. Luas Bangunan 1 M² ?

Bangunan Rumah tinggal yang disetujui **46**, maka rata-rata luas bangunan per unit hanya **1/46 M²**

B. Perkiraan Harga Bangunan = 0 Rupiah

Reklame sebanyak **32** unit dengan rata-rata luas **7,3 Juta M²**



EVALUASI ISIAN BLOK II



Data IMB-09 Tahun 2020

b2ar1_kode_pmtb	1100 RUMAH TINGGAL	1100 RUMAH TINGGAL	1100 RUMAH TINGGAL	1243 KLINIK/RUMAH SAKIT	1100 RUMAH SEWA	1780 PAGAR
b2ar1ak1						
b2ar1ak2 (Jumlah Unit Bangunan yang Disetujui Permohonannya)	7	46	28	4	23	4
b2ar1ak3 Biaya yang Diterima Dinas dari IMB (Ribu Rupiah)	784	1	4.831	22.160	3.757	10.839.069
b2ar1ak4 Luas Bangunan (m ²)	2.348	349.899	128.661	334	139.216	882
b2ar1ak5 Perkiraan Harga Bangunan per m ² (Ribu Rupiah)	8.580	19.709.265	5.650	3.000	7.755	12.286
ASUMSI : Rumah Tinggal TIPE 50 m ² (Maka terdapat penambahan bangunan rumah tipe 50 sebanyak)	47	6.998	2.573	-		
B2ar1ak4/b2ar1ak2 (Luas/ Jumlah Unit)			83,5	6.053		

Penjelasan Asumsi :

Misalkan dalam suatu Kabupaten A selama setahun jika berdasarkan Luas Bangunan yang tercatat, yaitu 2.348 m², dan bangunan yang disetujui **MISAL** berupa bangunan rumah tinggal dengan rata-rata luasan 50 m², maka terdapat penambahan rumah tipe 50 sebanyak 47 unit ($2348/50 = 47$).

Kewajaran jumlah unit dan nilai perlu dipertimbangkan di tiap wilayah kab/kot.





EVALUASI ISIAN BLOK II



Tahapan Evaluasi Hasil MI-09

1. Periksa kembali antara isian dokumen pada kuesioner dengan isian yang dientri pada web pengolahan
2. Cek kembali mengenai kewajaran jumlah unit, luas dan harga tiap m² untuk tiap jenis bangunan yang disetujui permohonannya.

Cek Luas :

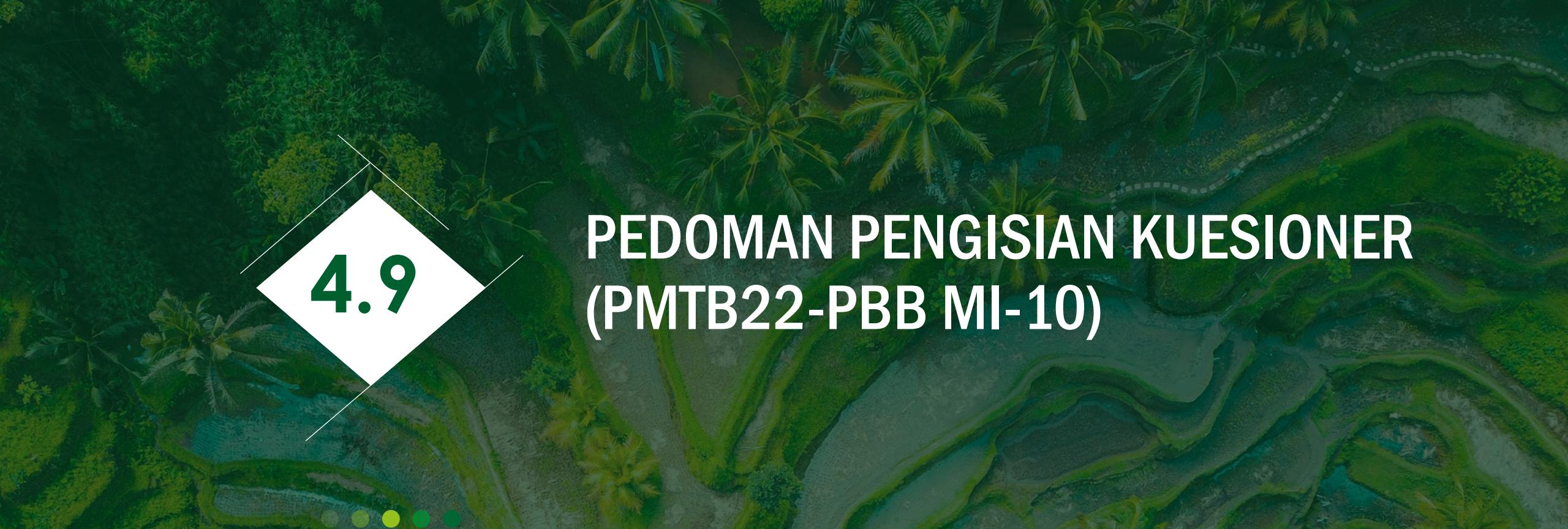
1. *Download raw data MI-09 (Export Data)*
2. Cek hasil pembagian Luas dengan Jumlah bangunan yang disetujui/(b2ar1k3) dengan (b2ar1k2)

$$\text{Luas Bangunan untuk tiap bangunan} = \frac{\text{Total Luas Bangunan}}{\text{Jumlah unit Bangunan yang disetujui}}$$

Cek Harga :

1. *Download raw data MI-09 (Export Data)*
2. Cek hasil perkalian perkiraan harga tiap m² dengan Luas Bangunan kemudian dibagi dengan Jumlah Unit Bangunan yang disetujui
3. Bandingkan hasilnya dengan biaya/harga bangunan dengan jenis terkait

$$\text{Harga tiap Unit} = \frac{\text{Perkiraan Harga} \times \text{Total Luas Bangunan}}{\text{Jumlah unit Bangunan yang disetujui}}$$



4.9



PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER (PMTB22-PBB MI-10)





STRUKTUR KUESIONER

BLOK I

KETERANGAN UMUM

BLOK II

KETERANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2018-2021

BLOK III

KETERANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN

BLOK IV

CATATAN

BLOK V

KETERANGAN PEMBERI INFORMASI

BLOK VI

KETERANGAN PETUGAS



BLOK I. KETERANGAN UMUM

BLOK

I

BLOK

II

BLOK

III A

BLOK

III B

BLOK

IV

BLOK

V

BLOK

VI

BLOK I. KETERANGAN UMUM

1. Provinsi	Isikan nama dan kode provinsi kabupaten/kota . Untuk instansi tingkat provinsi, isikan 00 pada kode kabupaten/kota.	
2. Kabupaten/Kota*)		
3. Nomor Urut Instansi	Isikan nomor urut instansi 3 digit sesuai dengan PMTB22-DSDINAS	
4. Nama Instansi	DINAS KEUANGAN	
5. Alamat Instansi		
Isikan alamat instansi beserta nomor telepon dengan lengkap dan jelas.		



BLOK II. KETERANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

BLOK I

BLOK II

BLOK IIIA

BLOK IIIB

BLOK IV

BLOK V

BLOK VI

BLOK II. KETERANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2018-2021					
TAHUN (1)	LUAS OBJEK PAJAK (m ²)		NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) SEBAGAI DASAR PENGENAAN PBB (Ribu Rupiah)		
	BUMI (2)	BANGUNAN (3)	BUMI (4)	BANGUNAN (5)	

Isikan tahun perolehan PBB.

Isikan **luas keseluruhan objek pajak**. Luas yang diisikan termasuk luas objek pajak perdesaan dan perkotaan serta luas objek pajak sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Isikan total **nilai jual objek pajak (NJOP)** sebagai dasar pengenaan PBB untuk seluruh objek pajak berupa bumi pada kolom (4) dan berupa bangunan pada kolom (5) di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota).



BLOK IIIA. KETERANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN TAHUN 2020-2021



BLOK

I

BLOK

II

BLOK

IIIA

BLOK

IIIB

BLOK

IV

BLOK

V

BLOK

VI

BLOK IIIA. KETERANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN

TAHUN 2020-2021

JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (1)	LUAS BANGUNAN (m ²)		NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) SEBAGAI DASAR PENGENAAN PBB (Ribu Rupiah)	
	2020 (2)	2021 (3)	2020 (4)	2021 (5)

- ✓ Isikan semua **jenis penggunaan bangunan** yang menjadi objek pajak yang dipungut PBB-nya pada tahun **2020-2021**.
- ✓ Jenis penggunaan bangunan yang diisikan termasuk bangunan untuk objek pajak perdesaan dan perkotaan serta objek pajak sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
- ✓ Jika data jenis penggunaan bangunan berbeda dengan rincian pada kolom ini, maka tuliskan jenis penggunaan bangunan sesuai dengan klasifikasi data yang tersedia pada baris berikutnya.



BLOK IIIA. KETERANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN TAHUN 2020-2021



BLOK

I

BLOK

II

BLOK

IIIA

BLOK

IIIB

BLOK

IV

BLOK

V

BLOK

VI

BLOK IIIA. KETERANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN TAHUN 2020-2021

JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (1)	LUAS BANGUNAN (m ²)		NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) SEBAGAI DASAR PENGENAAN PBB (Ribu Rupiah)	
	2020 (2)	2021 (3)	2020 (4)	2021 (5)

Jenis penggunaan bangunan meliputi:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Perumahan | 8. Bengkel/gudang |
| 2. Perkantoran | 9. Gedung pertemuan |
| 3. Pabrik | 10. Bangunan parkir |
| 4. Toko/apotik/ruko | 11. Apartement/kondominium |
| 5. Rumah sakit/klinik | 12. Pompa bensin/kanopi |
| 6. Olahraga/rekreasi | 13. Tangki SPBU |
| 7. Hotel/restoran/wisma | 14. Gedung sekolah |



BLOK IIIA. KETERANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN TAHUN 2020-2021

BLOK

I

BLOK

II

BLOK

IIIA

BLOK

IIIB

BLOK

IV

BLOK

V

BLOK

VI

BLOK IIIA. KETERANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN TAHUN 2020-2021

JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (1)	LUAS BANGUNAN (m ²)		NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) SEBAGAI DASAR PENGENAAN PBB (Ribu Rupiah)	
	2020 (2)	2021 (3)	2020 (4)	2021 (5)

Isikan **luas keseluruhan objek pajak**. Luas yang diisikan termasuk luas bangunan pada objek pajak perdesaan dan perkotaan serta luas bangunan pada objek pajak sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Isikan **total nilai jual objek pajak (NJOP)** sebagai dasar pengenaan PBB menurut jenis bangunan.



BLOK IIIB. KETERANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN TAHUN 2018-2019

BLOK I BLOK II BLOK IIIA BLOK IIIB BLOK IV BLOK V BLOK VI

BLOK IIIB. KETERANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN TAHUN 2018-2019				
JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (1)	LUAS BANGUNAN (m ²)		NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) SEBAGAI DASAR PENGENAAN PBB (Ribu Rupiah)	
	2018 (2)	2019 (3)	2018 (4)	2019 (5)

- ✓ Isikan semua **jenis penggunaan bangunan** yang menjadi objek pajak yang dipungut PBB-nya pada tahun **2018-2019**.
- ✓ Jenis penggunaan bangunan yang diisikan termasuk bangunan untuk objek pajak perdesaan dan perkotaan serta objek pajak sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
- ✓ Jika data jenis penggunaan bangunan berbeda dengan rincian pada kolom ini, maka tuliskan jenis penggunaan bangunan sesuai dengan klasifikasi data yang tersedia pada baris berikutnya.



BLOK IIIB. KETERANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN TAHUN 2018-2019

BLOK

I

BLOK

II

BLOK

IIIA

BLOK

IIIB

BLOK

IV

BLOK

V

BLOK

VI

BLOK IIIB. KETERANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENURUT JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN

TAHUN 2018-2019

JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (1)	LUAS BANGUNAN (m ²)		NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) SEBAGAI DASAR PENGENAAN PBB (Ribu Rupiah)	
	2018 (2)	2019 (3)	2018 (4)	2019 (5)

Isikan **luas keseluruhan objek pajak**. Luas yang diisi termasuk luas bangunan pada objek pajak perdesaan dan perkotaan serta luas bangunan pada objek pajak sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Isikan **total nilai jual objek pajak (NJOP)** sebagai dasar pengenaan PBB menurut jenis bangunan.



BLOK IV. CATATAN

BLOK

I

BLOK

II

BLOK

IIIA

BLOK

IIIB

BLOK

IV

BLOK

V

BLOK

VI

BLOK IV. CATATAN

Harap ditulis jika ada hal-hal khusus berkaitan dengan data instansi

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan-keterangan penting yang diperlukan, **terutama cakupan data yang dimiliki oleh instansi/dinas.**



BLOK V. KETERANGAN PEMBERI INFORMASI

BLOK

I

BLOK

II

BLOK

IIIA

BLOK

IIIB

BLOK

IV

BLOK

V

BLOK

VI

BLOK V. KETERANGAN PEMBERI INFORMASI					
1. Nama Pemberi Informasi			4. Tanda Tangan dan Cap Instansi		
2. Jabatan					
3. Nomor Telepon/HP					
Harus Terisi					

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan pemberi informasi. Tuliskan nama, jabatan, nomor telepon/HP, dan tanda tangan pemberi informasi serta cap instansi



BLOK VI. KETERANGAN PETUGAS

BLOK

I

BLOK

II

BLOK

IIIA

BLOK

IIIB

BLOK

IV

BLOK

V

BLOK

VI

BLOK VI. KETERANGAN PETUGAS			
1. Nama Pencacah		1. Nama Pengawas	
2. Tanggal Pencacahan		2. Tanggal Pengawasan	
3. Tanda Tangan		3. Tanda Tangan	

Isikan **tanggal** pada saat melakukan **pencacahan** dan **pengawasan** dengan format **DD-MM-YYYY**

Tuliskan nama pencacah, tanggal pencacahan, dan tanda tangan pencacah. Selanjutnya kuesioner diserahkan pada pengawas untuk diperiksa kelengkapan dan konsistensi isiannya. Tuliskan nama pengawas, tanggal pengawasan, dan tanda tangan pengawas untuk memastikan bahwa semua isian sudah benar.

Rule Validasi

- Semua rincian harus terisi
- Nama pencacah dan pengawas tidak boleh sama
- Tanggal pencacahan \leq tanggal pengawasan
- Tanggal pencacahan dan tanggal pengawasan tidak melebihi bulan Agustus 2022

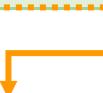


EVALUASI ISIAN BLOK II



Data MI-10 tahun 2020

Provinsi	Luas Bumi (m ²)	Luas Bangunan (m ²)	NJOP Bumi (Ribu Rupiah)	NJOP Bangunan (Ribu Rupiah)
Kab 1	-	53.597.356	-	-
Kab 2	-	60.799.938	-	-
Kab 3	54.662.109	822.310	548.477.658.080	631.337.749.000
Kab 4	183.212.902	116.539	578.919.677.000	70.922.107.000
Kab 5	312.197.840	59.954	854.994.249.600	31.405.104.280
Kab 6	181	72	525	90
Kab 7	189.674.614	1.241.167	-	551.565.625.060



Ketidakwajaran isian

- Kab 1, 2, dan 7: Jika Luas Bangunan terisi (luas > 0), NJOP Bangunan harus terisi (NJOP > 0)
- Kab 3: Bukan wilayah perkotaan, namun memiliki harga tanah sekitar Rp 10 juta/m²
- Kab 6: Luas dan NJOP Bumi dan Bangunan sangat kecil
- Kab 4 dan 5: Bukan wilayah perkotaan, nilai total NJOP Bumi tertinggi se-Indonesia



EVALUASI ISIAN BLOK II



Data MI-10 Kab. X tahun 2017-2020

Tahun	Luas Bumi (m ²)	Luas Bangunan (m ²)	NJOP Bumi (Ribu Rupiah)	NJOP Bangunan (Ribu Rupiah)
2017	312.197.840	33.444	854.994.249.600	17.518.636.080
2018	312.197.840	41.816	854.994.249.600	21.904.057.120
2019	312.197.840	24.107	854.994.249.600	12.627.728.740
2020	312.197.840	59.954	854.994.249.600	31.405.104.280

Luas Bumi dan NJOP Bumi konstan dari tahun 2017 sampai tahun 2020



EVALUASI ISIAN BLOK III



Data MI-10 tahun 2019-2020

Kab/Kot	Luas Bangunan	Luas Bangunan	NJOP Bangunan	NJOP Bangunan	Harga Bangunan	Harga Bangunan
	(m ²)	(m ²)	(Ribu Rupiah)	(Ribu Rupiah)	(Ribu Rupiah/m ²)	(Ribu Rupiah/m ²)
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Kab 1	4.696.309	4.698.445	1.591.011	1.590.448	0,34	0,34
Kab 2	1.162.422	1.322.360	815.645.376.790	904.648.686.790	701.678	684.117
Kab 3	70	72	87	90	1	1
Kab 4	9.388.576	9.748.449	24.634.817	23.757.243	3	2
Kab 5	3.270.689	3.364.922	1.261.048	1.349.637	0,39	0,40
Kab 6	339.363	348.378	350.202.860.000	350.166.020.000	1.031.942	1.005.132
Kab 7	566.775	-	-	-	-	-
Kab 8	353.668	358.818	235.323.745.039	255.200.902.717	665.380	711.227



Ketidakwajaran isian

- Kab 7: Jika Luas Bangunan terisi (luas > 0), NJOP Bangunan harus terisi (NJOP > 0)
- Kab 2, 6, dan 8: Bukan wilayah perkotaan, namun memiliki harga bangunan sangat tinggi
- Kab 1, 3, 4, dan 5: Luas dan NJOP Bangunan sangat kecil



Terima Kasih!
www.bps.go.id

.....